

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Pangkal Pinang Tahun 2025. Laporan ini disusun dan disampaikan guna memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sesuai pedoman tersebut, LPPD Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 memuat informasi tentang pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pangkalpinang, tugas pembantuan serta penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kota Pangkal Pinang selama tahun 2025.

LPPD Kota Pangkalpinang Tahun 2025 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah yang wajib disampaikan setiap tahun kepada Pemerintah Pusat, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. Laporan inilah yang akan menjadi bahan evaluasi Pemerintah Pusat mengenai keberhasilan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di wilayahnya.

Kami menyadari bahwa seluruh keberhasilan yang dicapai di tahun 2025 tidak lepas dari dukungan seluruh lapisan masyarakat Pangkal Pinang. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung upaya Pemerintah Kota Pangkal Pinang untuk mewujudkan Kota Pangkal Pinang yang semakin sejahtera. Besar harapan kami agar sinergi dan kerja sama yang telah terjalin selama ini akan terus berlanjut ke depan. Akhir kata, Semoga Allah SWT selalu meridhoi upaya yang kita lakukan dalam memajukan Pangkal Pinang yang kita cintai. *Aamiin yaa rabbalamin.*

Pangkalpinang, 31 Maret 2026
WALI KOTA PANGKAL PINANG

SAPARUDIN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
1.1. Penjelasan Umum.....	2
1.1.1. Undang-Undang Pembentukan Daerah	2
1.1.2. Data Geografis Wilayah	2
1.1.3. Jumlah Penduduk	4
1.1.4. Jumlah Kecamatan/Kelurahan	7
1.1.5. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah	8
1.1.6. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	12
1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	13
1.2.1. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	13
1.2.2. Visi Dan Misi Kepala Daerah.....	16
1.2.3. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	21
1.2.4. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	28
1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	72
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	95
2.1. Capaian Kinerja Makro.....	95
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	107
2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Untuk Urusan Pemerintahan	107
2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	117
2.2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	119
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	167
3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kab/Kota.....	167
3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kab/Kota.....	168
3.3. Permasalahan dan Kendala	168
3.4. Saran dan Tindak lanjut	168
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	169
4.1. Bidang Urusan Pendidikan	171
4.2. Bidang Urusan Kesehatan	186

4.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum.....	214
4.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat.....	222
4.5. Bidang Urusan Trantibumlinmas	231
4.6. Bidang Urusan Sosial.....	248
BAB V PENUTUP.....	261

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019, maka Bupati/Wali Kota menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Laporan ini disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memuat hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan. Capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri atas capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan Tugas Pembantuan meliputi capaian penyelenggaraan tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi.

Ketentuan yang menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Kunci, Bobot, dan Penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1.1. Penjelasan Umum

1.1.1. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Sebagai sebuah wilayah pemerintahan, awalnya Kota Pangkal Pinang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 06 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Nomor 57 tahun 1956). Dalam perkembangannya Undang-undang Darurat Nomor 06 Tahun 1956 dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 01 Tahun 1957, dan kemudian ditambah dengan Undang-undang Nomor 6 dan 8 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Selanjutnya pada tahun 1959 dikeluarkan Undang-Undang nomor 28 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, yang berimplikasi terhadap perubahan status Kota Pangkal Pinang dari kota kecil menjadi kotapraja. Pada saat terbentuknya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai provinsi ke-31 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, maka Kota Pangkal Pinang menjadi daerah otonom sekaligus sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Seiring perkembangan, undang-undang awal pembentukan Kota Pangkal Pinang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, oleh karena itu kemudian ditetapkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai ketentuan perundang-undangan terbaru pembentukan Kota Pangkal Pinang.

1.1.2. Data Geografis Wilayah

Kota Pangkal Pinang terletak di bagian timur Pulau Bangka dengan posisi 106004' – 106007' BT dan 02004' - 02010' LS dan total luas wilayah + 104,405 km². Luas Kota Pangkal Pinang relatif kecil yaitu hanya sebesar 0,72 persen dari total keseluruhan luas daratan wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Secara administrasi, wilayah Kota Pangkal Pinang di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dan sebelah timur Pangkal Pinang dibatasi oleh Selat Karimata.

Gambar I.1
Peta Wilayah Kota Pangkal Pinang



Sumber : Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2011

Secara umum, kondisi topografis Pangkal Pinang mempunyai ketinggian antara 0-70 meter dari permukaan laut (mDPL) dan terbagi ke dalam lima kelas yaitu : 0-5 mDPL, 5-15 mDPL, 15-30 mDPL, 30-45 mDPL dan 45-70 mDPL dengan titik tertinggi adalah Bukit Jurumudi dengan ketinggian 69 mDPL. Sebagian besar wilayah perkotaan Pangkal Pinang merupakan daerah yang bergelombang dan datar berkisar antara 0-30 mDPL, Sedangkan wilayah dengan ketinggian 30-70 mDPL terletak di Kecamatan Gerunggang, Pangkalbalam dan Bukit Intan.

Dari kategori kelereng, Kota Pangkal Pinang terbagi menjadi 6 (enam) kelas lereng, yaitu :

- Kelas lereng 0-2 % (topografi sangat datar hingga cekungan) meliputi wilayah Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Pangkalbalam, Kecamatan Rangkui dan Kecamatan Gerunggang;
- Kelas lereng 2-8 % (topografi datar), lokasi ini meliputi pantai timur hingga kaki perbukitan terdapat di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Pangkalbalam, Kecamatan Rangkui, Kecamatan Tamansari dan Kecamatan Gerunggang;
- Kelas lereng 8-15 % (topografi landai agak miring), meliputi kaki perbukitan, daerah perbukitan kecil dan dataran berombak, yang terdapat di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Pangkalbalam, Kecamatan Rangkui, Kecamatan Tamansari serta Kecamatan Gerunggang;

- Kelas lereng 15–25 % (topografi agak curam), terdapat pada perbukitan bergelombang, menyebar antara perbukitan kecil di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Pangkalbalam, Kecamatan Rangkui, Kecamatan Tamansari dan Kecamatan Gerunggang;
- Kelas lereng 25–40 % (topografi curam), adanya perbukitan yang terdapat di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Pangkalbalam dan Kecamatan Gerunggang; dan
- Kelas lereng > 40 % (topografi sangat curam), terdapat di puncak-puncak perbukitan di Kecamatan Gerunggang.

Secara morfologis, wilayah Kota Pangkal Pinang berbentuk cekung di mana daerah pusat kota berada di daerah rendah. Hal ini memberikan dampak negatif yaitu Kota Pangkal Pinang menjadi rawan banjir terutama pada musim hujan atau pengaruh pasang surut air laut melalui Sungai Rangkui yang membelah Kota Pangkal Pinang.

Dari sisi klimatologi, Kota Pangkal Pinang memiliki iklim tropis kering sepanjang 3 bulan berturut-turut dan iklim basah mencapai 7 – 9 bulan. Kelembaban udara di wilayah Pangkal Pinang berkisar antara 61 - 96 persen dengan angka rata-rata 83 persen. Temperatur udara rata-rata berkisar antara 23,400C – 32,100C, kecepatan angin rata-rata 2,5 knot, lama penyinaran matahari 47,4 persen dan jumlah curah hujan setahun mencapai 254 hari dengan intensitas 2.705,9 mm.

1.1.3. Jumlah Penduduk

Pada tahun 2025, penduduk Kota Pangkal Pinang berjumlah 247.419 jiwa yang terdiri atas 125.160 jiwa penduduk laki-laki dan 122.259 jiwa penduduk perempuan. Berikut komposisi penduduk Kota Pangkal Pinang menurut kecamatan dan kelurahan pada tahun 2025.

Tabel I.1
Jumlah Penduduk Kota Pangkal Pinang Menurut Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2025

No	Kecamatan/Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	BUKIT INTAN	23.253	22.409	45.662
	- Semabung Lama	3.879	3.742	7.621
	- Bacang	3.151	3.111	6.262
	- Air Itam	4.082	3.992	8.074
	- Pasir Putih	2.452	2.337	4.789
	- Temberan	4.272	4.129	8.401
	- Sinar Bulan	3.320	3.159	6.479
	- Air Mawar	2.097	1.939	4.036
2	TAMAN SARI	10.296	10.219	20.515
	- Opas Indah	2.380	2.308	4.688

No	Kecamatan/Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Total
	- Gedung Nasional	1.595	1.623	3.218
	- Batin Tikal	1.407	1.452	2.859
	- Rawa Bangun	1.340	1.326	2.666
	- Kejaksaan	3.574	3.510	7.084
3	PANGKALBALAM	11.902	11.329	23.231
	- Pasir Garam	1.413	1.370	2.783
	- Lontong Pancur	3.521	3.310	6.831
	- Ketapang	2.666	2.495	5.161
	- Ampui	1.793	1.760	3.553
	- rejosari	2.509	2.394	4.903
4	RANGKUI	20.255	19.858	40.113
	- Pintu Air	2.566	2.475	5.041
	- Bintang	1.223	1.361	2.584
	- Masjid Jamik	1.162	1.229	2.391
	- Asam	2.147	2.006	4.153
	- Melintang	1.882	1.789	3.671
	- Parit Lalang	4.044	4.013	8.057
	- Keramat	4.666	4.447	9.113
	- Gajah Mada	2.565	2.538	5.103
5	GERUNGGANG	29.449	28.802	58.251
	- Taman Bunga	2.879	2.907	5.786
	- Bukit Merapen	5.828	5.852	11.680
	- Bukit Sari	2.553	2.515	5.068
	- Kacang Pedang	4.956	4.926	9.882
	- Air Kepala Tujuh	5.662	5.531	11.193
6	GABEK	20.149	20.019	40.168
	- Selindung	4.048	3.933	7.981
	- Selindung Baru	3.249	3.286	6.535
	- Gabek Satu	2.820	2.799	5.619
	- Gabek Dua	3.480	3.458	6.938
	- Air Salemba	1.924	1.960	1.960
	- Jerambah Gantung	4.628	4.628	4.583
7	GIRIMAYA	9.856	9.623	19.479
	- Pasar Padi	888	873	1.761
	- Batu Intan	1.299	1.356	1.356
	- Bukit Besar	3.070	2.937	6.007
	- Sriwijaya	2.515	2.438	4.953
	- Semabung Baru	2.084	2.019	4.103
TOTAL		125.160	122.259	247.419

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Pangkal Pinang

Sedangkan penambahan jumlah penduduk Kota Pangkal Pinang dalam periode lima tahun terakhir ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel I.2
Jumlah Penduduk Kota Pangkal Pinang Tahun 2021-2025

Jenis Kelamin	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Laki-laki	113.733	116.692	119.400	122.579	125.160
Perempuan	111.429	114.370	116.867	119.706	122.259
Total	225.162	231.062	236.267	242.285	247.419

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Pangkal Pinang

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kota Pangkal Pinang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir selalu mengalami kenaikan, dengan angka pertumbuhan penduduk tertinggi berada di tahun 2024, yaitu sebesar 6.018 jiwa atau sebesar 0,16 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan penduduk merupakan peningkatan jumlah penduduk yang tinggal di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Fenomena ini bisa dipengaruhi oleh faktor alami seperti tingkat kelahiran yang lebih tinggi daripada kematian, maupun migrasi atau pergerakan penduduk, baik masuk maupun keluar. Untuk daerah perkotaan, seperti halnya Kota Pangkal Pinang, pertumbuhan penduduk juga sering kali disebabkan oleh adanya urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota guna mencari pekerjaan, pendidikan dan fasilitas yang lebih lengkap.

Kota Pangkal Pinang mengalami pertumbuhan penduduk setiap tahunnya karena merupakan ibukota provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dimana Kota pangkal Pinang menjadi pusat perkembangan ekonomi dan pemerintahan. Pertumbuhan ini membawa dampak positif, seperti meningkatnya aktivitas ekonomi dan berkembangnya infrastruktur. Namun disisi lain juga menimbulkan tantangan seperti kemacetan lalu lintas, kekurangan perumahan, meningkatnya pengangguran serta masalah lingkungan seperti polusi dan berkurangnya ruang terbuka hijau. Oleh karena itu diperlukan perencanaan tata kota yang baik agar pertumbuhan penduduk dapat dikelola secara berkelanjutan dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan. Berikut adalah laju pertumbuhan penduduk Kota Pangkal Pinang periode 2022-2025

Tabel I.3
Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pangkal Pinang Tahun 2022-2025

Uraian	Tahun			
	2022	2023	2024	2025
Laju Pertumbuhan (%)	2,62	2,25	2,55	2,12

Sumber data : Dinas Dukcapil Kota Pangkal Pinang, diolah

1.1.4. Jumlah Kecamatan/Kelurahan

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pemekaran Kelurahan dan Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Pangkal Pinang, Kota Pangkal Pinang terdiri atas tujuh kecamatan dan empat puluh dua kelurahan, dengan rincian sebagaimana ditampilkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel I.4
Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pangkal Pinang

No	Kecamatan	Kelurahan	
1	Bukit Intan	1.1. Air Itam 1.2. Bacang 1.3. Semabung Lama 1.4. Pasir Putih	1.5. Temberan 1.6. Air Mawar 1.7. Sinar Bulan
2	Taman Sari	2.1. Opas Indah 2.2. Rawa Bangun 2.3. Gedung Nasional	2.4. Batin Tikal 2.5. Kejaksaan
3	Pangkalbalam	3.1. Rejosari 3.2. Ketapang 3.3. Lontong Pancur	3.4. Pasir Garam 3.5. Ampui
4	Rangkui	4.1. Masjid Jamik 4.2. Bintang 4.3. Melintang 4.4. Asam	4.5. Keramat 4.6. Parit Lalang 4.7. Gajah Mada 4.8. Pintu Air
5	Gerunggang	5.1. Kacang Pedang 5.2. Bukit Merapin 5.3. Taman Bunga	5.4. Bukit Sari 5.5. Tua Tunu Indah 5.6. Air Kepala Tujuh
6	Gabek	6.1. Gabek Satu 6.2. Gabek Dua 6.3. Selindung Baru	6.4. Selindung 6.5. Air Selemba 6.6. Jerambah Gantung
7	Girimaya	7.1. Semabung Baru 7.2. Batu Intan 7.3. Bukit Besar	7.4. Pasar padi 7.5. Sriwijaya

1.1.5. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang, jumlah perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Pangkal Pinang sebanyak 34 perangkat daerah. secara rinci, Secara rinci, berikut data jumlah perangkat daerah di Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 beserta dasar hukum pembentukannya.

Tabel I.5
Jumlah Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang

No	Nama Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
1	Sekretariat Daerah	Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang
2	Sekretariat DPRD	
3	Inspektorat Daerah	
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
5	Dinas Kesehatan	
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
8	Satpol PP	
9	Dinas Pangan dan Pertanian	
10	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan	
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
12	Dinas Lingkungan Hidup	
13	Dinas Pariwisata	
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	
16	Dinas Perhubungan	
17	Badan Keuangan Daerah	
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	
19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
20	Kecamatan Bukit Intan	
21	Kecamatan Taman Sari	
22	Kecamatan Pangkalbalam	
23	Kecamatan Rangkui	
24	Kecamatan Gerunggang	
25	Kecamatan Gabek	
26	Kecamatan Girimaya	

No	Nama Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
27	Dinas Sosial	Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang
28	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	
29	Badan Kesbangpol	
30	Dinas Kelautan dan Perikanan	
31	Dinas Pemuda dan Olahraga	
32	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang
33	Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Inovasi Daerah	
34	Dinas Tenaga Kerja	

Pada tahun 2025, jumlah sumber daya pendukung pelaksanaan pemerintahan daerah Kota Pangkal Pinang adalah 6.879 orang yang terdiri dari 2.840 orang ASN, 544 orang PHL, 2.548 orang PPPK Paruh Waktu, 743 orang PPPK Penuh Waktu dan 249 orang Penyedia Jasa Lain Perorangan (PJLP). Dalam tabel berikut, disajikan komposisi pegawai Pemerintah Kota Pangkal Pinang tahun 2025.

Tabel I.6
Komposisi Pegawai Pemerintah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2025

No	Uraian	2024	2025
1	ASN	2840	2795
2	PHL	3914	544
3	PPPK Paruh Waktu	-	2548
4	PPPK Penuh Waktu	598	743
5	PJLP	-	249
Total		7.352	6.879

Sumber data : BKPSDMD Kota Pangkal Pinang

Sedangkan data jumlah pegawai dari masing-masing perangkat daerah yang ada di Kota Pangkal Pinang diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel I.7
Rekapitulasi Jumlah Pegawai Kota Pangkal Pinang Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	ASN	PPPK		PHL	Total
			Penuh Waktu	Paruh Waktu		
1.	Sekretariat Daerah	106	11	82	25	224
2.	Sekretariat DPRD	34	2	83	29	148
3.	Inspektorat Daerah	57	1	13	0	71
4.	Badan Keuangan Daerah	78	2	98	62	240
5.	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	34	3	23	9	69
6.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	30	2	12	1	45
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	21	3	96	3	123
8.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	20	2	12	2	36
9.	Dinas Lingkungan Hidup + UPTD	43	5	341	79	468
10.	Dinas Kesehatan	53	7	30	5	95
	a. UPTD RSUD DH	334	11	117	0	462
	b. Puskesmas Air Itam	45	4	9	4	62
	c. Puskesmas Gerunggang	60	7	3	3	73
	d. Puskesmas Girimaya	41	7	5	4	57
	e. Puskesmas Kacang Pedang	41	3	5	0	49
	f. Puskesmas Melintang	58	6	5	0	69
	g. Puskesmas Pangkalbalam	41	9	3	0	53
	h. Puskesmas Pasir Putih	43	4	2	4	53
	i. Puskesmas Selindung	42	8	4	1	55
	j. Puskesmas Taman Sari	44	10	5	0	59
	k. Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Daerah dan PSC 119	2	1	4	0	7
	l. Laboratorium Kesehatan Daerah	16	1	1	3	21
11.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	55	3	28	13	99
	a. UPTD Satuan Pendidikan Non Formal	10	0	5	4	19
	b. UPTD SD Negeri	387	374	250	39	1.050
	c. SMP Negeri	219	161	63	11	454
	d. TK Negeri	36	12	20	4	72
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	29	1	35	6	71
13.	Dinas Komunikasi dan Informatika	25	2	23	13	63

No	Perangkat Daerah	ASN	PPPK		PHL	Total
			Penuh Waktu	Paruh Waktu		
14.	Dinas Perhubungan dan UPTD	31	1	107	38	177
15.	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan + UPTD	45	3	56	12	116
16.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	56	4	64	32	156
17.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman + UPTD	30	1	54	13	98
18.	Dinas Sosial	35	2	52	3	92
19.	Dinas Pariwisata	27	2	21	8	58
20.	Dinas Pangan dan Pertanian + UPTD	43	8	38	4	93
21.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	26	1	14	3	44
22.	Dinas Tenaga Kerja	23	1	4	0	28
23.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	33	1	14	3	51
24.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	28	1	22	4	55
25.	Dinas Kelautan dan Perikanan + UPTD	21	1	27	7	56
26.	Dinas Pemuda dan Olahraga	20	1	35	9	65
27.	Satuan Polisi Pamong Praja	49	7	304	33	393
28.	Kecamatan Taman Sari	37	6	45	4	92
29.	Kecamatan Gerunggang	49	5	51	8	113
30.	Kecamatan Rangkui	59	9	61	8	137
31.	Kecamatan Pangkalbalam	41	6	48	7	102
32.	Kecamatan Gabek	43	7	57	9	116
33.	Kecamatan Bukit Intan	59	8	61	7	135
34.	Kecamatan Girimaya	36	6	36	8	86
TOTAL		2.795	743	2.548	544	6.630

Sumber : BKPSDMD Kota Pangkal Pinang

1.1.6. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tabel I.8
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi *	%
4	PENDAPATAN DAERAH	993.294.792.032,00	930.148.552.085,21	93,64
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	239.425.583.521,00	258.322.452.782,21	107,89
4.1.01.	Pajak Daerah	152.179.909.235,00	160.870.854.972,00	105,71
4.1.02.	Retribusi Daerah	67.723.374.160,00	74.192.369.505,80	109,55
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.707.028.141,00	6.645.398.017,98	99,08
4.1.04.	Lain-lain PAD Yang Sah	12.815.271.985,00	16.613.830.286,43	129,64
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	239.425.583.521,00	258.322.452.782,21	107,89
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	743.457.998.511,00	664.177.345.607,00	89,33
4.2.01.01	Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	42.885.903.000,00	40.376.807.100,00	94,14
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	470.005.742.000,00	419.617.880.870,00	89,27
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	161.556.529.000,00	134.875.490.748,00	83,48
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	674.448.174.000,00	594.870.178.718,00	88,20
4.2.01.06	Insentif Fiskal	6.985.539.000,00	6.985.539.000,00	100
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	6.985.539.000,00	6.985.539.000,00	100
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	62.024.285.511,00	62.321.627.889,00	100,47
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	58.098.049.511,00	58.586.395.889,00	100,84
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	3.926.236.000,00	3.735.232.000,00	95,13
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	62.024.285.511,00	62.321.627.889,00	100,47
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	743.457.998.511,00	664.177.345.607,00	89,33
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10.411.210.000,00	7.648.753.696,00	73,46
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	10.411.210.000,00	7.648.753.696,00	73,46
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10.411.210.000,00	7.648.753.696,00	73,46
	JUMLAH PENDAPATAN	993.294.792.032,00	930.148.552.085,21	93,64
5	BELANJA DAERAH	1.050.068.184.753,90	920.076.387.893,41	87,62
5.1.	BELANJA OPERASI	948.681.479.698,82	821.753.126.775,77	86,62
5.1.01.	Belanja Pegawai	546.091.807.729,82	450.110.966.423,27	82,42
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	358.261.212.369,00	331.522.831.749,50	92,53
5.1.05.	Belanja Hibah	42.996.619.600,00	38.798.602.047,00	90,23
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	1.331.840.000,00	1.320.726.556,00	99,16
	JUMLAH BELANJA OPERASI	948.681.479.698,82	821.753.126.775,77	86,62
5.2.	BELANJA MODAL	99.679.618.631,00	97.971.510.672,64	98,28

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi *	%
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.301.034.902,00	31.313.469.413,00	96,94
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.972.341.411,00	34.800.401.097,00	99,50
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	20.744.991.000,00	20.620.043.000,00	99,39
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap lainnya	11.550.028.318,00	11.126.458.963,64	96,33
5.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya	111.223.000,00	111.138.199,00	99,92
	JUMLAH BELANJA MODAL	99.679.618.631,00	97.971.510.672,64	98,28
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.407.086.424,08	51.750.445,00	3,67
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.407.086.424,08	51.750.445,00	3,67
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	1.407.086.424,08	51.750.445,00	3,67
5.4.	BELANJA TRANSFER	300.000.000,00	300.000.000,00	100
5.4.02.04.	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	300.000.000,00	300.000.000,00	100
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	300.000.000,00	300.000.000,00	100
	JUMLAH BELANJA	1.050.068.184.753,90	920.076.387.893,41	87,62
	SURPLUS/DEFISIT	(56.773.392.721,90)	10.072.164.191,80	(17,74)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	56.773.392.721,90	56.773.392.721,90	100
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	56.773.392.721,90	56.773.392.721,90	100
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	56.773.392.721,90	56.773.392.721,90	100
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	56.773.392.721,90	56.773.392.721,90	100
	PEMBIAYAAN NETTO	56.773.392.721,90	56.773.392.721,90	100
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0	66.845.556.913,70	0,00

Sumber : Bakeuda Kota Pangkal Pinang, *unaudited*

1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

1.2.1. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Selama pelaksanaan pembangunan di Kota Pangkal Pinang pada masa sebelumnya, telah banyak capaian yang berhasil diraih oleh Pemerintah Kota Pangkal Pinang, sehingga tidak dapat dipungkiri pelaksanaan pembangunan memiliki dampak positif pada pencapaian visi dan misi Kota Pangkal Pinang maupun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional. Namun dalam pelaksanaan pembangunan tersebut masih terdapat permasalahan

yang menyertai sehingga perlu adanya antisipasi dan penyelesaian secara terintegratif pada kebijakan pembangunan, khususnya dalam meredam berkembangnya permasalahan di masa yang akan datang. Selain itu, isu strategis yang berkembang bersifat dinamis, khususnya berbagai fenomena yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan harus diupayakan semaksimal mungkin untuk mengakselerasi capaian pembangunan. Permasalahan dan isu strategis jika diprioritaskan penanganan maupun antisipasinya dapat meningkatkan peluang tercapainya berbagai target pembangunan, namun jika permasalahan dan isu strategis tidak diindahkan dapat memicu beberapa kegagalan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perumusan perencanaan kebijakan pembangunan periode 2024-2026, permasalahan pembangunan Kota Pangkal Pinang memiliki urgensi vital dalam menyusun setiap tahapan kebijakan agar relevan dan mampu secara optimal mencapai visi pembangunan yang diharapkan. Setelah menelaah kajian data dan informasi pada gambaran umum kondisi daerah serta hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, diperoleh gambaran permasalahan utama pembangunan daerah Kota Pangkal Pinang, yakni :

“BELUM OPTIMALNYA KUALITAS DAN DAYA SAING KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”

Permasalahan utama tersebut kemudian dijabarkan ke dalam tiga permasalahan pokok dengan rincian sebagai berikut:

1. Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik

Tata Kelola Pemerintahan berkaitan erat dengan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian. Urusan ini diselenggarakan dalam cakupan yang cukup luas dan kompleks yang meliputi upaya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, pengelolaan keuangan dan organisasi pemerintah daerah, pembinaan dan pengembangan aparatur, peningkatan pelayanan kehidupan beragama, peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan penataan peraturan perundang-undangan.

2. Belum meratanya daya saing SDM berkeadilan

Sumber daya manusia merupakan aset pokok pembangunan. Sebagai salah satu penentu keberhasilan pembangunan daerah, sumber daya manusia harus memiliki kualifikasi tertentu berdasarkan kontribusi di bidangnya masing-masing. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara otomatis akan memberikan

sumbangsih atas keberhasilan setiap capaian kinerja pembangunan daerah. Hal tersebut secara positif akan berdampak pada ketercapaian visi dan misi pembangunan daerah serta menjadi daya dorong perwujudan target dari aspek-aspek pembangunan, baik dari sektor ketenagakerjaan, kehidupan sosial masyarakat, hingga infrastruktur untuk penunjang kehidupan masyarakat. Dalam mewujudkan pembangunan secara menyeluruh, kualitas SDM menjadi prioritas utama untuk membantu percepatan realisasi visi pembangunan daerah. Dalam membangun kualitas sumber daya manusia, Kota Pangkal Pinang masih berupaya untuk meningkatkan berbagai sarana prasarana pembangunan sumber daya manusia agar mampu bersaing dengan wilayah lain, bahkan secara nasional.

3. Belum optimalnya pembangunan ekonomi sektor unggulan yang berkelanjutan

Dalam melihat kondisi perekonomian saat ini, penekanan pemerintah daerah untuk membangun perekonomian adalah melalui peningkatan ketahanan dan pemulihan ekonomi selama Pandemi COVID-19. Hal ini tentu saja menjadi perhatian ke depannya mengingat Pandemi COVID-19 masih belum berakhir dan masih dengan kondisi yang belum bisa dipastikan. Oleh karena itu, berbagai arah kebijakan ditujukan kepada penguatan ketahanan perekonomian maupun pemulihan ekonomi daerah.

Tabel I.9
Keterkaitan Permasalahan Pokok, Permasalahan dan Akar Masalah
Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026

Permasalahan Utama	Permasalahan Pokok	Permasalahan
Belum Optimalnya Kualitas dan Daya Saing Kesejahteraan Masyarakat	Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik	• Belum optimalnya perencanaan dan implementasi terhadap kinerja pemerintah daerah • Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah • Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
	Belum meratanya daya saing SDM berkeadilan	• Potensi tenaga kerja berpendidikan rendah dan minim keterampilan • Masih adanya ketimpangan kesejahteraan masyarakat • Belum optimalnya kualitas dan pemerataan layanan kesehatan • Belum optimalnya peningkatan kualitas pendidikan • Minimnya peran pemuda dan perempuan dalam membangun Pangkal Pinang

Permasalahan Utama	Permasalahan Pokok	Permasalahan
	Belum optimalnya pembangunan ekonomi sektor unggulan yang berkelanjutan	• Belum optimalnya peningkatan nilai tambah produksi sektor unggulan daerah • Belum optimalnya pemberdayaan perekonomian kerakyatan • Belum optimalnya kondusivitas iklim investasi • Belum optimalnya penyediaan infrastruktur pembangunan berkualitas • Meningkatnya aktivitas pembangunan yang berpotensi degradasi lingkungan hidup

Sumber : RPD Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026

Selain permasalahan strategis pemerintah daerah, terdapat juga isu strategis yang terdapat dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Isu strategis merupakan merupakan suatu kondisi yang menjadi perbincangan baik internasional, nasional, hingga regional yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Berikut isu-isu strategis Kota Pangkal Pinang :

- Implementasi Reformasi Birokrasi di Setiap Urusan Pemerintah Daerah;
- Akselerasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem;
- SDM Berkualitas dan Berdaya Saing Guna Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja;
- Penguatan Ketahanan Ekonomi dalam Menghadapi Resesi Ekonomi; dan
- Prinsip Berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur Pembangunan.

1.2.2. Visi Dan Misi Kepala Daerah

Kota Pangkal Pinang merupakan salah satu daerah yang menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Dokumen ini disusun dengan tujuan menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Pangkal Pinang tetap terarah sampai tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang baru setelah ditetapkannya Wali Kota dan Wakil Wali Kota definitif. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 menjadi landasan dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tahun 2024-2026, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan selama tahun 2024-2026, mendukung upaya pencapaian

kesejahteraan bersama melalui sinergitas koordinasi, dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola strategi dan tindakan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kota Pangkal Pinang dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Pusat serta mewujudkan penggunaan sumber daya dan mengembangkan potensi daerah secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Selain itu, Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pangkal Pinang, analisis sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Pangkal Pinang serta isu strategis aktual yang terjadi di Kota Pangkal Pinang. Dokumen ini merupakan pelaksanaan periode keempat (tahap IV) dari RPJPD Kota Pangkal Pinang Tahun 2007-2026. Visi dari RPJPD Kota Pangkal Pinang adalah :

**“Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Melalui Pembangunan Yang Berbasis
Perdagangan Dan Jasa Dengan Dukungan Industri Unggulan”**

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkanlah misi Pembangunan Jangka Panjang Kota Pangkal Pinang sebagai berikut :

1. meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pendapatan per kapita;
2. mewujudkan kesejahteraan yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar sektor publik dari pendidikan dan kesehatan;
3. mengurangi dampak negatif pembangunan ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan dan antar daerah serta masalah pencemaran lingkungan.
4. menciptakan aparatur pemerintah jujur, bersih, berwibawa dan berkualitas melalui dukungan fasilitas yang memadai dan penegakan supremasi hukum;
5. menegakkan hukum yang tidak diskriminatif dan tanpa membedakan kedudukan pelaku guna menekan tindakan kejahatan dan aksi ilegal;
6. menjalin kerjasama yang baik antar dinas, antar pemerintah daerah dan antar pemerintah, dewan dan masyarakat guna mencapai masyarakat yang adil, makmur, aman dan damai;
7. memiliki modal utama pengembangan sektor perdagangan dan jasa melalui pembangunan sistem informasi dan ketersediaan data yang berkualitas terutama didalam menghadapi era globalisasi;

8. meningkatkan peran para pengusaha melalui peningkatan jiwa kewirausahaan, wanita melalui kesetaraan gender dan wanita pengusaha didalam meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ekonomi;
9. menciptakan masyarakat dengan gaya hidup yang religius dan memiliki jiwa serta tubuh yang sehat; dan
10. menciptakan keharmonisan hidup melalui masyarakat taat hukum yang memiliki komitmen dan integritas tinggi terhadap pembangunan.

Guna pencapaian visi dan misi, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran yang menjadi arahan bagi setiap pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Pangkal Pinang dalam kurun waktu 2024-2026. Dan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dalam pelaksanaannya. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Dalam tabel berikut, diuraikan mengenai keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pembangunan jangka menengah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026.

Tabel I.10
Keterkaitan Antara Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah
Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Baik Menuju Tercapainya <i>Good Governance</i>	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	1. Akselerasi reformasi birokrasi dan demokrasi daerah
	2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	
	3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi	
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat yang Berdaya Saing	4. Meningkatnya kualitas kesempatan kerja	2. Peningkatan kompetensi dan keterampilan angkatan kerja sesuai kebutuhan pasar kerja
	5. Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	3. Percepatan penanganan kemiskinan ekstrim
	6. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	4. Peningkatan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan serta daya saing masyarakat
	7. Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pembangunan infrastruktur melalui pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	8. Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan	5. Peningkatan kualitas pembangunan gender
	9. Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah	6. Peningkatan kualitas ekonomi kerakyatan
	10. Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	
	11. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar	7. Peningkatan kualitas tata ruang wilayah berbasis lingkungan
	12. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	

Sumber data : RPD Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026

Sedangkan arah kebijakan pembangunan Kota Pangkal Pinang yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut.

Tabel I.11
Strategi/Prioritas Pembangunan dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026

Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahapan Pembangunan		
			2024	2025	2026
Tujuan 1 :					
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Baik Menuju Tercapainya <i>Good Governance</i>					
Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Akselerasi reformasi birokrasi dan demokrasi daerah	Peningkatan konsistensi perencanaan pembangunan dan implementasi inovasi daerah			
		Penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemer			
		Peningkatan transparansi pengadaan barang dan jasa dan terkendalnya inflasi daerah			
		Peningkatan tata laksana dan kinerja pemerintah daerah			
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah		Optimalisasi pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah			
Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi		Optimalisasi penataan dan pengembangan ASN			
Peningkatan akses data dan informasi, pelayanan publik yang cepat, efektif dan efisien					

Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahapan Pembangunan		
			2024	2025	2026
		berbasis teknologi informasi bagi masyarakat			
		Pembinaan politik daerah guna kesuksesan pelaksanaan Pemilu			
Tujuan 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat yang Berdaya Saing					
Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas kesempatan kerja	Peningkatan kompetensi dan keterampilan angkatan kerja sesuai kebutuhan pasar kerja	Peningkatan keterampilan dan keahlian angkatan kerja, khususnya dalam teknologi, informasi dan komunikasi			
Sasaran 5 : Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Percepatan penanganan kemiskinan ekstrim	Peningkatan keberdayaan masyarakat, perlindungan dan rehabilitasi sosial			
		Peningkatan pemberdayaan petani dan nelayan			
		Perbaikan dan pemerataan pangan dan gizi masyarakat			
Sasaran 6 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan serta daya saing masyarakat	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan fasilitas kesehatan			
Sasaran 7 : Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat		Pemerataan kualitas layanan pendidikan daerah			
		Peningkatan minat baca masyarakat			
		Peningkatan kapasitas daya saing keolahragaan			
Sasaran 8 : Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan	Peningkatan kualitas pembangunan gender	Meningkatkan perlindungan, kesetaraan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan			
Tujuan 3 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pembangunan infrastruktur melalui pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan					
Sasaran 9 : Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah	Peningkatan kualitas ekonomi kerakyatan	Terkendalnya harga barang dan tertatanya infrastruktur pusat perdagangan			
		Meningkatkan pemberdayaan dan kapasitas UMKM			
		Optimalisasi tata kelola dan nilai tambah produksi			
		Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Ekonomi Kreatif			
Sasaran 10 : Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah		Optimalisasi peningkatan daya tarik investasi daerah			
Sasaran 11 : Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar	Peningkatan kualitas tata ruang wilayah berbasis lingkungan	Meningkatkan pemerataan penyediaan infrastruktur dasar dan ketaatan pada tata ruang			

Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahapan Pembangunan		
			2024	2025	2026
		Optimalisasi penataan kawasan kumuh perkotaan			
Sasaran 12 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup		Peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup			

Sumber data : RPD Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026

1.2.3. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Dalam perumusan dokumen perencanaan, program dianggap sebagai awal keberhasilan tujuan dan sasaran daerah. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator. kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Dalam tabel berikut disajikan program prioritas pembangunan daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026.

Tabel I.12
Keselarasan Program dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 – 2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	OPD PENGAMPU	
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Baik Menuju Tercapainya Good Governance	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Akselerasi reformasi birokrasi dan demokrasi daerah	1. Peningkatan konsistensi perencanaan pembangunan dan implementasi inovasi daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bapperida	
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bapperida	
				Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bapperida	
			2. Penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat	
				3. Peningkatan ransparansi pengadaan barang dan jasa dan terkendalinya inflasi daerah	Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
					4. Peningkatan tata laksana dan kinerja pemerintah daerah	Program Administrasi Umum
				5. Optimalisasi pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bakeuda
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah					
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi		6. Optimalisasi penataan dan pengembangan ASN	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDMD	
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDMD	
			7. Peningkatan akses data dan informasi, pelayanan	Program Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi & Informatika	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	OPD PENGAMPU
			publik yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi & Informatika
				Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan se-Kota Pangkal Pinang
				Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Dukcapil
				Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP
				Program Penanggulangan Bencana	BPBD
				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesbangpol
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
			8. Pembinaan politik daerah guna kesuksesan pelaksanaan Pemilu	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesbangpol

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	OPD PENGAMPU	
Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat yang Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas kesempatan kerja	Peningkatan kompetensi dan keterampilan angkatan kerja sesuai kebutuhan pasar kerja	9. Peningkatan keterampilan dan keahlian angkatan kerja, khususnya dalam teknologi, informasi dan komunikasi	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	
				Program Penempatan Tenaga Kerja		
	Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat masyarakat	Percepatan penanganan kemiskinan ekstrim	10. Peningkatan keberdayaan masyarakat, perlindungan dan rehabilitasi sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial	
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		
				Program Penanganan Bencana		
			11. Peningkatan pemberdayaan petani dan nelayan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		
				Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pangan dan Pertanian	
			12. Perbaikan dan pemerataan pangan dan gizi masyarakat	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Pangan dan Pertanian	
				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan serta daya saing masyarakat	13. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan fasilitas kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	
				RSUD Depati Hamzah		
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	
	Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat			14. Pemerataan kualitas layanan pendidikan daerah	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
					Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	OPD PENGAMPU
	Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan	Peningkatan kualitas pembangunan gender	15. Peningkatan minat baca masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan & Kearsipan
			16. Peningkatan kapasitas daya saing keolahragaan	Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pemuda & Olahraga
			17. Meningkatkan perlindungan, kesetaraan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DPPPAKB
				Program Perlindungan Perempuan	
Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pembangunan infrastruktur melalui pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah	Peningkatan kualitas ekonomi kerakyatan	18. Peningkatan keterampilan dan keahlian angkatan kerja, khususnya dalam teknologi, informasi dan komunikasi	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
			19. Meningkatkan pemberdayaan dan kapasitas UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan
				Program Pengembangan UMKM	
			20. Optimalisasi tata kelola dan nilai tambah produksi	Program Pengembangan Ekspor	Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan
				Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	
	21. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Ekonomi Kreatif		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata	
			22. Optimalisasi peningkatan daya tarik investasi daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
	Program Promosi Penanaman Modal				

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	OPD PENGAMPU
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar	Peningkatan kualitas tata ruang wilayah berbasis lingkungan	23. Meningkatkan pemerataan penyediaan infrastruktur dasar dan ketaatan pada tata ruang	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Dinas Pariwisata
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas PUPR
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
				Program Pengembangan Permukiman	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PUPR
				Program Penyelesaian Ganti Kerugaian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	
	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup		24. Optimalisasi penataan kawasan kumuh perkotaan	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman
				Program Kawasan Permukiman	
				Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	
			25. Peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Program Pengelolaan Persampahan	DLH
				Program Pengendalian Pencemaran dan/atau	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	OPD PENGAMPU
				kerusakan Lingkungan Hidup	
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3	
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	

Sumber data : RPD Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026

1.2.4. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Tahun 2025 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPD Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026, dan tema pembangunan yang diambil pada tahun ini adalah :

“ Pemerataan Kesejahteraan dan Daya Saing SDM ”

Merujuk dari tema tersebut, maka pembangunan Kota Pangkal Pinang difokuskan pada pembangunan kesejahteraan sosial dan sumber daya manusia. Berikut ini prioritas dan fokus pembangunan Kota Pangkal Pinang Tahun 2025.

- 1) Akselerasi reformasi birokrasi dan demokrasi daerah, dengan fokus pembangunan yaitu:
 - peningkatan konsistensi perencanaan pembangunan dan implementasi inovasi daerah;
 - penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan;
 - peningkatan transparansi pengadaan barang dan jasa dan terkendalinya inflasi daerah;
 - peningkatan tata laksana dan kinerja pemerintah daerah;
 - optimalisasi pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah;
 - optimalisasi penataan dan pengembangan ASN;
 - peningkatan akses data dan informasi, pelayanan publik yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat; dan
 - pembinaan politik daerah guna kesuksesan pelaksanaan demokrasi.
- 2) Peningkatan kompetensi dan keterampilan angkatan kerja sesuai kebutuhan pasar kerja, dengan fokus pembangunan pada arah kebijakan peningkatan keterampilan dan keahlian angkatan kerja, khususnya dalam teknologi, informasi dan komunikasi.
- 3) Percepatan penanganan kemiskinan ekstrim, dengan fokus pembangunan yaitu :
 - peningkatan keberdayaan masyarakat, perlindungan dan rehabilitasi sosial;
 - peningkatan pemberdayaan petani dan nelayan; dan
 - peningkatan kapasitas daya saing keolahragaan.
- 4) Peningkatan akses pelayanan pendidikan dan kesejahteraan serta daya saing masyarakat, dengan fokus pembangunan yaitu :
 - peningkatan akses dan kualitas pelayanan fasilitas kesehatan;
 - pemerataan kualitas layanan pendidikan daerah; dan
 - peningkatan kapasitas daya saing keolahragaan.

- 5) Peningkatan kualitas pembangunan gender dengan fokus pembangunan peningkatan perlindungan, kesetaraan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan.
- 6) Peningkatan kualitas ekonomi kerakyatan, dengan fokus pembangunan pada :
 - terkendalinya harga barang dan tertatanya infrastruktur pusat perdagangan;
 - meningkatkan pemberdayaan dan kapasitas UMKM;
 - optimalisasi peningkatan daya tarik investasi daerah;
 - peningkatan kualitas dan kuantitatif SDM ekonomi kreatif; dan
 - optimalisasi peningkatan daya tarik investasi daerah
- 7) Peningkatan kualitas tata ruang wilayah berbasis lingkungan, dengan fokus pembangunan yaitu :
 - meningkatkan pemerataan penyediaan infrastruktur dasar dan ketaatan pada tata ruang;
 - optimalisasi penataan kawasan kumuh perkotaan; dan
 - peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Prioritas yang telah disusun pada implementasinya dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah. Adapun kegiatan pembangunan sesuai dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah adalah sebagai berikut.

Tabel I.13
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Kota Pangkal Pinang Tahun 2025

URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PD PELAKSANA
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN DENGAN LAYANAN DASAR		
PENDIDIKAN	1. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
	1.1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
	1.1.1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
	1.1.2. Pengadaan Mebel Sekolah	
	1.1.3. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
	1.1.4. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
	1.1.5. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
	1.1.6. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	

URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PD PELAKSANA
	1.1.7. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
	1.1.8. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
	1.1.9. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
	1.1.10. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
	1.1.11. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
	1.1.12. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
	1.1.13. Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	
	1.1.14. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
	1.1.15. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	
	1.2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
	1.2.1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
	1.2.2. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
	1.2.3. Pengadaan Mebel Sekolah	
	1.2.4. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	
	1.2.5. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
	1.2.6. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
	1.2.7. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
	1.2.8. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
	1.2.9. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
	1.2.10. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
	1.2.11. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
	1.2.12. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
	1.2.13. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
	1.3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	

URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PD PELAKSANA
	1.3.1. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	
	1.3.2. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	
	1.3.3. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	
	1.3.4. Pengelolaan Dana BOP PAUD	
	1.3.5. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	
	1.3.6. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
	1.3.7. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	
	1.3.8. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
	1.4. Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	1.4.1. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	
	1.4.2. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
	1.4.3. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
	1.4.4. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
	1.4.5. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
	2. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
	2.1. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
	2.1.1. Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
	3. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
	3.1. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
	3.1.1. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
	3.1.2. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
	4. PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	
	4.1. Penerbitan izin Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	

URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PD PELAKSANA
	4.1.1. Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
	4.1.2. Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
	4.2. Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	
	4.2.1. Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
	4.2.2. Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
KESEHATAN	1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
	1.1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
	1.1.1. Pembangunan Puskesmas	
	1.1.2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	
	1.1.3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
	1.1.4. Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	
	1.1.5. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
	1.1.6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	
	1.1.7. Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	
	1.2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	1.2.1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
	1.2.2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
	1.2.3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
	1.2.4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
	1.2.5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
	1.2.6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
	1.2.7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
	1.2.8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	

URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PD PELAKSANA
	1.2.9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
	1.2.10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
	1.2.11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
	1.2.12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	
	1.2.13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
	1.2.14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
	1.2.15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
	1.2.16. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
	1.2.17. Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
	1.2.18. Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	
	1.2.19. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
	1.2.20. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
	1.2.21. Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	
	1.2.22. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	
	1.2.23. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
	1.2.24. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	
	1.2.25. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	
	1.2.26. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	
	1.2.27. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	
	1.2.28. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	
	1.2.29. Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	
	1.2.30. Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
	1.3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
	1.3.1. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
	1.4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	1.4.1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	

URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PD PELAKSANA
	1.4.2. Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	1.4.3. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	
	1.4.4. Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	
	2. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
	2.1. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
	2.1.1. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	
	2.1.2. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
	2.2. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	2.2.1. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	3. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
	3.1. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
	3.1.1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
	3.2. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
	3.2.1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
	3.3. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
	3.3.1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga,	

URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PD PELAKSANA
	Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
	3.4. Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	
	3.4.1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	
	4. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
	4.1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	4.1.1. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	
	4.2. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	4.2.1. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	
	4.3. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	4.3.1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	
	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Puskesmas se-Kota Pangkal Pinang
	1.1. Peningkatan Pelayanan BLUD	
	1.1.1. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
	2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	2.1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	2.1.1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
	2.1.2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
	2.1.3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
	2.1.4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
	2.1.5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
	2.1.6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
	2.1.7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
	2.1.8. Pengelolaan Surveilans Kesehatan	

URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PD PELAKSANA
	2.1.9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	
	2.1.10. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
	2.1.11. Operasional Pelayanan Puskesmas	
	2.1.12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	
	2.1.13. Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
	2.1.14. Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	
	2.1.15. Pengelolaan Layanan Imunisasi	
	3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KSESHATAN	
	3.1. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	3.1.1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	
	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	RSUD Hamzah Depati
	1.1. Peningkatan Pelayanan BLUD	
	1.1.1. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
	2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	2.1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
	2.1.1. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
	2.1.2. Pengembangan Rumah Sakit	
	1. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas PUPR
PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG	1.1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	1.1.1. Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	
	1.1.2. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	
	2. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR MINUM	
	2.1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) DI Daerah Kab/Kota	
	2.1.1. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	

URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PD PELAKSANA
	3. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGOLAHAN PERSAMPAHAN REGIONAL	
	3.1. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	
	3.1.1. Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
	4. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
	4.1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	4.1.1. Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	
	4.1.2. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
	5. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
	5.1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kab/Kota	
	5.1.1. Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	
	5.1.2. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	
	6. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
	6.1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
	6.1.1. Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
	6.1.2. Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	
	7. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
	7.1. Penyelenggaraan Jalan Kabuapten/Kota	
	7.1.1. Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	
	7.1.2. Pembangunan Jalan	
	7.1.3. Rekonstruksi Jalan	
	7.1.4. Pemeliharaan Berkala Jalan	
	7.1.5. Survey Kondisi Jalan/Jembatan	
	7.1.6. Pemeliharaan Rutin Jalan	
	8. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	

URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PD PELAKSANA
	8.1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
	8.1.1. Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	
	8.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
	8.2.1. Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	
	8.3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
	8.3.1. Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	
	8.4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kab/Kota	
	8.4.1. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	
PERUMAHAN RAKYAT	1. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1.1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 1.1.1. Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan 1.1.2. Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus 1.1.3. Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 1.1.4. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 1.2. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 1.2.1. Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana 1.2.2. Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator 1.2.3. Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan 1.3. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 1.3.1. Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 1.4. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 1.4.1. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik 1.4.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Disperkim

URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PD PELAKSANA
	1.4.3. Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	
	2. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
	2.1. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	
	2.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	
	2.2. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
	2.2.1. Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	
	2.2.2. Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	
	2.2.3. Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	
	2.3. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
	2.3.1. Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	
	3. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
	3.1. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	
	3.1.1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
	4. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
	4.1. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
	4.1.1. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	
	4.1.2. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	
	4.1.3. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	
	4.1.4. Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	
TRANTIBUMLINMAS	1. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satpol PP
	1.1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PD PELAKSANA
	1.1.1. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	
	1.1.2. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	
	1.1.3. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	
	1.1.4. Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
	1.1.5. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	
	1.1.6. Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
	1.1.7. Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	
	1.2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
	1.2.1. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
	1.2.2. Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	
	1.2.3. Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
	1.3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	
	1.3.1. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	
	2. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
	2.1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	2.1.1. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	2.1.2. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	

URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PD PELAKSANA
	2.1.3. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	
	2.2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	
	2.2.1. Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	
	2.3. Investigasi Kejadian Kebakaran	
	2.3.1. Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	
	2.4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
	2.4.1. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	
	1. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BPDB
	1.1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
	1.1.1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	
	1.2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
	1.2.1. Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	
	1.3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
	1.3.1. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
	1.3.2. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
SOSIAL	1. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial
	1.1. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
	1.1.1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
	1.1.2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
	1.1.3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
	2. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
	2.1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
	2.1.1. Penyediaan Permakanan	
	2.1.2. Penyediaan Sandang	
	2.1.3. Penyediaan Alat Bantu	

URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PD PELAKSANA		
	2.1.4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			
	2.1.5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			
	2.1.6. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat			
	2.1.7. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak			
	2.1.8. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			
	2.1.9. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan			
	2.1.10. Pemberian Layanan Kedaruratan			
	2.1.11. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			
	2.1.12. Pemberian Layanan Rujukan			
	2.2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			
	2.2.1. Pemberian Layanan Kedaruratan			
	2.2.2. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			
	3. PROGRAM PERLINDUNGAN & JAMINAN SOSIAL			
	3.1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
	3.1.1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
	4. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
	4.1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			
	4.1.1. Penyediaan Makanan			
	4.1.2. Penyediaan Sandang			
	4.1.3. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi			
	4.1.4. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan			
	4.1.5. Pelayanan Dukungan Psikososial			
	4.2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			
	4.2.1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana			
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN LAYANAN DASAR			
	KETENAGAKERJAAN		1. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja
			1.1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	
1.1.1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro				
2. PROGRAM PELATOHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				
2.1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				

URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PD PELAKSANA
	2.1.1. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	
	3. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
	3.1. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
	3.1.1. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	
	3.1.2. Job Fair/Bursa Kerja	
	4. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
	4.1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	4.1.1. Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	
	4.1.2. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	
	4.2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
	4.2.1. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	4.2.2. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	4.2.3. Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	
	4.2.4. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK	1. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	DPPPAKB
	1.1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
	1.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	
	1.2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
	1.2.1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	

URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PD PELAKSANA
	2. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
	2.1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
	2.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
	2.1.2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
	2.2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
	2.2.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	
	2.3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	2.3.1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	
	2.3.2. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
	3. PROGRAM PENGELOLAAN ISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
	3.1. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	3.1.1. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	
	4. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	
	4.1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
	4.1.1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
	4.1.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
	5. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	

URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PD PELAKSANA
	5.1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
	5.1.1. Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/ kegiatan pencegahan KTA	
	5.2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	5.2.1. Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	
PANGAN	1. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Pangan & Pertanian
	1.1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
	1.1.1. Penyediaan Informasi Harga Pangan Dan Neraca Bahan Pangan	
	1.1.2. Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	
	1.2. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
	1.2.1. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	
	1.2.2. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
	2. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
	2.1. Penyusunan peta ketahan dan kerawangan pangan kecamatan	
	2.1.1. Penyusunan, Pemutahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	
	2.2. Penanganan kerwanana pangan kewenangan kabupaten/kota	
	2.2.1. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	3. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
	3.1. Pelaksanaan Pengawasan Kemanana Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
	3.1.1. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kab/Kota	
	3.1.2. Penyediaan Saran dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Darah Kab/Kota	

URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PD PELAKSANA
PERTANAHAN	1. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Dinas PUPR
	1.1. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	1.1.1. Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	1.1.2. Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	2. PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	
	2.1. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	2.1.1. Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	3. PROGRAM PENGOLAHAN TANAH KOSONG	
	3.1. Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	
	3.1.1. Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	
LINGKUNGAN HIDUP	3.1.2. Pemanfaatan Tanah Kosong	DLH
	1. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
	1.1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
	1.1.1. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	
	1.2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
	1.2.1. Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	
	2. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
	2.1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
	2.1.1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
	2.1.2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	
	2.1.3. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	
	3. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
	3.1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	

URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PD PELAKSANA
	3.1.1. Pengelolaan Kebun Raya	
	3.1.2. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
	4. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
	4.1. Penyimpanan sementara Limbah B3	
	4.1.1. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
	5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
	5.1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	5.1.1. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	
	5.1.2. Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	6. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
	6.1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	6.1.1. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	7. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
	7.1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	
	7.1.1. Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	
	8. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
	8.1. Pengelolaan Persampahan	
	8.1.1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
	8.1.2. Penanganan sampah melalui pengangkutan	

URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PD PELAKSANA
	8.1.3. Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL	1. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas Dukcapil
	1.1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
	1.1.1. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	
	1.1.2. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	
	1.2. Penataan Pendaftaran Penduduk	
	1.2.1. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	
	1.3. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
	1.3.1. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	
	2. PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
	2.1. Pelayanan Pencatatan Sipil	
	2.1.1. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	
	2.2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
	2.2.1. Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	
	2.2.2. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	
	2.2.3. Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	
	3. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
	3.1. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
	3.1.1. Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
	3.1.2. Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	1. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN MASYARAKAT DESA	DPPAKAB
	1.1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
	1.1.1. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	

URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PD PELAKSANA
	2. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
	2.1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	2.1.1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
	2.1.2. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
	2.1.3. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	
PENGENDALIAN PENDUDUK & KB	1. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	DPPPAKB
	1.1. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
	1.1.1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	
	1.1.2. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	
	1.1.3. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	
	2. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
	2.1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
	2.1.1. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	
	2.1.2. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	
	2.1.3. Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	
	2.1.4. Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	
	2.2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
	2.2.1. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	

URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PD PELAKSANA
	2.2.2. Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	
	2.3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
	2.3.1. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
	2.3.2. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
	2.3.3. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
	2.3.4. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	
	2.4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
	2.4.1. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	
	3. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
	3.1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
	3.1.1. Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	
	3.1.2. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
	3.1.3. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
	3.2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
	3.2.1. Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon	

URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PD PELAKSANA
	Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
	3.2.2. Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
PERHUBUNGAN	1. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 1.1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 1.1.1. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota 1.2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 1.2.1. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 1.2.2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 1.2.3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan 1.3. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 1.3.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 1.4. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 1.4.1. Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor 1.4.2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 1.5. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 1.5.1. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 1.6. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota 1.6.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin 1.6.2. Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin 1.7. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.7.1. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan

URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PD PELAKSANA
KOMUNIKASI & INFORMATIKA	1. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Kominfo
	1.1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	1.1.1. Pelayanan Informasi Publik	
	1.1.2. Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
	1.1.3. Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
	2. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
	2.1. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	2.1.1. Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	
	2.2. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	2.2.1. Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	
	2.2.2. Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	
	2.2.3. Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
KOPERASI & UMKM	1. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Diskopdag UMKM
	1.1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	1.1.1. Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	
	2. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
	2.1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
	2.1.1. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
	3. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
	3.1. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
PENANAMAN MODAL	3.1.1. Pengembangan Usaha Mikro	
	1. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DPMPSTP
	1.1. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	

URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PD PELAKSANA
	1.1.1. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
	2. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
	2.1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
	2.1.1. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
	3. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
	3.1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
	3.1.1. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
	3.1.2. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	
	4. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
	4.1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
	4.1.1. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
	4.1.2. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
	4.1.3. Pengawasan Penanaman Modal	
	5. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
	5.1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	5.1.1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	
KEPEMUDAAN & OLAH RAGA	1. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Dinas Pemuda & OR
	1.1. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
	1.1.1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	
	1.1.2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan	

URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PD PELAKSANA
	Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	
	1.2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	1.2.1. Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	
	2. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
	2.1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
	2.1.1. Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	
	2.2. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	2.2.1. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	
	2.3. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	
	2.3.1. Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	
	2.4. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	
	2.4.1. Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	
	2.4.2. Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	
	3. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
	3.1. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	
	3.1.1. Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	
STATISTIK	1. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 1.1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 1.1.1. Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral 1.1.2. Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Diskominfo
PERSANDIAN	1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Diskominfo

URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PD PELAKSANA
	1.1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	1.1.1. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	1.1.2. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
	1.2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
	1.2.1. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
KEBUDAYAAN	1. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Dikbud
	1.1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	1.1.1. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	
	1.2. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	1.2.1. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	
	1.2.2. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	
	1.3. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	1.3.1. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	
	2. PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	
	2.1. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	2.1.1. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	
	2.1.2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	
	3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA	
	3.1. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
	3.1.1. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	
	3.1.2. Penetapan Cagar Budaya	
	3.2. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
	3.2.1. Pelindungan Cagar Budaya	
PERPUSTAKAAN	1. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan & Kearsipan
	1.1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

URUSAN PEMERINTAHAN		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PD PELAKSANA
		1.1.1. Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan 1.1.2. Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota 1.1.3. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan 1.2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.2.1. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	
KEARSIPAN		1. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 1.1. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 1.1.1. Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 1.1.2. Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 1.2. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 1.2.1. Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 1.3. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 1.3.1. Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 1.3.2. Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 2. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 2.1. Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 2.1.1. Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 2.2. Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang 2.2.1. Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Dinas Perpustakaan & Kearsipan
URUSAN PILIHAN			
KELAUTAN PERIKANAN	DAN	1. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 1.1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat	DKP

URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PD PELAKSANA
	Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
	1.1.1. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	
	1.1.2. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	
	1.2. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	1.2.1. Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	
	1.3. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
	1.3.1. Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
	2. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
	2.1. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
	2.1.1. Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
	2.2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
	2.2.1. Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	2.2.2. Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	3. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
	3.1. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	
	3.1.1. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	
PARIWISATA	1. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas Pariwisata
	1.1. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
	1.1.1. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
	2. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
	2.1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
	2.1.1. Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	

URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PD PELAKSANA
	2.1.2. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 3. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 3.1. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 3.1.1. Pengembangan Sistem Pemasaran 4. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 4.1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 4.1.1. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 4.1.2. Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	
PERTANIAN	1. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 1.1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 1.1.1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 1.2. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.2.1. Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 1.3. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.3.1. Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak 1.3.2. Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak 2. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 2.1. Pengembangan Prasarana Pertanian 2.1.1. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota 2.2. Pembangunan Prasarana Pertanian 2.2.1. Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan 3. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dinas Pangan & Pertanian

URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PD PELAKSANA
	3.1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kab/Kota	
	3.1.1. Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	3.2. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	3.2.1. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	
	3.3. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
	3.3.1. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	
	3.3.2. Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	
	4. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
	4.1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
	4.1.1. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
	5. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
	5.1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
	5.1.1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	
	5.1.2. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
	5.1.3. Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	
PERDAGANGAN	1. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PANGAN	Diskopdag UMKM
	1.1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
	1.1.1. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	
	1.1.2. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
	2. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
	2.1. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
	2.1.1. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
	2.1.2. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	

URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PD PELAKSANA
	3. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	
	3.1. Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	3.1.1. Pameran Dagang Nasional	
	4. PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
	4.1. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
	4.1.1. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	
	4.1.2. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	
PERINDUSTRIAN	1. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 1.1. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 1.1.1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 1.1.2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 1.1.3. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 2. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 2.1. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 2.1.1. Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Diskopdag UMKM
PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA 1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.2.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.2.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.2.3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.2.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.2.5. Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.2.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sekretariat Daerah

URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PD PELAKSANA
	1.2.7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
	1.3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	1.3.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	1.3.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	1.4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	1.4.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	1.4.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	1.4.3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	1.4.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
	1.5. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
	1.5.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
	1.5.2. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
	1.6. Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
	1.6.1. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	
	1.6.2. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	
	1.6.3. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	
	1.7. Penataan Organisasi	
	1.7.1. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
	1.7.2. Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
	1.7.3. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
	1.7.4. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
	1.7.5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	
	1.8. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
	1.8.1. Fasilitas Komunikasi Pimpinan	
	1.8.2. Pendokumentasian Tugas Pimpinan	
	2. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	

URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PD PELAKSANA
	2.1. Administrasi Tata Pemerintahan	
	2.1.1. Penataan Administrasi Pemerintahan	
	2.1.2. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	
	2.1.3. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	
	2.2. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
	2.2.1. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	
	2.2.2. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	
	2.3. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
	2.3.1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	
	2.3.2. Fasilitasi Bantuan Hukum	
	2.3.3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	
	2.4. Fasilitasi Kerja Sama Daerah	
	2.4.1. Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	
	2.4.2. Fasilitasi kerja Sama Luar Negeri	
	3. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
	3.1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
	3.1.1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	
	3.1.2. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
	3.2. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
	3.2.1. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	
	3.2.2. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	
	3.2.3. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	
	3.3. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
	3.3.1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
	3.3.2. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
	3.3.3. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
	3.4. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	
	3.4.1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	
	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DAERAH	Sekretariat DPDR
	1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi, Kinerja Perangkat Daerah	
	1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	

URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PD PELAKSANA
	1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
	1.1.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
	1.1.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
	1.1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	1.1.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	1.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
	1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	1.2.4. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
	1.2.5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
	1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	1.3.1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
	1.3.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
	1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	1.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	1.4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	1.4.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
	1.4.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
	1.4.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	1.4.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
	1.4.7. Fasilitas Kunjungan Tamu	
	1.4.8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	1.5.1. Pengadaan Mebel	
	1.5.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	1.5.3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	1.6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	1.6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PD PELAKSANA
	1.6.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	1.6.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	1.7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	1.7.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	1.7.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	1.8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	
	1.8.1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	
	1.8.2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	
	1.8.3. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	
	1.9. Layanan Administrasi DPRD	
	1.9.1. Fasilitasi Fraksi DPRD	
	1.9.2. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	
	2. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
	2.1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	
	2.1.1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	
	2.2. Peningkatan Kapasitas DPRD	
	2.2.1. Pendalaman Tugas DPRD	
	2.2.2. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	
	2.2.3. Publikasi dan Dokumentasi DPRD	
	2.3. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
	2.3.1. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	
	2.3.2. Pelaksanaan Reses	
	2.4. Pembahasan Kerja Sama Daerah	
	2.4.1. Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	
	2.5. Fasilitasi Tugas DPRD	
	2.5.1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	
	2.5.2. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	
URUSAN PENUNJANG PERENCANAAN		
	1. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Inovasi Daerah

URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PD PELAKSANA
	2.1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
	2.1.1. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
	2.1.2. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
	2.2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
	2.2.1. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	
	2.3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
	2.3.1. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
	2. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	2.1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
	2.1.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
	2.1.2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
	2.1.3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
	2.1.4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
	2.2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
	2.2.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
	2.2.2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
	2.2.3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
	2.2.4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	

URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PD PELAKSANA
	2.2.5. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	
	2.3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
	2.3.1. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
	2.3.2. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
	2.3.3. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	
KEUANGAN	1. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Badan Keuangan Daerah
	1.1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
	1.1.1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	
	1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
	1.1.3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	
	1.1.4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	
	1.1.5. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	
	1.1.6. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	
	1.1.7. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
	1.1.8. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
	1.1.9. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	
	1.2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
	1.2.1. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	
	1.2.2. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	
	1.3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
	1.3.1. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	

URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PD PELAKSANA
	1.3.2. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
	1.3.3. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
	1.3.4. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	
	1.4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	1.4.1. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
	1.5. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	
	1.5.1. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	
	2. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
	2.1. Pengelolaan Barang Milik Daerah	
	2.1.1. Inventarisasi Barang Milik Daerah	
	2.1.2. Pengamanan Barang Milik Daerah	
	2.1.3. Penilaian Barang Milik Daerah	
	2.1.4. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	
	2.1.5. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
	2.1.6. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
	3. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
	3.1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
	3.1.1. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	
	3.1.2. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
	3.1.3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	
	3.1.4. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	
	3.1.5. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	
	3.1.6. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
	3.1.7. Penetapan Wajib Pajak Daerah	

URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PD PELAKSANA
KEPEGAWAIAN	3.1.8. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	
	3.1.9. Penagihan Pajak Daerah	
	3.1.10. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	
	3.1.11. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
	3.1.12. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
	1. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKPSDMD
	1.1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	
	1.1.1. Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	
	1.1.2. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	
	1.1.3. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	
	1.1.4. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	
	1.1.5. Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	
	1.1.6. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	
	1.1.7. Pengelolaan Data Kepegawaian	
	1.2. Mutasi dan Promosi ASN	
	1.2.1. Pengelolaan Mutasi ASN	
	1.2.2. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	
	1.2.3. Pengelolaan Promosi ASN	
	1.3. Pengembangan Kompetensi ASN	
	1.3.1. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	
	1.3.2. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	
	1.4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
	1.4.1. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
	1.4.2. Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	
	1.4.3. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	
PENDIDIKAN & PELATIHAN	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BKPSDMD
	1.1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	1.1.1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
	2. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	2.1. Pengembangan Kompetensi Teknis	
	2.1.1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat	

URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PD PELAKSANA
	Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	
	2.2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	
	2.2.1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	
PENELITIAN & PENGEMBANGAN	1. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Inovasi Daerah
	1.1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
	1.1.1. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	
	1.2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
	1.2.1. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	
	1.3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
	1.3.1. Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	
	1.3.2. Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	1.4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
	1.4.1. Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	
	1.4.2. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
PENGAWASAN	1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat
	1.1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
	1.1.1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
	1.1.2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
	1.1.3. Reviu Laporan Kinerja	
	1.1.4. Reviu Laporan Keuangan	
	1.1.5. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
	1.1.6. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
	1.2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
	1.2.1. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
KEWILAYAHAN	1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Seluruh Kecamatan
	2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
	2.1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PD PELAKSANA
	2.1.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
	2.1.2. Evaluasi Kelurahan	
	2.2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
	2.2.1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
	3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
	3.1. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
	3.1.1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
	4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
	4.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
4.1.1. Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
PEMERINTAHAN UMUM	1. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Badan Kesbangpol
	1.1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
	1.1.1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
	1.1.2. Pembentukan Paskibraka	
	2. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
	2.1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	

URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PD PELAKSANA
	2.1.1. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
	2.1.2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
	2.1.3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
	3. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
	3.1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
	3.1.1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
	4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
	4.1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
	4.1.1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
	4.1.2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
	5. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS	

URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PD PELAKSANA
	DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
	5.1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
	5.1.1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
	5.1.2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
	5.1.3. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	

1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah. Salah satu kebijakan yang dijalankan untuk mewujudkannya adalah melalui Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pengertian dari Standar Pelayanan Minimal atau dikenal dengan SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah wajib memprioritaskan pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini dipertegas lagi pada Pasal 298 yang menyebutkan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan layanan dasar. Lebih lanjut Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang didalamnya terdapat ketentuan khusus tentang SPM, yaitu pada Pasal 130, Pasal 142 dan Pasal 144. Melalui ketentuan ini Pemerintah mengatur Pemerintah Daerah dalam penggunaan DAU (Dana Alokasi Umum), yang salah satunya diprioritaskan untuk memenuhi capaian SPM.

Teknis penerapan SPM diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang lebih lanjut ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah, yang secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- d. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Urusan Trantibumlinmas pada Sub Urusan Bencana Daerah Kab/Kota;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- j. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat;
- k. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- l. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- m. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
- n. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026;
- o. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025;
- p. Peraturan Wali Kota pangkal Pinang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024-2029;
- q. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Pemerintah Kota Pangkal Pinang telah melaksanakan seluruh layanan SPM sebagaimana dimanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yaitu terdapat 29 (dua puluh sembilan) jenis layanan dasar yang terbagi dalam 6 (enam) urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan layanan dasar yang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel I.14
Perangkat Daerah Pelaksana SPM Kota Pangkal Pinang

No	Urusan Pemerintahan	Jenis Layanan Dasar	OPD Pelaksana
1	Pendidikan	1.1. Pendidikan anak usia dini 1.2. Pendidikan dasar 1.3. Pendidikan Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Kesehatan	1. Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar 2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar 3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 4. Pelayanan kesehatan balita 5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif 7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 8. Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi 9. Pelayanan kesehatan pada penderita diabetes mellitus 10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Dinas Kesehatan

No	Urusan Pemerintahan	Jenis Layanan Dasar	OPD Pelaksana
		11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis 12. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	
3	Pekerjaan Umum	3.1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari 3.2. Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Perumahan Rakyat	4.1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kab/kota 4.2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kab/kota	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum 5.2. Pelayanan informasi rawan bencana 5.3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 5.4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 5.5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Satpol PP BPBD
6	Sosial	6.1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti 6.2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti 6.3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti 6.4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti 6.5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Dinas Sosial

Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Bupati/Wali Kota mengkoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di daerah. Koordinasi tersebut meliputi penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM serta penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM. Guna melaksanakan koordinasi tersebut, dibentuk Tim Penerapan SPM Daerah, yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan penanggung jawab Bupati/Wali Kota dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota. Untuk Kota Pangkal Pinang, Tim Penerapan SPM Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 230/KEP/PEM/IV/2025 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Pangkal Pinang. Tugas dari Tim Penerapan ini adalah sebagai berikut :

- mengoordinasikan rencana aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam bentuk peraturan walikota yang diprakarsai oleh Bagian Pemerintahan;
- melakukan koordinasi dengan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal daerah provinsi dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- melakukan koordinasi penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan perangkat daerah pengampu;
- mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait korsi penerapan Standar Pelayanan Minimal secara periodik;
- mengoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja perangkat daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- mengoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkal Pinang;
- mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Pangkal Pinang;
- mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan Standar Pelayanan Minimal lingkup Kota Pangkal Pinang;
- mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal Kota Pangkal Pinang;
- melakukan sosialisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;

- menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan Standar Pelayanan Minimal dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kota Pangkal Pinang, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;
- mengoordinasikan pencapaian berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pangkal Pinang dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
- melakukan rapat secara berkala; dan
- melaporkan penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada sekretariat Bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.

Pada tahun 2025, langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh Tim Penerapan SPM Kota Pangkal Pinang guna memastikan pelaksanaan penerapan SPM di Kota Pangkal Pinang berjalan sesuai yang diharapkan, diantaranya :

- a. Penerbitan Keputusan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 269/KEP/PEM/VI/2025 tentang Penetapan Target Jumlah Warga Negara dan Mutu Minimal Layanan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025, dan Keputusan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 359/KEP/PEM/IX/2025 tentang Penetapan Perubahan Target Jumlah Warga Negara dan Mutu Minimal Layanan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 guna memastikan layanan SPM lebih terarah dan tepat sasaran.
- b. Penetapan Keputusan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 334/KEP/PEM/VIII/2025 tentang Penetapan Target Jumlah Warga Negara dan Mutu Minimal Layanan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Pangkal Pinang Tahun 2026 sebagai dasar dalam penerapan SPM Tahun 2026
- c. Berkoordinasi dengan Tim Sekretariat Bersama SPM Kementerian Dalam Negeri apabila terdapat kendala dalam penerapan SPM
- d. Melaporkan pelaksanaan penerapan SPM Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 melalui kanal spm.bangda.kemendagri.go.id tiap triwulan dapat terlaksana dengan baik
- e. Mengikuti kegiatan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri mengenai penerapan SPM baik secara daring maupun luring;
- f. Mengikuti diklat teknis mengenai penerapan SPM yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri baik secara daring maupun luring dengan peserta yang berasal dari perangkat daerah pengampu SPM maupun dari anggota Tim Penerapan SPM lainnya

Penerapan SPM di Kota Pangkal Pinang Pinang diakomodir melalui program dan kegiatan yang terdapat pada dokumen perencanaan daerah, baik pada RKPD, Renja, dan DPA. Sinkronisasi penerapan SPM pada dokumen perencanaan daerah tahun 2025 Kota Pangkal Pinang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel I.15
Arah Kebijakan dan Program Prioritas Perubahan RKPD Tahun 2025 dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM Tahun 2025

PRIORITAS DAERAH	ARAH KEBIJAKAN	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PD PELAKSANA
Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat	Pemerataan Kualitas Layanan Pendidikan Daerah	1. Pendidikan Anak Usia Dini 2. Pendidikan Dasar 3. Pendidikan Kesetaraan	1. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan negeri berakreditasi minimal B	100\$	69.586.280.270	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
				Capaian SPM Pendidikan Dasar	100%		
				Capaian SPM Pendidikan PAUD	100%		
				Capaian SPM Pendidikan Kesetaraan	100%		
				Proporsi lulusan program Guru Penggerak yang diangkat menjadi Kepala Sekolah dan Pengawas / Penilik (PAUD/SD/SMP/ Kesetaraan)	100%		
			1.1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	84,09	39.388.378.622,00	
				Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	75,79		
				Persentase Satuan Pendidikan Negeri berakreditasi minimal B	100%		
				Iklim Keamanan SD	74,98		
				Iklim KeBhinekaan SD	73,90		
				Iklim Inklusivitas SD	58,53		
				Persentase Guru Sekolah Dasar yang berkualifikasi S1/DIV	87%		
			1.1.1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang telah dibangun	10 unit	1.860.094.000,00	
			1.1.2. Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel sekolah yang tersedia	54 unit	2.744.998.410,00	
			1.1.3. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba akademik dan non akademik	700 peserta didik	166.125.000,00	
			1.1.4. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan sekolah dasar	344 orang	8.056.547.244,00	
			1.1.5. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah dasar yang mengelola dana BOS	89 satuan pendidikan	22.536.150.000,00	

PRIORITAS DAERAH	ARAH KEBIJAKAN	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PD PELAKSANA
			1.1.6. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah tenaga pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan dana BOS sekolah dasar	89 orang	78.000.000,00	
			1.1.7. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk pendidikan	160 orang	81.960.000,00	
			1.1.8. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan	1 dokumen	37.100.000,00	
			1.1.9. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang pendidikan yang dilaksanakan	1 dokumen	199.800.000,00	
			1.1.10. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia	450 paket	171.000.000,00	
			1.1.11. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	25 unitt	1.360.403.968,00	
			1.1.12. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau magang/pkl untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	339 orang	373.800.000,00	
			1.1.13. Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar	91 satuan pendidikan	332.400.000,00	
			1.1.14. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	5 ruang	940.000.000,00	
			1.1.15. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik sekolah dasar yang menerima biaya personil peserta didik	650 peserta didik	450.000.000,00	
			1.2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan asesmen nasional	91,00	18.993.069.260,00	
				Rata-rata kemampuan numerasi smp berdasarkan asesmen nasional	91,26		
				Persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B	86,81%		
				Iklim keamanan SMP	100		
				Iklim kebhinekaan SMP	71,10		
				Iklim inklusivitas SMP	89,85		
				Persentase guru Sekolah Menengah Pertama yang berkualifikasi s1/div	75%		
			1.2.1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang telah dibangun	3 unit	455.000.000,00	

PRIORITAS DAERAH	ARAH KEBIJAKAN	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PD PELAKSANA
			1.2.2. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	1 ruang	350.000.000,00	
			1.2.3. Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel sekolah yang tersedia	18 unit	1.249.321.444,00	
			1.2.4. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta didik sekolah menengah pertama yang menerima biaya personil peserta didik	268 peserta didik	335.000.000,00	
			1.2.5. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba akademik dan non akademik	700 peserta didik	155.460.000,00	
			1.2.6. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama	101 orang	2.251.307.816,00	
			1.2.7. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah menengah pertama yang mengelola dana bos	27 satuan pendidikan	13.133.130.000,00	
			1.2.8. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi (tik) untuk pendidikan	100 orang	100.840.000,00	
			1.2.9. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 dokumen	37.150.000,00	
			1.2.10. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 dokumen	199.700.000,00	
			1.2.11. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	28 satuan pendidikan	270.320.000,00	
			1.2.12. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	80 rang	354.000.000,00	
			1.2.13. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	268 paket	101.840.000,00	
			1.3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang mendapatkan Minimal Akreditasi B	68%	7.696.680.752,00	
				Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	66%		
				Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan Kualifikasi S1/DIV	70,43%		

PRIORITAS DAERAH	ARAH KEBIJAKAN	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PD PELAKSANA
			1.3.1. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	260 peserta didik	160.000.000,00	
			1.3.2. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Dengan Satuan:Orang)	30 orang	1.984.804.340,00	
			1.3.3. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	104 satuan pendidikan	369.401.300,00	
			1.3.4. Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Dengan Satuan:Satuan Pendidikan)	104 satuan pendidikan	2.505.740.000,00	
			1.3.5. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	104 orang	99.029.500,00	
			1.3.6. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	363 orang	327.500.000,00	
			1.3.7. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	27 paket	1.749.141.762,00	
			1.3.8. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 ruang	501.063.850,00	
			1.4. Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Kesetaraan (APS)	0%	3.508.151.636,00	
				Proporsi Jumlah Satuan PNF yang Mendapatkan Minimal Akreditasi C	78%		
			1.4.1. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta didik non formal/ kesetaraan yang menerima biaya personil peserta	80 peserta didik	232.000.000,00	
			1.4.2. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah sekolah non formal/ kesetaraan yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen	8 satuan pendidikan	120.209.000,00	
			1.4.3. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah sekolah non formal/kesetaraan yang mengelola dana BOP	8 satuan pendidikan	2.512.380.000,00	
			1.4.4. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan	1 dokumen	260.849.000,00	
			1.4.5. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar	459 peserta didik	382.713.636,00	
				Rasio Pengawas dan Penilik PAUD	11%	74.600.000,00	

PRIORITAS DAERAH	ARAH KEBIJAKAN	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PD PELAKSANA
			2. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru pendidikan dasar yang berkualifikasi S1/DIV	88%		
				Persentase guru PAUD dan PNF yang berkualifikasi S1/DIV	52%		
			2.1. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Rasio Pemenuhan Pendidik Jenjang Pendidikan Dasar	80%	74.600.000,00	
			2.1.1. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1 dokumen	33.300.000,00	
			2.1.2. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	2 laporan	41.300.000,00	
	Peningkatan Akses Dan Kualitas Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1. Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar 2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar 3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 4. Pelayanan kesehatan balita 5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif 7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 8. Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	1.543.911.500,00	Dinas Kesehatan, Puskesmas
				Persentase layanan kesehatan untuk ibu bersalin	100%		
				Persentase layanan kesehatan untuk bayi baru lahir	100%		
				persentase layanan kesehatan untuk balita	100%		
				persentase layanan kesehatan untuk Anak Usia Pendidikan Dasar	100%		
				Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard	100%		
				Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard	100%		
				Persentase layanan	100%		

PRIORITAS DAERAH	ARAH KEBIJAKAN	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PD PELAKSANA
		9. Pelayanan kesehatan pada penderita diabetes mellitus		kesehatan untuk penderita DM			
		10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat		Persentase layanan kesehatan untuk penderita hipertensi	100%		
		11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis		Persentase layanan kesehatan untuk penderita ODGJ	100%		
		12. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)		Persentase layanan kesehatan untuk orang terduga TB	100%		
				Persentase layanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	100%		
			Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.543.911.500,00	
			1. DINAS KESEHATAN			800.415.000,00	Dinas Kesehatan
			1.1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3.750 Orang	315.350.000,00	
			1.2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3.561 Orang	10.000.000,00	
			1.3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3.413 Orang	19.950.000,00	
			1.4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	15.856 Orang	15.900.000,00	
			1.5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	39.016 Orang	102.000.000,00	
			1.6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	150.217 Orang	104.440.000,00	
			1.7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	16.028 Orang	50.300.000,00	
			1.8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	43.957 Orang	14.250.000,00	
			1.9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5.643 orang	36.000.000,00	

PRIORITAS DAERAH	ARAH KEBIJAKAN	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PD PELAKSANA
			1.10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	429 orang	68.400.000,00	
			1.11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	3.788 orang	39.075.000,00	
			1.12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	6.800 orang	24.750.000,00	
			2. PUSKESMAS GERUNGANG			134.500.000,00	Puskesmas Gerunggang
			2.1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	794 Orang	19.800.000,00	
			2.2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8935 Orang	73.500.000,00	
			2.3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	88 Orang	7.200.000,00	
			2.4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	1080 Orang	34.000.000,00	
			3. PUSKESMAS SELINDUNG			110.800.000,00	Puskesmas Selindung
			3.1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	720 Orang	46.800.000,00	
			3.2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4 Orang	56.000.000,00	
			3.3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	48 Orang	4.800.000,00	
			3.4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	44 Orang	3.200.000,00	
			4. PUSKESMAS PASIR PUTIH			61.600.000,00	Puskesmas Pasir Putih
			4.1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	248 Orang	26.100.000,00	

PRIORITAS DAERAH	ARAH KEBIJAKAN	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PD PELAKSANA
			4.2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4 Orang	26.500.000,00	
			4.3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	28 Orang	3.600.000,00	
			4.4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	301 Orang	5.400.000,00	
			5. PUSKESMAS AIR ITAM			91.800.000,00	Puskesmas Air Itam
			5.1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	476 Orang	39.600.000,00	
			5.2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4264 Orang	36.000.000,00	
			5.3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	44 Orang	2.400.000,00	
			5.4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	513 Orang	13.800.000,00	
			6. PUSKESMAS GIRIMAYA			88.650.000,00	Puskesmas Girimaya
			6.1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	295 Orang	30.000.000,00	
			6.2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4 Orang	32.000.000,00	
			6.3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	32 Orang	4.500.000,00	
			6.4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	365 Orang	22.150.000,00	
			7. PUSKESMAS MELINTANG			78.580.000,00	Puskesmas Melintang
			7.1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	216 Orang	31.680.000,00	
			7.2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4 Orang	28.300.000,00	

PRIORITAS DAERAH	ARAH KEBIJAKAN	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PD PELAKSANA
			7.3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	192 Orang	9.600.000,00	
			7.4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	180 Orang	9.000.000,00	
			8. PUSKESMAS TAMAN SARI			58.626.500,00	Puskesmas Taman Sari
			8.1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	136 orang	18.000.000,00	
			8.2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	656 orang	20.751.500,00	
			8.3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	24 orang	2.400.000,00	
			8.4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	204 orang	17.475.000,00	
			9. PUSKESMAS KACANG PEDANG			49.040.000,00	Puskesmas Kacang Pedang
			9.1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	253 orang	13.440.000,00	
			9.2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2019 orang	21.400.000,00	
			9.3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	36 orang	3.000.000,00	
			9.4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	175 orang	11.200.000,00	
			10. PUSKESMAS PANGKALBALAM			69.900.000,00	Puskesmas Pangkal Balam
			10.1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	332 orang	30.000.000,00	
			10.2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3135 orang	20.100.000,00	
			10.3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	48 orang	4.800.000,00	

PRIORITAS DAERAH	ARAH KEBIJAKAN	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PD PELAKSANA	
			10.4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	418 orang	15.000.000,00		
Peningkatan kualitas tata ruang wilayah berbasis lingkungan	Meningkatkan Pemerataan Penyediaan Infrastruktur Dasar Dan Ketaatan Pada Tata Ruang	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	1. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi		11.197.534.950,00	Dinas PUPR	
			1.1. Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya kapasitas SPAM IKK/perkotaan atau SPAM tematika tertentu yang terbangun		11.197.534.950,00		
			1.1.1. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	35 liter/detik	11.197.534.950,00		
		Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik		1. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	90%	338.830.982,00	
				1.1. Pengelolaan dan engembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	700 rumah	338.830.982,00	
				1.1.1. Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah sarana pengangkutan lumpur tinja yang disediakan	2 unit	251.380.982,00	
				1.1.2. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 dokumen	87.450.000,00	
		1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kab/kota 2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kab/kota		1. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni korban bencana	100%	269.042.480,00	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman
					Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi korban relokasi program pemerintah kab/kota	100%		
				1.1. Pendataan, Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase pendataan penyediaan dan rehabiltiasi rumah korban bencana atau relokasi yang terlaksana		257.024.480,00	
				1.1.1. Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah dokumen data identifikasi lahan yang potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	2 dokumen	4.659.000,00	
				1.1.2. Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah dokumen data rumah sewa milik Masyarakat, rumah susun, dan rumah khusus	2 dokumen	55.602.392,00	

PRIORITAS DAERAH	ARAH KEBIJAKAN	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PD PELAKSANA
			1.1.3. Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data rumah di lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/kota	2 dokumen	45.830.696,00	
			1.1.4. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	2 dokumen	150.932.392,00	
			1.2. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Persentase pelaksanaan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah	100%	,12.018.000,00	
			1.2.1. Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah orang pada tim satgas, tim pendamping, dan fasilitator yang terbentuk dan terlatih	35 orang	6.509.000,00	
			1.2.2. Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah orang/sukarelawan yang mengikuti sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota	20 Orang	5.509.000,00	
Akselerasi reformasi birokrasi dan demokrasi daerah	Peningkatan akses data dan informasi, pelayanan publik yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat	Pelayanan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1. PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100%	8.768.752.612,00	Satpol PP
			1.1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus gangguan trantibum yang ditangani persentase tersusunnya laporan penyelesaian dampak penegakan perda dan perkada persentase tersusunnya laporan koordinasi pelaksanaan trantibum tingkat kota	100%	8.310.432.612,00	
			1.1.1. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	4 dokumen	447.715.364,00	
			1.1.2. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	50 orang	77.331.600,00	
			1.1.3. Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	4 dokumen	4.366.200,00	

PRIORITAS DAERAH	ARAH KEBIJAKAN	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PD PELAKSANA
			1.1.4. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah laporan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawasan	5 laporan	7.609.118.548,00	
			1.1.5. Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk asa dan Kerusuhan Massa	Jumlah laporan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	100 laporan	152.900.900,00	
			1.1.6. Penyediaan Layanan dasar dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Jumlah laporan penyediaan layanan dampak penegakan perda dan perkara yang terlayani	1 laporan	19.000.000,00	
			1.2. Penegakan Peraturan Daerah abupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada sesuai SOP	100%	458.320.000,00	
			1.2.1. Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sesuai SOP	4 laporan	197.040.000,00	
			1.2.2. Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 laporan	261.280.000,00	
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	1. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	5.166.567.128,00	Bidang Pemadam Kebakaran, Satpol PP
			1.1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	100%	5.091.247.128,00	
			1.1.1. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen NSPM pencegahan/ penanggulangan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota setiap tahunnya	1 dokumen	2.400.000,00	

PRIORITAS DAERAH	ARAH KEBIJAKAN	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PD PELAKSANA
			1.1.2. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan	5.076.247.128,00	
			1.1.3. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan penyelamatan/evakuasi saat penanggulangan kebakaran dan non kebakaran	1 dokumen	12.600.000,00	
			1.2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Terlasannya Infeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100%	10.000.000,00	
			1.2.1. Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah dokumen yang memuat data bangunan/gedung/lingkungan yang memenuhi kelaikan standar sarana prasarana proteksi kebakaran	1 dokumen	10.000.000,00	
			1.3. Investigasi Kejadian Kebakaran			30.000.000,00	
			1.3.1. Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah dokumen yang memuat hasil kejadian kebakaran yang dilakukan investigasi lanjutan meliputi penelitian dan pengujian	1 dokumen	30.000.000,00	
			1.4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			35.320.000,00	
			1.4.1. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah desa/kelurahan yang terbentuk dan terbina relawan pemadam kebakaran pada lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) setiap tahunnya	42 desa/kelurahan	35.320.000,00	
Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat, Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial		1. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	500 orang	3.366.011.832,00	BPBD
				Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	6.000 orang		
				Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	600 orang		
				Jumlah dokumen sistem dasar penanggulangan bencana yang tersusun	6 orang		
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana	1.1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang	100%	50.000.000,00	

PRIORITAS DAERAH	ARAH KEBIJAKAN	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PD PELAKSANA
				memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana			
			1.1.1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	525 orang	50.000.000,00	
		Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana di lokasi rawan bencana	500 orang	100.000.000,00	
			1.2.1. Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 dokumen	100.000.000,00	
		Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	1.3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah korban bencana berhasil dicari ditolong dan dievakuasi yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta jumlah kasus KLB yang ditangani kurang dari 24 jam	600 orang	3.216.011.832,00	
			1.3.1. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	600 orang	3.112.991.832,00	
			1.3.2. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	400 orang	103.020.000,00	
		1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	1. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-	185.300.000,00	Dinas Sosial
		2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	1.1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar; anak terlantar; lanjut usia terlantar dan gelandangan dan pengemis	100%	185.300.000,00	
		3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	1.1.1. Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan	100 orang	48.000.000,00	

PRIORITAS DAERAH	ARAH KEBIJAKAN	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PD PELAKSANA
		4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti		sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kabupaten/kota			
			1.1.2. Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan kabupaten/kota	50 orang	20.000.000,00	
			1.1.3. Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota	50 orang	48.000.000,00	
			1.1.4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten/kota	10 orang	12.000.000,00	
			1.1.5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan kabupaten/kota	15 orang	11.700.000,00	
			1.1.6. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	15 orang	7.400.000,00	
			1.1.7. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak bagi penyandang disabilitas kewenangan kabupaten/kota	50 orang	2.500.000,00	
			1.1.8. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan kabupaten/kota	60 orang	2.500.000,00	
			1.1.9. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenangan kabupaten/kota	50 orang	2.400.000,00	
			1.1.10. Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kabupaten/kota	10 orang	12.000.000,00	
			1.1.11. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga Kewenangan kabupaten/kota	20 orang	4.000.000,00	
			1.1.12. Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah orang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota	50 orang	7.200.000,00	
		Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat	1. PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan	100%	637.795.080,00	

PRIORITAS DAERAH	ARAH KEBIJAKAN	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PD PELAKSANA
		Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten /kota			
			1.1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	51.675.000,00	
			1.1.1. Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) kewenangan kabupaten/kota	537 orang	20.000.000,00	
			1.1.2. Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	537 orang	21.248.000,00	
			1.1.3. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten/kota	135 unit	7.200.000,00	
			1.1.4. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan kabupaten/kota	135 orang	2.327.000,00	
			1.1.5. Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan kabupaten/kota	537 orang	900.000,00	
			1.2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana melalui Tagana Masuk Kelurahan (TMK)	100 %	586.120.080,00	
			1.2.1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana kewenangan kabupaten/kota	47 orang	586.120.080,00	

Sumber : Perubahan RKPD Tahun 2025 Kota Pangkal Pinang, diolah

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan laporan yang disampaikan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas capaian kinerja makro, capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah. Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum, yang dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Berikut uraian mengenai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Pangkal Pinang selama tahun 2025.

2.1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Indikator kinerja makro Kota Pangkal Pinang meliputi indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita dan ketimpangan pendapatan. Secara ringkas, capaian kinerja makro Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel. II.1
Capaian Kinerja Makro Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2025

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pembangunan Manusia	80,9	81,64	0,91
2	Persentase Penduduk Miskin	4,04	4,50	11,39
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,98	5,73	-4,18
4	Pertumbuhan Ekonomi	-2,30	4,54	-297,39
5	PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	82.197,55	87.212,95	6,10

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,292	0,249	-14,73

Sumber data : BPS Kota Pangkal Pinang

2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak kegiatan pembangunan yang dilakukan suatu negara atau daerah. IPM mengukur pencapaian pembangunan dari suatu daerah/wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu kesehatan, pengetahuan/tingkat pendidikan dan standar hidup layak.

Dimensi kesehatan diukur dengan menggunakan indikator Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu perkiraan kemampuan rata-rata banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang untuk hidup terhitung sejak dilahirkan. Dimensi Pengetahuan diukur dengan menggunakan indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) yang didefinisikan sebagai rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas menjalani pendidikan formal dan Harapan Lama Sekolah (HLS) yang didefinisikan sebagai lamanya (tahun) formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu pada masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk usia 7 tahun ke atas. Sedangkan Dimensi Standar Hidup Layak diukur menggunakan indikator Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita untuk tingkat nasional dan untuk daerah menggunakan indikator pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

IPM memiliki banyak manfaat dalam pembangunan, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasinya. IPM dapat digunakan sebagai salah satu dasar penentu fokus perencanaan kebijakan pembangunan. Dengan memperhatikan perkembangan IPM melalui indikator penyusunnya, maka pemerintah dapat menilai efektivitas kebijakan yang telah dilaksanakan selama ini. Bagi Pemerintah Pusat, IPM juga menjadi salah satu faktor pertimbangan dalam alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) ke Daerah.

Pemerintah Kota Pangkal Pinang memberikan perhatian serius dalam isu pembangunan manusia ini. Keseriusan ini ditunjukkan dengan ditetapkannya IPM sebagai salah satu indikator tujuan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah maupun tahunan Kota Pangkal Pinang. Dari visi dan misi serta prioritas tahap IV

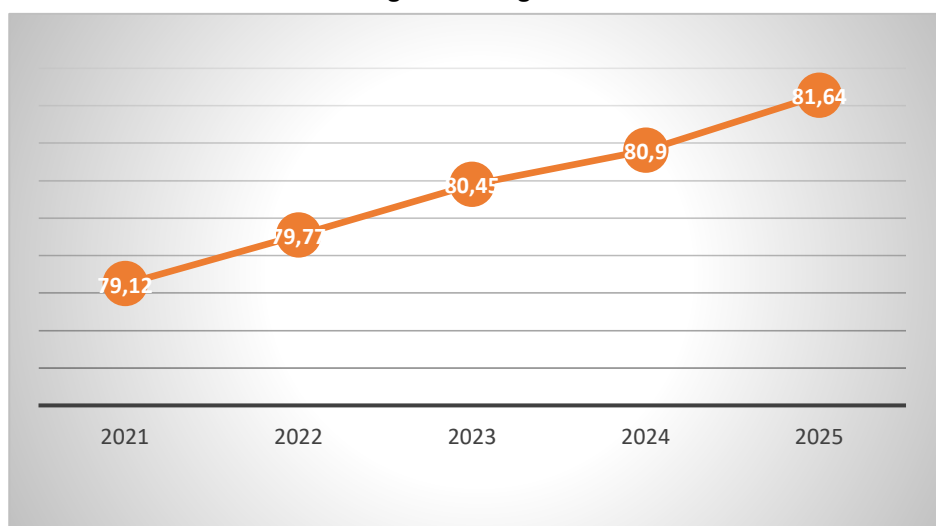
RPJPD Kota Pangkal Pinang Tahun 2007-2026, maka dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 prioritas bidang Ekonomi dan Lingkungan pada Tujuan 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat yang Berdaya Saing, ditetapkan salah satu indikator tujuannya adalah IPM. Dan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025, juga ditetapkan bahwa IPM menjadi salah satu indikator tujuan.

Nilai IPM berkisar antara 0 sampai 100. Semakin besar nilai IPM menunjukkan kualitas pembangunan manusia yang semakin baik. Nilai IPM dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori, yaitu :

- kategori “**rendah**” dengan kriteria nilai $IPM \leq 60$
- kategori “**sedang**” dengan kriteria $60 \leq \text{Nilai IPM} < 70$
- kategori “**tinggi**” dengan kriteria nilai $70 \leq \text{Nilai IPM} < 80$
- kategori “**sangat tinggi**” dengan kriteria Nilai $IPM \geq 80$

Nilai IPM Kota Pangkal Pinang tahun 2025 adalah 81,94 meningkat 0,74 poin dibanding tahun sebelumnya dengan nilai 80,90 dengan kategori nilai IPM **sangat tinggi**. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkal Pinang menempati posisi tertinggi dari seluruh kabupaten/kota yang ada. IPM Kota Pangkal Pinang terus meningkat tiap tahun. Laju pertumbuhan IPM Kota Pangkal Pinang tahun 2025 adalah 0,91 persen. Berikut adalah perkembangan IPM Kota Pangkal Pinang selama lima tahun terakhir.

Gambar II.1
IPM Kota Pangkal Pinang Tahun 2021-2025



Sumber data : Indeks Pembangunan Manusia Kota Pangkal Pinang Tahun 2025, BPS

Sedangkan perkembangan komponen pembentuk IPM Kota Pangkal Pinang periode 2021-2025 adalah sebagai berikut.

Tabel II.2
Perkembangan Komponen Pembentuk IPM Kota Pangkal Pinang Tahun 2021-2025

No	Komponen	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Umur Harapan Hidup (tahun)	74,53	74,76	75,01	75,26	75,64
2	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,16	13,17	13,19	13,30	13,50
3	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	10,13	10,27	10,50	10,67	10,90
4	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah/orang/tahun)	15.716	16.307	16.734	16.750	16.856

Sumber data : Indeks Pembangunan Manusia Kota Pangkal Pinang Tahun 2025, BPS

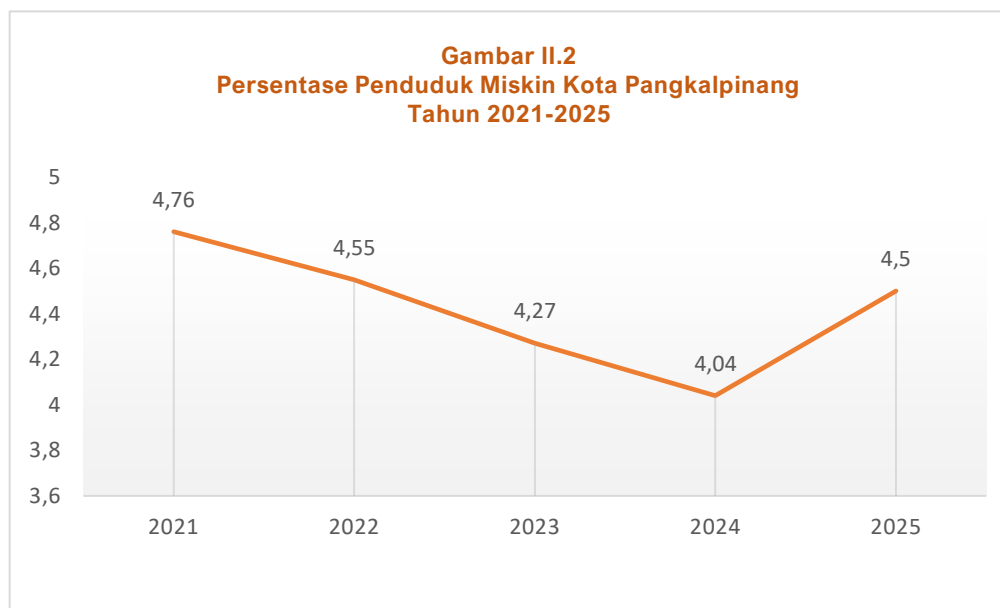
2.1.2. Persentase Penduduk Miskin

Capaian pembangunan ekonomi dari sisi manusia tidak hanya bisa dilihat dari pendapatan ataupun dari peningkatan produksi barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah. Angka kemiskinan juga menjadi indikator penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat yang bisa menggambarkan capaian pembangunan yang terjadi di suatu daerah. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Banyaknya kemiskinan secara umum, menandakan lemahnya perekonomian dari suatu wilayah.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan terdiri atas dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan. Garis Kemiskinan Makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang dihadapi oleh sebagian besar masyarakat, tidak terlepas juga Kota Pangkal Pinang. Pemerintah Kota Pangkal Pinang terus berusaha mengurangi jumlah penduduk miskin di Kota Pangkal Pinang dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan selama periode 2021-2025 cenderung fluktuatif. Sesuai penghitungan BPS Kota Pangkal Pinang, jumlah penduduk miskin Kota Pangkal Pinang pada tahun 2025 adalah sebanyak 9.990 jiwa, meningkat

sebanyak 1.030 jiwa dari tahun sebelumnya. Berikut adalah persentase penduduk miskin di Kota Pangkal Pinang periode 2021-2025.



Sumber data : Kota Pangkal Pinang Dalam Angka tahun 2025, BPS

Dibandingkan dengan daerah lain yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, jumlah penduduk miskin yang ada di kota Pangkal Pinang tahun 2025 berada pada posisi keempat setelah kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Belitung. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pangkal Pinang guna menurunkan angka kemiskinan di Kota Pangkal Pinang, diantaranya sebagai berikut :

- a. penyaluran bantuan baik itu yang bersumber dari APBD maupun APBN kepada masyarakat miskin;
- b. pemberian bantuan iuran jaminan sosial kesehatan yang bagi masyarakat yang kurang mampu di Kota Pangkal Pinang, sehingga akses terhadap layanan kesehatan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Pangkal Pinang;
- c. pemberian bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi nelayan di Kota Pangkal Pinang;
- d. pemberian bantuan keterampilan bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan kompetensi dan daya saing;
- e. pemberian bantuan permakanan, sandang, alat bantu bagi warga disabilitas terlantar, lansia terlantar di Kota Pangkal Pinang; dan
- f. rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat kurang mampu.

2.1.3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Semakin tinggi tingkat pengangguran di suatu wilayah, maka semakin sempit kesempatan kerja di wilayah tersebut. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Pangkal Pinang tahun 2025 sebesar 67,10 persen artinya sebesar 67 persen penduduk usia kerja aktif secara ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa dari 1000 penduduk yang termasuk Angkatan kerja, secara rata-rata terdapat 60 orang diantaranya pencari kerja. Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka untuk Kota Pangkal Pinang di tahun 2025 adalah sebesar 5,73 persen, menurun 0,25 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 5,98 persen.

Dalam tabel di bawah ini, disajikan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Pangkal Pinang selama tahun 2021-2025

Tabel II.3
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kota Pangkal Pinang Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,81	5,90	5,76	5,98	5,73
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	65,16	65,78	66,55	66,99	67,10

Sumber data : Kota Pangkal Pinang Dalam Angka Tahun 2025, BPS

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pangkal Pinang dalam mengurangi angka pengangguran adalah:

a. *Job Fair*

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pangkal Pinang pada 23-24 Juli 2025 bertempat di halaman DPMPSTP Kota Pangkal Pinang. Dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat sebanyak sembilan ratus empat lowongan yang tersedia dari lima puluh satu posisi/jabatan. Perusahaan yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut sebanyak tujuh belas perusahaan yang terdiri dari : Papa Grup Indonesia, PT Mitra Lintas Multi Media, PT Karunia Adi Sentosa, PT Andromeda Graha, PT Citra Karya Sejati, PT Bank BTPN Syariah, PT Sumber Alfari Trijaya (Alfamart), PT Andalan Mitra Prestasi, CV Sumber Jadi, PT Permodalan Nasional Madani, PT Skinah Pyramida, PT Indomarco Pristama, PT Annur Jaya, PT Pangkal Pinang Distribusindo, PT Bangka jaya Line, RSU Mitra Medika dan Klinik Salam Sarma. Dari total lowongan yang dibuka, terdapat juga

lowongan yang disediakan untuk pencari kerja difabel sebanyak 2 lowongan, yang dibuka oleh PT Indomarco Pristama dan PT Alfari Trijaya (Alfamart). Karena banyaknya peminat dan guna mengakomodir para pencari kerja yang tidak bisa hadir langsung ke lokasi acara maka kegiatan ini diperpanjang secara daring sampai dengan 31 Juli 2025.

b. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja

Upaya ini dilaksanakan melalui dua kegiatan, yaitu:

- Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerjadengan bidang pelatihan teknik sepeda motor, menjahit, tata rias pengantin, tata boga dan desain grafis. Kegiatan ini diikuti oleh 45 (empat puluh lima) peserta hasil seleksi dari 200 orang pendaftar.
- Sertifikasi kompetensi perawat AC Residential yang merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Kota Pangkal Pinang dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Belitung.

2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi

Guna mengetahui perkembangan perekonomian suatu daerah salah satu cara yang dapat digunakan adalah produk domestik regional bruto (PDRB). Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, maka akan semakin tinggi juga PDRB nya. Dalam menghitung nilai PDRB, digunakan dua pendekatan yaitu produksi dan pengeluaran. PDRB pendekatan produksi dihitung dengan menjumlahkan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh pelaku ekonomi dalam wilayah tertentu, sedangkan PDRB pengeluaran dihitung dengan menjumlahkan semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori dan ekspor netto (dikurangi impor).

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kota Pangkal Pinang di tahun 2025 mengalami perkembangan positif dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari sebesar 18.941,69 miliar rupiah di tahun 2024 menjadi 20.361,62 miliar rupiah di tahun 2025. Demikian juga halnya dengan PDRB Atas Harga Konstan (ADHK), dari 10.503,91 miliar rupiah di tahun 2024 menjadi 10.980,90 miliar rupiah di tahun 2025. Dalam tabel berikut disajikan perkembangan PDRB di Kota Pangkal Tahun 2021-2025.

Tabel II.4
Perkembangan PDRB ADHK Tahun 2010 dan PDRB ADHB Kota Pangkal Pinang Tahun 2021-2025
(dalam miliar rupiah)

Keterangan	Capaian				
	2021	2022	2023*	2024**	2025***
PDRB ADHK	9.611,44	10.208,03	10.750,81	10.503,91	10.980,90
PDRB ADHB	15.375,99	17.277,43	18.838,53	18.941,69	20.361,26

Sumber : BPS Kota Pangkal Pinang

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Pangkal Pinang selama lima tahun terakhir menunjukkan tren positif sebagai mana diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel II.5
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
Kota Pangkal Pinang Tahun 2021-2025

Lapangan Usaha		2021	2022	2023*	2024**	2025***
A	Pertanian, kehutanan dan perikanan	448,68	446,04	453,16	467,59	486,70
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	-	-	-
C	Industri Pengolahan	1.790,38	1.957,13	1.978,07	1.379,37	1.518,90
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,36	8,03	8,32	8,63	8,98
E	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	2,63	2,74	2,75	2,86	2,93
F	Konstruksi	1.048,29	1.027,26	1.122,12	1.120,03	1.085,30
G	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	2.635,79	2.587,25	2.626, 60	2.656,39	2.729,16
H	Transportasi dan pergudangan	569,53	630,81	675,50	706,62	768,84
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	344,74	383,20	424,42	442,08	484,84
J	Informasi dan komunikasi	548,68	608,54	699,61	773,22	844,15
K	Jasa keuangan dan asuransi	425,51	443,56	498,27	504,90	510,60
L	Real estate	521,64	551,82	577,64	603,24	626,76
M,N	Jasa perusahaan	36,98	40,79	44,51	47,99	51,35
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	636,66	627,05	655,34	723,43	722,11
P	Jasa pendidikan	461,90	472,85	522,62	581,17	618,24
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	221,97	226,44	245,52	250,50	264,50
R,S,T,U	Jasa lainnya	179,69	194,54	216,36	235,89	257,54
Produk Domestik Regional Bruto		9.611,44	10.208,03	10.750,81	10.503,91	10.980,90

Sumber data : BPS Kota Pangkal Pinang

Sedangkan perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Belrkau Kota Pangkal Pinang periode 2021-2025 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel II.6
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Kota Pangkal Pinang Tahun 2021-2025

Lapangan Usaha		2021	2022	2023*	2024**	2025***
A	Pertanian, kehutanan dan perikanan	816,10	847,80	900,18	938,30	1.008,34
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	-	-	-
C	Industri Pengolahan	2.633,32	3.165,41	3.295,05	2.545,59	2.899,26
D	Pengadaan Listrik dan Gas	14,78	14,44	15,05	15,56	16,79
E	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	4,81	5,11	5,30	5,88	6,27
F	Konstruksi	1.763,24	1.830,86	2.065,33	2.099,52	2.065,51
G	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	3.782,11	4.4448,93	4.763,99	4.884,28	5.348,15
H	Transportasi dan pergudangan	954,20	1.125,99	1.321,84	1.421,84	1.581,13
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	641,21	742,95	829,66	890,39	994,31
J	Informasi dan komunikasi	609,81	683,90	795,63	883,26	952,01
K	Jasa keuangan dan asuransi	683,49	770,99	881,32	898,06	918,83
L	Real estate	841,82	919,58	985,68	1.056,03	1.107,24
M,N	Jasa perusahaan	72,23	83,73	94,95	102,30	110,96
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	1.048,50	1.042,22	1.090,46	1.204,62	1.199,37
P	Jasa pendidikan	863,37	897,81	1.088,79	1.143,69	1.225,38
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	340,80	353,98	390,84	404,66	431,36
R,S,T,U	Jasa lainnya	306,20	343,72	397,45	447,71	496,35
Produk Domestik Regional Bruto		15.375,99	17.277,53	18.838,53	18.941,69	20.361,26

Sumber data : BPS Kota Pangkal Pinang

Dari sisi laju pertumbuhan, perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kota Pangkal Pinang Tahun 2021 s.d Tahun 2025 secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel II.7
Laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
Kota Pangkal Pinang Tahun 2021-2025

Lapangan Usaha		2021	2022	2023 [*]	2024 ^{**}	2025 ^{***}
A	Pertanian, kehutanan dan perikanan	2,90	-0,59	1,60	3,18	4,09
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	29,40	9,35	1,07	-30,27	10,11
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,43	-3,84	3,59	3,72	4,01
E	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	1,69	4,24	0,32	3,93	2,60
F	Konstruksi	4,16	-2,01	9,23	-0,19	-3,10
G	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	4,68	9,36	1,52	1,13	2,74
H	Transportasi dan pergudangan	9,02	10,76	7,09	4,61	8,81
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	10,40	11,16	10,76	4,16	9,67
J	Informasi dan komunikasi	9,04	10,91	14,97	10,52	9,17
K	Jasa keuangan dan asuransi	4,19	4,24	12,34	1,33	1,13
L	Real estate	6,38	5,78	4,68	4,43	3,90
M,N	Jasa perusahaan	6,17	10,31	9,10	7,82	7,00
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	4,40	-1,51	4,51	10,39	-0,18
P	Jasa pendidikan	2,20	2,37	10,53	11,20	6,38
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	15,00	2,02	8,42	2,03	5,59
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,25	8,25	11,23	9,02	9,18
Produk Domestik Regional Bruto		9,26	6,21	5,32	-2,30	4,54

Sumber data : BPS Kota Pangkal Pinang

2.1.5. PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi merupakan pendapatan domestik. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian dari faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi di suatu daerah berasal dari daerah lain atau dari luar negeri, demikian juga sebaliknya faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk daerah tersebut ikut serta dalam proses produksi di daerah lain atau di luar negeri. Hal ini menyebabkan nilai produk domestik yang timbul di suatu daerah tidak sama dengan pendapatan yang diterima penduduk daerah tersebut. Bila pendapatan regional ini dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu pendapatan perkapita yang biasanya digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah secara umum.

Berdasarkan data yang tersedia dari Badan Pusat Statistik Kota Pangkal Pinang, PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kota Pangkal Pinang tahun 2025 adalah sebesar 87.123 ribu rupiah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 82.198 ribu rupiah.

Menurut perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perkembangan PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut.

Tabel II.8
Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (ribu rupiah)
Tahun 2021 - 2025

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024*	2025**
Bangka	32.578	33.725	34,781	34.212	35.493
Belitung	36.304	37.924	39.637	39.910	41.066
Bangka Barat	49,952	50.220	50.761	52.804	52.993
Bangka Tengah	29.752	31.080	32.195	31.620	33.063
Bangka Selatan	31.331	31.851	32.581	32.453	33.277
Belitung Timur	44.608	45.727	47.302	46.733	48.186
Pangkal Pinang	43.504	45.538	47.290	45.582	47.034

Sumber data : BPS Prov Kep. Bangka Belitung

Sedangkan laju perkembangan PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2022-2025 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel II.9
Laju Perkembangan PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (persen) Tahun 2022-2025

Kabupaten/Kota	2022	2023	2024	2025
Bangka	3,52	3,13	-1,63	3,74
Belitung	4,46	4,52	0,69	2,90
Bangka Barat	0,54	1,08	4,02	0,36
Bangka Tengah	4,47	3,59	-1,79	4,56
Bangka Selatan	1,66	2,29	-0,39	2,54
Belitung Timur	2,51	3,44	-1,20	3,11
Pangkal Pinang	4,68	3,85	-3,61	3,19

Sumber data : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2.1.6. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Rasio gini atau koefisien gini sebagai indikator ketimpangan pendapatan adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan diantara populasi. Indeks gini memiliki kisaran nilai 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama. Sedangkan nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang atau tidak sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya sementara orang lain tidak memiliki apa-apa.

Sesuai dengan ketersediaan data, ketimpangan pengeluaran penduduk tahun 2025 sebesar 0,249 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 0,292. Hal ini menunjukkan adanya pengurangan ketimpangan pengeluaran antara penduduk yang tergolong mampu dan kekurangan dikarenakan adanya peningkatan daya beli masyarakat Kota Pangkal Pinang.

2.2. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Untuk Urusan Pemerintahan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
WAJIB BERKAITAN DENGAN LAYANAN DASAR					
1	PENDIDIKAN	1.a.1. Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	$\frac{6.553}{9.586} \times 100\% = 68,36\%$	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	
		1.a.2. Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	$\frac{39.816}{41.869} \times 100\% = 95,10\%$	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	
		1.a.3. Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	$\frac{1.684}{1.905} \times 100\% = 88,40\%$	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	
		1.a.4. Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	$\frac{444}{751} \times 100\% = 59,12\%$	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	
		1.a.5. Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	$\frac{712}{1.323} \times 100\% = 53,82\%$	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	
2	KESEHATAN	1.b.1. Persentase kematian ibu	$\frac{1}{3.276} \times 100\% = 0,03\%$	Dinas Kesehatan	
		1.b.2. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	$\frac{211}{14.006} \times 100\% = 1,51\%$	Dinas Kesehatan	
		1.b.3. Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	$\frac{3.296}{3.305} \times 100\% = 99,73\%$	Dinas Kesehatan	
		1.b.4. Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	$\frac{3.276}{3.305} \times 100\% = 99,12\%$	Dinas Kesehatan	
		1.b.5. Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	$\frac{3.168}{3.191} \times 100\% = 99,28\%$	Dinas Kesehatan	
		1.b.6. Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	$\frac{13.112}{13.124} \times 100\% = 99,91$	Dinas Kesehatan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		1.b.7. Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	$\frac{39.823}{39.823} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kesehatan	
		1.b.8. Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	$\frac{154.836}{154.836} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kesehatan	
		1.b.9. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{24.697}{24.723} \times 100\% = 99,89\%$	Dinas Kesehatan	
		1.b.10. Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	$\frac{19.003}{19.003} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kesehatan	
		1.b.11. Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	$\frac{5.063}{5.063} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kesehatan	
		1.b.12. Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	$\frac{448}{448} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kesehatan	
		1.b.13. Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	$\frac{4.399}{4.399} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kesehatan	
		1.b.14. Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	$\frac{6.050}{6.050} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kesehatan	
3	PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG	1.c.1. Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	-	Dinas PUPR	Tidak terdapat kawasan pertanian jaringan irigasi di kota Pangkal Pinang
		1.c.2. Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota	$\frac{377.101}{403.137} \times 100\% = 93,54\%$	Dinas PUPR	
		1.c.3. Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	$\frac{242.783}{247.419} \times 100\% = 98,13\%$	Dinas PUPR	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		1.c.4. Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	$\frac{55.417}{55.567} \times 100\% = 99,73\%$	Dinas PUPR	
		1.c.5. Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	$\frac{193.925}{417.6} \times 100\% = 46.44\%$	Dinas PUPR	
		1.c.6. Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	$\frac{0.3328}{84.809} \times 100\% = 0.39\%$	Dinas PUPR	
		1.c.7. Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	$\frac{829}{829} \times 100\% 100\%$	Dinas PUPR	
		1.c.8. Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	-	Dinas PUPR	Selama tahun 2025, tidak terdapat PBG untuk masyarakat berpenghasilan rendah
		1.c.9. Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	$\frac{57}{927} \times 100\% = 6,15\%$	Dinas PUPR	
		1.c.10. Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	-	Dinas PUPR	Selama tahun 2025, tidak dilaksanakan penilaian kesesuaian tata ruang yang diterbitkan sehingga tidak bisa diukur tingkat kesesuaiannya
4	PERUMAHAN RAKYAT	1.d.1. Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	-	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	Tidak terdapat penetapan Wali Kota terhadap kejadian bencana pada tahun 2025 di Kota Pangkal Pinang
		1.d.2. Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	0	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	Pada tahun 2025 tidak terdapat kegiatan penanganan penangan infrastruktur kawasan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
					kumuh di Kota Pangkal Pinang
		1.d.3. Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	$\frac{61}{2.988} \times 100\% = 2,03\%$	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	
		1.d.4. Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	$\frac{1}{42} \times 100\% = 2,38\%$	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	
5	TRANTIBUMLINMAS	5.a.1. Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	$\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$	BPBD	
		5.a.2. Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praj	$\frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$	Satpol PP	
		5.a.3. Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	$\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$	Satpol PP	
		5.a.4. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	$\frac{3}{3} \times 100\% = 0,02\%$	BPBD	
		5.a.5. Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	$\frac{295}{295} \times 100\% = 100\%$	BPBD	
		5.a.6. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	$\frac{65}{65} \times 100\% = 100\%$	Satpol PP	
6	SOSIAL	6.a.1. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	$\frac{40}{40} \times 100\% = 100\%$	Dinas Sosial	
		6.a.2. Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	$\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$	Dinas Sosial	
		6.a.3. Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	$\frac{50}{50} \times 100\% = 100\%$	Dinas Sosial	
		6.a.4. Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	$\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$	Dinas Sosial	
		6.a.5. Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	$\frac{185}{185} \times 100\% = 100\%$	Dinas Sosial	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		6.a.6. Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	$\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$	Dinas Sosial	
WAJIB TIDAK BERAKITAN DENGAN LAYANAN DASAR					
1	KETENAGAKERJAAN	2.a.1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	0	Dinas Tenaga Kerja	Dokumen RTKD masih dalam proses penyusunan
		2.a.2. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan).	$\frac{277}{404} \times 100\% = 68,56\%$	Dinas Tenaga Kerja	
		2.a.3. Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	$\frac{531}{531} \times 100\% = 100\%$	Dinas Tenaga Kerja	
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK	2.b.1. Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	$\frac{34}{34} \times 100\% = 100\%$	DPPPAKB	
		2.b.2. Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensi	$\frac{29}{29} \times 100\% = 100\%$	DPPPAKB	
3	PANGAN	c. Persentase jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	$\frac{18.28001}{16,16} \times 100\% = 113,12\%$	Dinas Pangan & Pertanian	
4	PERTANAHAN	2.d.1. Persentase Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	$\frac{337.248}{337.248} \times 100\% = 100\%$	Dinas PUPR	Selama tahun 2025, tidak dilaksanakan penilaian kesesuaian tata ruang yang diterbitkan sehingga tidak bisa diukur tingkat kesesuaiannya
		2.d.2. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	0	Dinas PUPR	Selama tahun 2025, tidak dilaksanakan penilaian kesesuaian tata ruang yang diterbitkan sehingga

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
					tidak bisa diukur tingkat kesesuaiannya
		2.d.3. Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang sudah dilegalkan	0	Dinas PUPR	
5	LINGKUNGAN HIDUP	2.e.1. Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	$\frac{25}{45} \times 100\% = 55,56\%$	DLH	
		2.e.2. Persentase jumlah sampah yang tertangan	$\frac{40.723,41}{41.187,17} \times 100\% = 98,87\%$	DLH	
6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL	2.f.1. Persentase akta kelahiran yang diterbitkan	$\frac{75.882}{76.550} \times 100\% = 99,13\%$	Dinas Dukcapil	
		2.f.2. Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	$\frac{57.431}{72.215} \times 100\% = 79,53\%$	Dinas Dukcapil	
		2.f.3. Persentase data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	$\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$	Dinas Dukcapil	
		2.f.4. Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	$\frac{173.124}{175.205} \times 100\% = 98,81\%$	Dinas Dukcapil	
		2.f.5. Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	$\frac{12.271}{12.271} \times 100\% = 100\%$	Dinas Dukcapil	
		2.f.6. Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	$\frac{100.758}{100.758} \times 100\% = 100\%$	Dinas Dukcapil	
		2.f.7. Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	$\frac{478}{478} \times 100\% = 100\%$	Dinas Dukcapil	
7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA	2.g.1. Persentase pengentasan desa tertinggal	0	DPPPAKB	Tidak terdapat desa di Kota Pangkal Pinang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		2.g.2. Persentase peningkatan status desa mandiri	0	DPPPAKB	Tidak terdapat desa di Kota Pangkal Pinang
		2.g.3. Persentase fasilitasi kerja sama desa	0	DPPPAKB	Tidak terdapat desa di Kota Pangkal Pinang
8	PENGENDALIAN PENDUDUK & KB	2.h.1. Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur usia 15-49 Tahun	$\frac{2,18}{2} \times 100\% = 109\%$	DPPPAKB	
		2.h.2. Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	$\frac{17.343}{28.667} \times 100\% = 60,50\%$	DPPPAKB	
		2.h.3. Persentase kebutuhan ber- Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need)	$\frac{16,4}{7,58} \times 100\% = 216,36\%$	DPPPAKB	
9	PERHUBUNGAN	2.i.1. Konektivitas Kabupaten/Kota	0.88	Dinas Perhubungan	
		2.i.2. Volume/Capacity Ratio di Jalan Kabupaten/Kot	0.35	Dinas Perhubungan	
		2.i.3. Persentase Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	0	Dinas Perhubungan	Tidak terdapat perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan
10	KOMUNIKASI INFORMATIKA &	2.j.1. Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	$\frac{32}{34} \times 100\% = 94,12\%$	Dinas Kominfo	
		2.j.2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	$\frac{35}{35} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kominfo	
		2.j.3. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	$\frac{163.459}{163.459} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kominfo	
11	KOPERASI & UMKM	2.k.1. Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	$\frac{(10.832.529.583 - 12.143.382.227)}{12.143.382.227} \times 100\% = -10,79\%$	Dinas Koperasi, UMKM & Perdagangan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		2.k.2. Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	$\frac{25.969}{25.969} \times 100\% = 100\%$	Dinas Koperasi, UMKM & Perdagangan	
12	PENANAMAN MODAL	2.l.1. Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	$\frac{(2.621.765.698.866 - 4.943.282.723.215)}{4.943.282.723.215} \times 100\%$	DPMPTSP	
		2.l.2. Realisasi total terhadap target investasi	$\frac{2.621.765.698.866}{3.425.686.152.593} \times 100\% = 76,53\%$	DPMPTSP	
13	KEPEMUDAAN & OLAH RAGA	2.m.1. Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	$\frac{408}{408} \times 100\% = 100\%$	Dinas Pemuda & OR	
		2.m.2. Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	$\frac{396}{58.135} \times 100\% = 0,68$	Dinas Pemuda & OR	
		2.m.3. Persentase atlet yang berasal dari kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	$\frac{11}{1.120} \times 100\% = 0,98\%$	Dinas Pemuda & OR	
		2.m.4. Persentase jumlah atlet berprestasi	$\frac{61}{61} \times 100\% = 100\%$	Dinas Pemuda & OR	
14	STATISTIK	2.n.1. Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	$\frac{561}{561} \times 100\% = 100\%$	Diskominfo	
15	PERSANDIAN	2.o.1. Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah	$\frac{389}{918} \times 100\% = 42,37$	Diskominfo	
16	KEBUDAYAAN	2.p.1. Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan	$\frac{45}{46} \times 100\% = 97,83\%$	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	
		2.p.2. Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah	$\frac{41.199}{53.289} \times 100\% = -22,69$	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	
17	PERPUSTAKAAN	2.q.1. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat	56,66	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	
		2.q.2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	15,60	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	
18	KEARSIPAN	2.r.1. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	77,89%	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
URUSAN PILIHAN					
1	KELAUTAN & PERIKANAN	3.a.1. Angka konsumsi ikan (Kg/Kap/Th)	41,95 kg/kap/tahun	Dinas Kelautan & Perikanan	
		3.a.2. Produksi perikanan tangkap dan budidaya	$\frac{2.204,28}{2.499,33} \times 100\% = 88,19\%$	Dinas Kelautan & Perikanan	
2	PARIWISATA	3.b.1. Persentase investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum	$\frac{60.087.489.347}{2.621.765.609.866} \times 100\% = 2,29\%$	- Dinas pariwisata - DPMPTSP	
		3.b.2. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	$\frac{(622 - 163)}{163} \times 100\% = 281,60\%$	Dinas Pariwisata	
		3.b.3. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	$\frac{(217.548 - 196.860)}{196.860} \times 100\% = 10,51\%$	Dinas Pariwisata	
3	PERTANIAN	3.c.1. Peningkatan produksi tanaman pangan	$\frac{109,63 - 104,80}{104,80} \times 100\% = 4,61\%$	Dinas Pangan & Pertanian	
		3.c.2. Peningkatan produksi hortikultura	$\frac{2.206,2 - 1.830,86}{1.830,86} \times 100\% = 20,50\%$	Dinas Pangan & Pertanian	
		3.c.3. Peningkatan produksi komoditas peternakan	$\frac{5.177.712 - 5.406.468}{5.406.468} \times 100\% = -4,23\%$	Dinas Pangan & Pertanian	
		3.c.4. Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))	$\frac{178,8}{178,8} \times 100\% = 100\%$	Dinas Pangan & Pertanian	
4	PERDAGANGAN	3.f. Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	$\frac{2.906}{3.156} \times 100\% = 92,08\%$	Diskopdag & UMKM	
5	PERINDUSTRIAN	3.g.1. Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto	34,45%	Diskopdag & UMKM	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		Kabupaten/Kota; 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota			
		3.g.2. Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional	$\frac{25}{5.915} \times 100\% = 0,42\%$	Diskopdag & UMKM	
		3.g.3. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	$\frac{5.915}{5.092} \times 100\% = 16,16\%$	Diskopdag & UMKM	
		3.g.4. Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	$\frac{73.021.959.101}{2.621.765.609.866} \times 100\% = 2,79\%$	Diskopdag & UMKM	

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

NO	FUNGSI PENUNJANG	IKK	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	PERENCANAAN	4.a.1. Persentase kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	$\frac{17}{17} \times 100\% = 100\%$	Bapperida	
2	KEUANGAN	4.b.1. Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya	$\frac{419.951.117.361,82}{1.050.068.184.753,9} \times 100\% = 39,99\%$	Badan Keuangan Daerah	
		4.b.2. Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	$\frac{258.322.452.782,21}{930.148.552.085,21} \times 100\% = 27,77\%$	Badan Keuangan Daerah	
		4.b.3. Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	$\frac{536.893.426.543,41}{920.076.387.893,41} \times 100\% = 58,35\%$	Badan Keuangan Daerah	
		4.b.4. Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	$\frac{32.116.099.218}{1.049.768.184.753,9} \times 100\% = 3,06\%$	Badan Keuangan Daerah	
3	KELEMBAGAAN, KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	4.c. Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{1.311}{1.599} \times 100\% = 81,99\%$	BKPSDMD	
4	PENELITIAN & PENGEMBANGAN	4.d. Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	$\frac{11}{11} \times 100\% = 100\%$	Bapperida	
5	PENGAWASAN	4.e.1. Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai : 2	Inspektorat	
		4.e.2. Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)	Nilai : 3	Inspektorat	
		4.e.3. Manajemen Risiko Indeks	Nilai : 2	Inspektorat	

NO	FUNGSI PENUNJANG	IKK	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		4.e.4. Persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran N-1	$\frac{1.531}{1.729} \times 100\% = 88,55\%$	Inspektorat	
5	PENGADAAN	4.f.1. Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Nilai : 40	Bagian PBJ, Setdako	
		4.f.2. Pemanfaatan sistem pengadaan	Nilai : 26,18	Bagian PBJ, Setdako	
		4.f.3. Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	Nilai : 26,25	Bagian PBJ, Setdako	
6	HUBUNGAN DENGAN PERWAKILAN DAERAH	4.g.1. Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	Tepat Waktu	Bagian Hukum, Setdako	
		4.g.2. Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N	$\frac{5}{19} \times 100\% = 26,32\%$	Bagian Hukum, Setdako	
7	PELAYANAN PUBLIK	4.h. Penilaian mal administrasi penyelenggaraan pelayanan publik	45,04	Bagian Organisasi, Setdako	

2.2.3.Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pangkal Pinang disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik tentang keberhasilan atau kegagalan dalam mewujudkan perjanjian kinerja tahun berjalan, dalam rangka mencapai tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

Dalam laporan ini, Pemerintah Kota Pangkal Pinang memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian kinerja dari masing-masing kelompok sasaran dan penilaian tingkat pencapaian targer sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPD 2024-2026 maupun RKPD 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pencapaian kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sasaran dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Pangkal Pinang. Pengukuran pencapaian kinerja pada tahun 2025 didasarkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja pada tahun 2025 dengan 12 sasaran dan 15 indikator sasaran kinerja utama.

Untuk mempermudah intepretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran dengan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut.

Tabel II.10
Pengkategorian Capain Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kategori Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Tahun 2025 adalah tahun kedua dari masa transisi yang dituangkan dalam RPD 2024-2026. Secara keseluruhan kinerja Pemerintah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 dinyatakan “berhasil”, dari 15 Indikator yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja; 11 indikator berhasil dicapai dengan kategori SANGAT TINGGI, 3 indikator berhasil dicapai dengan kategori TINGGI, dan 1 indikator belum berhasil dengan kategori RENDAH.

TUJUAN I :**MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BAIK MENUJU TERCAPAINYA GOOD GOVERNANCE****Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah****Indikator : Nilai SAKIP**

Sasaran strategis pertama yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah diukur melalui indikator kinerja yaitu Nilai SAKIP. Adapun indikator kinerja Nilai SAKIP dikoordinir oleh Bagian Organisasi, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah serta Inspektorat Daerah.

Tabel II.11
Capaian Kinerja Sasaran ke 1
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPD Tahun 2026	Capaian s.d. 2024 terhadap 2026 (%)	Capaian s.d. 2025 terhadap 2026 (%)
Nilai SAKIP	Nilai	2024	63,35	64,22	101,37	65	98,80	-
		2025	64,75	64,53	99,66		-	99,28

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Pangkal Pinang

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur implementasi manajemen kinerja yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pangkal Pinang berdasarkan penilaian dari Kementerian PANRB. Melalui penilaian SAKIP dapat diketahui tingkat akuntabilitas terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil (*result oriented goverment*).

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2024	2025
1	Perencanaan Kinerja	30	23,09	23,18
2	Pengukuran Kinerja	30	18,12	18,21
3	Pelaporan Kinerja	15	10,32	10,37
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	12,69	12,77
Nilai Hasil Evaluasi		100	64,22	64,53

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2024	2025
	Kategori Akuntabilitas Kinerja		B	B

Sejak tahun 2022, penilaian akuntabilitas kinerja sesuai dengan PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana komponen capaian kinerja tidak menjadi komponen penilaian SAKIP. Realisasi Nilai SAKIP Tahun 2025 yaitu 64,53 dengan capaian kinerja sebesar 99,66. Capaian tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yakni sebesar 101,37 %. Namun demikian realisasi kinerja tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 0,31 point dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2024. Nilai seluruh komponen penilaian mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan.

Faktor Penghambat dalam implementasi SAKIP di Kota Pangkal Pinang antara lain:

1. Kurangnya komitmen pimpinan dan pegawai dalam mengedepankan akuntabilitas dari sisi kinerja sehingga akuntabilitas kinerja belum mendapat perhatian yang besar;
2. Belum sepenuhnya penetapan sanksi yang tegas bagi Perangkat Daerah yang tidak menerapkan akuntabilitas kinerja;
3. Belum sepenuhnya penetapan sanksi yang tegas bagi Perangkat Daerah yang tidak menerapkan akuntabilitas kinerja;
4. Laporan kinerja belum dijadikan sebagai perencanaan tahun berikutnya;
5. Masih belum terintegrasinya sistem AKIP dengan sistem perencanaan dan sistem penganggaran sehingga monitoring evaluasi masih kurang efektif;
6. Raport kinerja belum menjadi suatu acuan bagi sebagian Perangkat Daerah dalam memperbaiki kinerjanya dan belum menjadi punishment bagi Perangkat Daerah atas tidak tercapainya kinerja;
7. Penjenjangan kinerja (cascading) belum sepenuhnya mengacu pedoman penjenjangan kinerja sesuai Permen PANRB No 89 Tahun 2021;
8. Keterbatasan anggaran untuk mengadakan bimbingan teknis bagi SDM Perencana untuk menyempurkan atau perbaikan pohon kinerja, penjenjangan kinerja serta menentukan indikator yang memenuhi kriteria SMART; dan
9. Keterbatasan anggaran dalam pembangunan aplikasi e-SAKIP dan e-raport.

Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pangkal Pinang dalam mendorong peningkatan nilai/predikat AKIP Pemerintah Kota Pangkal Pinang Tahun 2026 antara lain sebagai berikut :

1. Menyusun SK Tim Penyusun dan Penyelenggara Tim SAKIP Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 agar akuntabilitas kinerja dapat berjalan dengan efektif;
2. Menjadikan indikator SAKIP sebagai salah satu kegiatan sasaran strategis daerah yang mana seluruh Perangkat Daerah menyusun rencana aksi untuk perbaikan implementasi SAKIP;
3. Tim SAKIP mengadakan rapat koordinasi untuk menyusun strategi peningkatan nilai SAKIP;
4. Bapperida melakukan review renja Perangkat Daerah;
5. Bapperida melakukan rapat asistensi terkait penginputan hasil capaian kinerja dan realisasi anggaran secara triwulan;
6. Memberikan rapot kinerja bagi Perangkat Daerah dalam rangka pengukuran masing-masing capaian indikator Perangkat Daerah;
7. Bagian Organisasi mengadakan rapat koordinasi dan asistensi penyusunan laporan kinerja bagi Perangkat Daerah guna meningkatkan pemahaman terkait dengan sistematika penulisan sesuai dengan aturan;
8. Inspektorat Daerah melakukan evaluasi implementasi SAKIP seluruh Perangkat Daerah; dan
9. Memberikan reward berupa piagam penghargaan kepada Perangkat Daerah yang mendapatkan Predikat SAKIP A.

Strategi Pemerintah Kota Pangkal Pinang dalam meningkatkan Nilai AKIP Kota Pangkal Pinang antara lain:

1. Mendorong komitmen pimpinan dan kepala perangkat daerah dalam penerapan akuntabilitas kinerja;
2. Penguatan Tim SAKIP terkait tugas dan fungsi masing-masing dalam memonitoring implementasi akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
3. Bagian Organisasi melakukan pendampingan/asistensi penyusunan laporan kinerja bagi Perangkat Daerah agar sesuai dengan sistematika PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014;
4. Bapperida melakukan review indikator kinerja bagi Perangkat Daerah;
5. Akan membangun aplikasi e-Raport bagi Perangkat Daerah agar dapat memonitoring dan mengukur capaian kinerja Perangkat Daerah secara *real time*;
6. Meningkatkan peran Inspektorat Daerah dalam mengevaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah seperti mengadakan bimbingan teknis kepada auditor sebagai evaluator; dan

7. Tim APIP/ evaluator memastikan rekomendasi hasil evaluasi AKIP Perangkat Daerah dilakukan perbaikan seperti melakukan pemantauan progress tindak lanjut secara berkala kepada Perangkat Daerah, memberikan konsultasi dan pendampingan selama pelaksanaan tindak lanjut dan menjadikan hasil pelaksanaan tindak lanjut sebagai salah satu objek evaluasi AKIP Perangkat Daerah untuk periode evaluasi selanjutnya.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel II.12
Program dan Kegiatan Sasaran 1 (Nilai SAKIP)

PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN (%)	EFISIENSI (%)
Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	531.951.872	525.097.398	98,71	1,29
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	616.805.176	572.501.293	92,82	7,18
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	815.935.768	769.707.281	94,33	5,67
Program Penyelenggaraan Pengawasan Internal	828.500.000	827.580.000	99,89	0,11
Penataan Organisasi (Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah)	203.100.000	83.841.876	41,28	58,71

Sumber : Bapperida & Bagian Organisasi, 2025

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator : Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Sasaran strategis kedua yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah diukur melalui indikator kinerja yaitu Indek Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Adapun indikator kinerja ini dikoordinir oleh Badan Keuangan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah dan Inspektorat Daerah.

Tabel II.13
Capaian Kinerja Sasaran ke 2
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPD Tahun 2026	Capaian s.d. 2023 terhadap 2026 (%)	Capaian s.d. 2024 terhadap 2026 (%)
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	2024	81,25	77,75	95,69	81,35	93,58	-
		2025	81,30	65,83	80,97		-	80,92

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pangkal Pinang berdasarkan penilaian dari Kementerian Dalam Negeri. Melalui penilaian IPKD untuk menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah. Penilaian IPKD dilakukan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Jika dilihat pada tabel diatas maka realisasi belum sesuai target yang diharapkan, pada tahun 2024 capaian realisasi 95,57 % dan pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 80,92 %. Hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah se Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024, tahun ukur 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel II.14
Nilai IPKD Kabupaten/Kota se-Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

No	Nama Kabupaten/Kota	IPKD	Peringkat	Nilai
1	Kota Pangkal Pinang	65,8313	Cukup Baik	B
2	Kabupaten Bangka	64,6357	Cukup Baik	B
3	Kabupaten Bangka Selatan	63,5805	Cukup Baik	B
4	Kabupaten Bangka Barat	59,6953	Cukup Baik	B
5	Kabupaten Belitung Timur	71,4915	Cukup Baik	B
6	Kabupaten Belitung	70,4597	Cukup Baik	B
7	Kabupaten Bangka Tengah	61,9742	Cukup Baik	B

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berikut rincian penilaian IPKD Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 dan 2025

Tahun	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Total
2024	10,987	19,828	14,224	13,333	4,378	15	77,75
2025	9,0987	7,0139	11,7188	20	8	10	65,8313

Indikator pada masing-masing dimensi adalah sebagai berikut :

Dimensi 1	- Kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD - Kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS - kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD - kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS - kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD
Dimensi 2	- Pengalokasian belanja untuk Pendidikan minimal 20% dari total belanja APBD - Pengalokasian belanja pegawai daerah paling tinggi 30% dari total belanja APBD di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD - Pengalokasian Belanja Infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau Transfer kepada daerah dan/atau desa - Pengalokasian belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Dimensi 3	- Ketepatan Waktu - Keteraksesan
Dimensi 4	- Penyerapan Anggaran Belanja Operasional - Penyerapan Anggaran Belanja Modal - Penyerapan Anggaran Belanja Transfer
Dimensi 5	- Kemandirian Keuangan - Fleksibilitas Keuangan - Solvabilitas Operasional - Solvabilitas Jangka Pendek - Solvabilitas Jangka Panjang
Dimensi 6	- Hasil opini BPK atas LKPD

Upaya untuk meningkatkan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dapat dilakukan dengan:

a. Peningkatan Dimensi & Indikator (Tahun Ukur 2025), yang meliputi :

- Dimensi 1 (Perencanaan): Konsistensi nomenklatur program dan pagu antara perencanaan dan penganggaran;
- Dimensi 2 (Alokasi Belanja): Memastikan belanja pegawai dari APBD (di luar tunjangan guru) dan belanja infrastruktur pelayanan publik;
- Dimensi 3 (Transparansi): Publikasi dokumen keuangan di website resmi Pemda, maksimal < 30 hari setelah ditetapkan;
- Dimensi 4 (Penyerapan): Optimalisasi penyerapan anggaran belanja (target);
- Dimensi 5 (Kondisi Keuangan): Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengurangi ketergantungan transfer pusat; dan
- Dimensi 6 (Opini BPK): Mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

b. Penguatan Teknis dan SDM, yang meliputi :

- Penginputan data tepat waktu dan akurat di sistem BSKDN;
- Bimbingan teknis (Bimtek) untuk meminimalisir kesalahan input; dan
- Kolaborasi intensif antara Bakeuda, Bappeda, dan OPD terkait.

c. Evaluasi Berkala, yang meliputi :

- Melakukan evaluasi berkala terhadap hasil pengukuran IPKD tahun sebelumnya; dan
- Memperkuat kapasitas aparat dalam tata kelola keuangan

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Efisiensi (%)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	40.408.544.721	34.702.747.522	85,88	14,12
II	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	3.512.428.392	1.940.075.743	55,23	44,77
III	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	951.113.744	728.494.444	76,59	23,41
IV	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.334.852.404	4.615.781.278	86,52	13,48

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan 5 indikator yaitu Persentase kesesuaian KUA-PPAS dengan APBD, Persentase akses publik terhadap informasi keuangan daerah, , Persentase Laporan Perbendaharaan yang Akuntabel , Persentase Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel ,dengan lima indikator yaitu Presentase laporan perbendaharaan yang akuntabel, Presentase Laporan Keuangan Daerah Yang Akuntabel . Dan semua indikator program tercapai 100 % dalam pelaksanaannya kecuali Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan yang tidak sesuai target.
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, indikator Manajemen Aset/BMD. Dalam Program ini ditopang oleh kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan indikator kegiatan Presentase terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah, tercapai 100%
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan indikator program Capaian Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah/ tagihan pajak daerah dengan target yang ditetapkan dari 5 % , realisasi sebesar 27,96 %, dengan ditopang kegiatan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan indikator Presentase dokumen Pengelolaan Pajak Daerah yang tepat waktu dengan capaian 100%.

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi
Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks kepuasan masyarakat merupakan salah satu indikator untuk menggambarkan persepsi penerima layanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi layanan publik. Untuk mendapatkan indeks kepuasan masyarakat dilakukan survei kepuasan masyarakat yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Rata-rata survei kepuasan masyarakat dikoordinir oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

Tabel II.15
Capaian Kinerja Sasaran ke 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPD Tahun 2026	Capaian s.d. 2024 terhadap 2026 (%)	Capaian s.d. 2025 terhadap 2026 (%)
IKM	Nilai	2024	84	88,16	104,95	89,5	98,50	-
		2025	89	86,17	96,82		-	96,28

Dari tabel III.16 dapat diketahui bahwa capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik tahun 2025 melalui indikator indeks kepuasan masyarakat adalah sebesar 96,82 dengan interpretasi kinerja “Sangat Tinggi”. Angka tersebut lebih rendah dari capaian kinerja pada tahun 2024. Hal tersebut disebabkan oleh terjadinya perubahan lokus penilaian pada unit penyelenggara pelayanan.



Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang

Tabel II.16
Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,59	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,05	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,06 -3,52	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,53 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas, nilai capaian SKM tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2024. Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan Survei Kepuasan Masyarakat yang sudah dilakukan, sebanyak **29 (52%)** Organisasi Penyelenggara Pelayanan telah menyampaikan laporannya dari total **56** Organisasi Penyelenggara Pelayanan di lingkup Pemerintah Kota Pangkal Pinang. Terdapat **27 (48%)** Organisasi Penyelenggara Pelayanan yang belum dapat menyampaikan laporan SKM pada tahun ini disebabkan kendala sebagai berikut :

1. Masih adanya anggapan dari organisasi penyelenggara pelayanan bahwa organisasi mereka bukanlah organisasi penyelenggara pelayanan publik karena tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga tidak melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
2. Kurangnya Pemahaman dan lemahnya komitmen pimpinan Organisasi Penyelenggara Pelayanan dalam menerapkan aspek-aspek pelayanan publik;
3. Belum adanya *Punishment* dan *Reward* bagi Organisasi Penyelenggara Pelayanan dalam melaksanakan dan menerapkan aspek-aspek pelayanan publik.

Pemerintah Kota Pangkal Pinang pada tahun ini telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat sebagai komitmen Pemerintah Kota Pangkal Pinang terhadap penerapan aspek kebijakan pelayanan publik. Pemerintah Kota Pangkal Pinang telah melaksanakan SKM tahun 2025 melalui beberapa periode survey sebagai berikut :

a. Periode Survey Triwulan

Pelaksanaan periode survey triwulan ini telah dilaksanakan oleh 4 Organisasi Penyelenggara pelayanan yang terdiri dari 2 Dinas dan 2 UPTD yaitu :

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- UPTD. Balai Benih Ikan Lokal
- UPTD. RSUD Depati Hamzah

Dengan Jumlah responden sebanyak 3.838 memperoleh IKM 85,44 melalui metode SKM Hybrid dengan persentase Tindak lanjut sebesar 75%.

b. Periode Survey Semester

Organisasi Penyelenggara Pelayanan dengan periode survey semester dilaksanakan oleh 6 OPP yang terdiri 4 Puskesmas dan 2 Kecamatan sebagai berikut :

- Puskesmas Selindung
- Puskesmas Girimaya
- Puskesmas Pasir Putih
- Puskesmas Melintang
- Kecamatan Girimaya
- Kecamatan Gabek

Dengan Indeks Kepuasan Masyarakat 87,32 dari responden sejumlah 2.262 dengan metode survey manual dan persentase tindaklanjut sebesar 100%.

c. Periode Survey Tahunan

Periode survey tahunan telah dilaksanakan sebanyak 19 Organisasi Penyelenggara Pelayanan yang terdiri dari 7 Badan/Dinas, 4 Kecamatan, 4 UPTD dan 4 puskesmas dengan hasil IKM 85,75, responden sebanyak 7.596 dengan persentase tindaklanjut 47%.

Faktor Pendukung dalam pencapaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat antara lain:

1. Sebagian besar perangkat daerah sudah melakukan survei kepuasan Masyarakat;
2. Adanya Peraturan Wali Kota tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang
3. Belum terlaksananya monitoring dan evaluasi secara keseluruhan terhadap unit-unit pelayanan publik
4. Bagian Organisasi melakukan asistensi dan tindak lanjut terhadap hasil penyusunan laporan survei kepuasan masyarakat ke beberapa perangkat daerah
5. Bagian Organisasi melakukan asistensi dan tindak lanjut terhadap hasil penyusunan laporan survei kepuasan masyarakat ke beberapa perangkat daerah;
6. Anggaran kurang memadai dalam pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana

Faktor Penghambat dalam pencapaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat antara lain:

1. Belum terlaksananya monitoring secara berkala ke semua unit-unit pelayanan publik.
2. Sarana dan Prasarana pada UPP yang kurang memadai.
3. Beberapa Perangkat Daerah masih melakukan survei kepuasan Masyarakat dengan menyebarkan kuesioner secara *offline*.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pangkal Pinang dalam meningkatkan nilai kepuasan masyarakat antara lain:

1. Bagian Organisasi mendorong Perangkat Daerah yang ada di Kota Pangkal Pinang untuk melakukan survei kepuasan masyarakat ke semua setiap perangkat daerah yang ada di Kota Pangkal Pinang;
2. Mendorong Perangkat Daerah melakukan penilaian survei kepuasan masyarakat per semester agar dapat mengetahui kinerja Perangkat Daerah terhadap kepuasan Masyarakat;
3. Melakukan monitoring terhadap standar pelayanan publik kepada Perangkat Daerah di Kota Pangkal Pinang;
4. Memberikan *reward* berupa penghargaan berupa sertifikat kepada Perangkat Daerah yang mendapat mutu pelayanan A;
5. Mendorong penerapan survei kepuasan masyarakat secara *online*;
6. Adanya rencana tindak lanjut terhadap unsur layanan yang menjadi prioritas perbaikan.

Solusi kedepan memaksimalkan peningkatan kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat antara lain:

1. Melakukan monitoring dan pengendalian kualitas pelayanan publik secara berkala kepada unit-unit pelayanan publik secara berkala;
2. Perlu diberlakukan sistem *reward and punishment* kepada pelaksana pelayanan agar dapat memberikan semangat kepada pelaksana pelayanan dalam memaksimalkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat;
3. Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi dalam media pengaduan pelayanan serta kemudahan akses informasi tentang pelayanan melalui berbagai media;
4. Perlu adanya inovasi-inovasi baru dalam memberikan pelayanan publik sehingga dapat memberikan kenyamanan kepada penerima pelayanan.

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja dan Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja rata-rata survei kepuasan masyarakat adalah 1 (satu) program dengan realisasi anggaran sebesar Rp 83.841.876,00 dengan capaian anggaran sebesar 41,28% dan efisiensi 58,72%.

Tabel II.17
Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 3 : Indeks Kepuasan Masyarakat

PROGRAM/ KEGIATAN	FAKTOR PENGHAMBAT/ KENDALA	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)	EFISIENSI (%)
Program Penataan Organisasi	Anggaran yang terbatas untuk Melakukan monitoring ke Unit Pelayanan Publik serta melakukan sosialisasi tata cara SKM yang benar kepada Unit Pelayanan Publik karena program Fasilitasi pelayanan publik dan Tata Laksana terbagi menjadi dua kegiatan yaitu dengan kegiatan tata laksana dan fasilitasi pelayanan publik.	203.100.000,00	83.841.876,00	41,28	58,72

TUJUAN 2 :

MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING

Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Kesempatan Kerja

Indikator : Tingkat Pengangguran Terbuka

Perkembangan pembangunan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produktivitas tenaga kerja yang nantinya akan berimplikasi pada pengurangan angka pengangguran. Tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk dalam usia kerja. Di Indonesia penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. **TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)** adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Indikator sasaran tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator tujuan yang dilaksanakan beserta anggaran yang menunjangnya bertujuan untuk menurunkan angka pengangguran.

Tabel II. 18
Capaian Kinerja Sasaran ke 4
Meningkatnya Kualitas Kesempatan Kerja

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPD Tahun 2026	Capaian s.d. 2023 terhadap 2026 (%)	Capaian s.d. 2024 terhadap 2026 (%)
Tingkat Pengangguran Terbuka	persentase	2023	5,85	5,76	101,54	5,32	91,73	-
		2024	5,72	5,98	95,45		-	87,59

Sumber : BPS Kota Pangkal Pinang, data diolah, 2024

Sasaran strategis keempat yaitu menurunnya angka pengangguran diukur melalui indikator kinerja yaitu tingkat pengangguran terbuka (TPT). Pada Tahun 2023, Tingkat pengangguran Kota Pangkal Pinang sebesar 5,76 % yang menunjukkan bahwa dari 100 penduduk yang termasuk angkatan kerja, secara rata-rata 5-6 orang diantaranya pencari kerja.

Realisasi TPT pada tahun 2024 sesuai target yang telah ditentukan sehingga capaian sasaran strategis pada indikator kelima adalah sebesar 95,45% dengan kategori sangat tinggi. Realisasi tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2024 mengalami peningkatan, hal tersebut disebabkan oleh kasus korupsi timah yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung.

Faktor pendukung:

1. Keterlibatan semua *stakeholder* di Kota Pangkal Pinang termasuk swasta terlibat dalam penurunan pengangguran terbuka;
2. Sektor ekonomi di Kota Pangkal Pinang mulai tumbuh kembali pasca pandemi covid-19 sehingga lapangan kerja kembali terbuka dengan sektor penyerap tenaga kerja terbanyak di Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 perdagangan besar dan eceran, perhotelan, industri pengolahan, konstruksi dan akomodasi dan makan minum;
3. Adanya program pembinaan ketenagakerjaan bantuan tenaga kerja mandiri pemula/perluasan kesempatan kerja bidang tenaga kerja mandiri pemula kepada masyarakat, program padat karya pedesaan dan bantuan sarana usaha pasca pelatihan bagi masyarakat Kota Pangkal Pinang.
4. Adanya kerjasama dengan Balai Besar Pelatihan Kerja dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam peningkatan *skill/keterampilan* pencari kerja di Kota Pangkal Pinang.

Faktor Penghambat :

1. Penempatan tenaga kerja yang belum optimal;
2. Terbatasnya lapangan pekerjaan, angkatan kerja hanya mengandalkan Pemerintah sehingga enggan menciptakan lapangan usaha;
3. Ketersediaan lowongan kerja yang ditawarkan perusahaan tidak sesuai dengan kompetensi pencari kerja;
4. Faktor geografis seperti jarak, pencari kerja hanya mencari kerja dan bersedia bekerja di Wilayah tempat tinggal (wilayah lokal saja); dan
5. Pengaruh penempatan angkatan kerja baru /kelompok pendidikan lulusan baru pada SMA/SMK karena “adanya budaya memilih-milih pekerjaan” di kalangan tamatan.

Solusi/upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan kinerja (2024)

1. Menjalankan program pelatihan sesuai dengan kebutuhan perusahaan/pencari kerja;
2. Melakukan pemetaan kebutuhan perusahaan dan menghubungi perusahaan agar dapat menyampaikan laporan tentang jumlah tenaga kerja, kebutuhan tenaga kerja dan lowongan kerja;
3. Mengusulkan program bantuan tenaga kerja mandiri ke Kementerian Ketenagakerjaan RI; dan
4. Mengusulkan program bantuan tenaga kerja mandiri ke Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Upaya kedepan untuk peningkatan indikator kinerja (2024)

1. Membuat program pelatihan sesuai dengan kebutuhan perusahaan/pencari kerja;
2. Akan terus melakukan pemetaan kebutuhan perusahaan dan menghubungi perusahaan agar dapat menyampaikan laporan tentang jumlah tenaga kerja, kebutuhan tenaga kerja dan lowongan kerja;
3. Secara mengusulkan program bantuan tenaga kerja mandiri ke Kementerian Ketenagakerjaan RI; dan
4. Terus melakukan kerjasama /MOU dengan Balai Besar Pelatihan Kerja dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel II.19
Kondisi Tingkat Pengangguran di Kota Pangkal Pinang
Tahun 2024

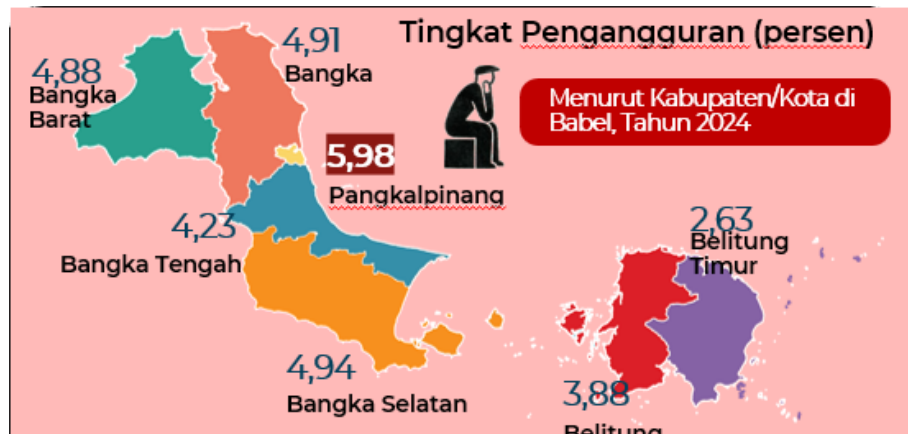
Kondisi Tenaga Kerja		Jumlah
Angkatan Kerja	:	116.376 jiwa
Bekerja	:	109.416 orang (94,02%)
Pengangguran	:	6.960 orang (5,98%)
Bukan Angkatan Kerja	:	57.342 jiwa
Sekolah	:	13.299 orang (7,6%)
Mengurus Rumah Tangga	:	38.689 orang (22,27%)
Lainnya	:	5.354 orang (3,08%)
Total (Jumlah penduduk Kota Pangkal Pinang usia 15 Tahun ke atas atau yang termasuk penduduk usia kerja (PUK))	:	173.718 jiwa

Jumlah penduduk Kota Pangkal Pinang usia 15 tahun ke atas atau yang termasuk Penduduk Usia Kerja (PUK) pada Tahun 2024 sebanyak 173.718 jiwa. Dari total PUK, sebanyak 116.376 jiwa adalah angkatan kerja (bekerja dan/atau mencari kerja) dan yang bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, lainnya) sebanyak 57.342 jiwa. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 sebesar 94,02 persen, artinya sebesar 94,02 persen penduduk usia kerja aktif secara ekonomi.

Penduduk usia kerja yang bekerja apabila dilihat dari sektor lapangan pekerjaan tampak bahwa sebesar 37,69 persen terserap di sektor jasa; 29,33 persen terserap di sektor pertanian, sisanya sebesar 32,98 persen terserap di sektor industri.

Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota Lainnya

Dari tabel di bawah ini diketahui tingkat pengangguran Kota Pangkal Pinang lebih tinggi daripada rata-rata secara nasional maupun di Provinsi Kep. Bangka Belitung. TPT Provinsi Kep. Bangka Belitung sendiri pada tingkat nasional menempati posisi ke 19 terendah dari 34 Provinsi di Indonesia. Sementara itu ,tingkat pengangguran terbuka Kota Pangkal Pinang berada pada posisi tertinggi dari 7 (tujuh) Kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Sumber : BPS Provinsi Kep. Bangka Belitung

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja sasaran keempat menurunkan tingkat pengangguran yang didukung oleh dana APBD terdiri dari 3 program masing-masing capaian anggaran program sudah di atas 90%. Adapun capaian masing-masing program sebagai berikut:

- Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja: Capaian anggaran 95,99% senilai Rp 249.138.570,00 dan efisiensi anggaran 4,01% senilai Rp 10.417.930,00 dari total anggaran Rp 259.556.500,00.
- Program Penempatan Tenaga Kerja: Capaian anggaran 99,32% senilai Rp 221.684.811,00 dan efisiensi anggaran 0,68% senilai Rp 1.519.622,00 dari total anggaran Rp 223.204.492,00.
- Program Hubungan Industrial: Capaian anggaran 95,94% senilai Rp 27.752.206,00 dan efisiensi anggaran 4,06 % senilai Rp 1.173.100,00 dari total anggaran Rp 28.925.306,00.

Berikut tabel analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan analisis efisiensi penggunaan anggaran.

Tabel II.20
Program/ Kegiatan Sasaran 4 (Persentase Tingkat Pengangguran)

Program/ Kegiatan	Faktor Pendukung/ Faktor Penghambat	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Efisiensi (%)
Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Faktor Pendukung 1) Adanya dukungan dari Kepala Daerah dan kepala Dinas terkait Kebijakan dan Program dalam peningkatan kualitas SDM yang tertuang dalam RPJMD dan Renstra Kota Pangkal Pinang 2) Adanya kerjasama dengan Balai Besar Pelatihan Kerja dan Produktifitas Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam peningkatan skill/ keterampilan pencari kerja di Kota Pangkal Pinang Faktor Penghambat 1) Kurangnya motivasi pencari kerja dalam mengikuti pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi; 2) Kurangnya adaptasi para pencari kerja terhadap Perubahan teknologi (era serba digital)	259.556.500,-	249.138.570,-	95,99	4,01
Program Penempatan Tenaga Kerja	Faktor Pendukung 1) Adanya penyebaran informasi lowongan kerja baik secara langsung maupun <i>online</i> kepada para pencari kerja; 2) Adanya saling koordinasi dari perusahaan tentang informasi lowongan kerja; 3) Adanya petugas operator dalam pelayanan Bursa Kerja <i>online</i> yang memberikan informasi lowongan kerja baik secara langsung maupun <i>online</i> . Faktor Penghambat 1) Ketersediaan lowongan kerja yang ditawarkan perusahaan tidak sesuai dengan kompetensi pencari kerja.	223.204.492,00	221.684.811,00	99,32	0,68
Program Hubungan Industrial	Faktor Pendukung 1) Meningkatnya perusahaan yang memenuhi sarana hubungan industrial dan perusahaan yang mematuhi aturan ketenagakerjaan. 2) Adanya pelaksanaan pembinaan dan bimbingan tentang aturan ketenagakerjaan kepada Perusahaan. Faktor Penghambat 1) Masih terdapat perusahaan yang belum memahami dan patuh terhadap pemenuhan sarana hubungan 2) Belum optimalnya Implementasi UU Ketenagakerjaan (UU Cipta Kerja) pada Perusahaan.	28.925.306,00	27.752.206,00	95,94	4,06

Sasaran 5 : Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat
Indikator : Gini Ratio

Tabel II.21
Capaian Kinerja Sasaran ke 5
Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPD Tahun 2026	Capaian s.d. 2024 terhadap 2026 (%)	Capaian s.d. 2025 terhadap 2026 (%)
Gini Ratio	Indeks	2024	0,268	0,292	91,04	0,223	69	88,34
		2025	0,285	0,249	112,63			

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pangkal Pinang, data diolah, 2026

Pada tahun 2025, Indeks Gini Ratio Kota Pangkal Pinang tercatat sebesar **0,249**, sedikit di atas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berada di angka **0,222**. Meskipun demikian, angka ini masih mencerminkan distribusi pengeluaran yang cukup merata karena berada di bawah ambang batas 0,3. Perbedaan tipis ini tergolong wajar bagi sebuah ibu kota provinsi, mengingat karakteristik wilayah perkotaan dengan keberagaman lapangan usaha dan dinamika pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah kabupaten.

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Tren positif terjadi dalam distribusi pengeluaran penduduk Kota Pangkal Pinang, di mana Indeks Gini mengalami penurunan dari 0,292 pada tahun 2024 menjadi 0,249 pada tahun 2025. Faktor terjadinya tren positif ini didukung oleh berbagai keberhasilan indikator makro yang saling terintegrasi sebagai berikut:

1. Tercapainya standar konsumsi energi dan protein yang lebih baik di berbagai lapisan masyarakat membantu memperkecil kesenjangan kualitas hidup;
2. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) melalui penyerapan tenaga kerja memastikan lebih banyak rumah tangga memiliki sumber pendapatan tetap;
3. Perbaikan Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan berkontribusi pada penurunan Indeks Gini karena menandakan jarak pengeluaran antar penduduk miskin dan garis kemiskinan semakin mengecil; dan
4. Peningkatan kualitas tempat tinggal dan sanitasi bagi rumah tangga miskin membantu mengurangi beban pengeluaran non-makanan.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel II.22
Program dan Kegiatan Sasaran 5 (Gini Ratio)

Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Tk. Capaian Kinerja (%)	Efisiensi Anggaran (%)
Dinas Sosial				
Program Rehabilitasi Sosial	Rp323.875.088	Rp272.697.195	100	84,20
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp30.000.000	Rp29.978.506	100	99,93
Program Pemberdayaan Sosial	Rp1.103.312.172	Rp1.092.169.110	100	98,99
Program Penanganan Bencana	Rp648.295.080	Rp600.803.440	100	92,67
Dinas Pangan dan Pertanian				
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp169.050.296	Rp125.532.796	100	74,26
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp68.614.392	Rp64.667.575	100	94,25
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp20.886.232	Rp19.833.232	100	94,96
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp189.675.176	Rp185.534.166	100	97,82
			100	
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp276.108.968	Rp260.567.340	95	94,37
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp196.130.176	Rp187.722.622	100	95,71
Program Penyuluhan Pertanian	Rp254.449.240	Rp216.065.338	100	84,91
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp4.995.000	Rp4.068.150	100	81,44
Dinas Kelautan dan Perikanan				
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp246.871.520	Rp246.133.215	114	99,70
			91	
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp857.102.064	Rp845.473.217	38	98,64
			94	
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp76.300.000	Rp71.800.000	82	94,10
			132	
TOTAL	Rp4.465.665.404	Rp4.223.045.902		

Sumber: Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2026

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui parameter ketimpangan pengeluaran penduduk (Gini Ratio) Kota Pangkal Pinang di tahun 2025 di fokuskan pada

intervensi strategis yang dilakukan pemerintah khususnya melalui Dinas Sosial, Dinas Pangan dan Pertanian, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkal Pinang. Berikut ikhtisar dari seluruh program yang mendukung capaian indikator kinerja Indeks Gini Ratio:

1. Terdapat 4 (empat) program di Dinas Sosial dan 7 (tujuh) program di Dinas Pangan dan Pertanian yang memiliki tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Keberhasilan pada pelaksanaan program-program ini menunjukkan adanya sinergi antar perangkat daerah dalam mendukung capaian tren positif pada Indeks Gini Ratio Kota Pangkal Pinang tahun 2025;
2. Sebanyak 14 (empat belas) dari 15 (lima belas) total program pada ketiga Perangkat Daerah, menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang melampaui angka 75%. Hal ini mencerminkan kemampuan Perangkat Daerah yang baik dalam mengeksekusi kebijakan dengan pemanfaatan anggaran yang optimal.

Sasaran 6 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Indikator : Indeks Kesehatan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 menyatakan secara ringkas arah pembangunan nasional, termasuk pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan merupakan upaya semua komponen Bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Berdasarkan rencana strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019, arah pembangunan kesehatan adalah Program Indonesia Sehat yang dilaksanakan dengan tiga pilar utama yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional.

IPKM adalah kumpulan indikator kesehatan yang dapat dengan mudah dan langsung diukur untuk menggambarkan masalah kesehatan. Serangkaian indikator kesehatan ini secara langsung maupun tidak langsung dapat berperan meningkatkan umur harapan hidup yang panjang dan sehat. Prinsip umum indikator yang digunakan dalam penyusunan IPKM adalah sederhana, mudah, dapat diukur, bermanfaat, dipercaya, dan tepat waktu. Indikator-indikator terpilih dalam IPKM lebih menunjukkan dampak dari pembangunan kesehatan tahun sebelumnya dan menjadi acuan perencanaan program pembangunan kesehatan untuk tahun berikutnya. IPKM dimanfaatkan untuk :

1. membuat dasar perencanaan program pembangunan kesehatan di kabupaten/kota;

2. menyusun bahan advokasi pemerintah pusat ke pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, agar terpacu memperbaiki peringkat dengan melakukan prioritas program kesehatan beserta sumber dayanya;
3. menjadikan sebagai salah satu kriteria dan pertimbangan penentuan alokasi dana bantuan kesehatan dari pusat ke provinsi atau kabupaten/kota, dan dari provinsi ke kabupaten/kota.

Tabel II.23
Capaian Kinerja Sasaran ke 6
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPD Tahun 2026	Capaian s.d. 2023 terhadap 2026 (%)	Capaian s.d. 2024 terhadap 2026 (%)
Indeks Kesehatan	nilai	2023	-	0,846	-	0,838	99,05	-
		2024	0,832	0,850	102,16		-	99,04

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pangkal Pinang, data diolah, 2024

Pada tahun 2024 capaian target Indeks Kesehatan di Kota Pangkal Pinang terkategori sangat tinggi, dengan capaian kinerja 102,16 % dengan realisasi sebesar 0,850. Pemerintah Kota Pangkal Pinang melalui Dinas Kesehatan telah berkomitmen untuk menyediakan fasilitas layanan kesehatan terbaik untuk masyarakat Kota Pangkal Pinang. Selain itu Pemerintah Kota Pangkal Pinang telah merehab seluruh Puskesmas yang terdiri dari 9 puskesmas. Kemudian untuk rumah sakit juga sudah dilengkapi dengan teknologi terbaru, dan alat-alat medis baru.

Kondisi tersebut tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan. Adapun program yang mendukung tercapainya target indikator ini adalah sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
3. Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan; dan
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Sasaran 7 : Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Pendidikan Masyarakat

Indikator : Indeks Pendidikan

Sasaran strategis yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian Tujuan Kota Pangkal Pinang “Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat yang Berdaya Saing” adalah “**Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat**”. Untuk sasaran ini diukur melalui indikator kinerja “**Indeks Pendidikan**”.

Tabel II.24

Capaian Kinerja Sasaran ke 7 : Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Pendidikan Masyarakat

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPD Tahun 2026	Capaian s.d. 2024 terhadap 2026 (%)	Capaian s.d. 2024 terhadap 2026 (%)
Indeks Pendidikan	Nilai	2024	0,711	0,725	101,97	0,714	101,54%	103,4%
		2025	0,712	0,738	103,6			

Sumber : BPS Kota Pangkal Pinang, diolah 2026

Indeks Pendidikan merupakan salah satu komponen dasar yang penting untuk mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Nilai yang ditunjukkan indeks pendidikan digunakan untuk mengukur cerminan hasil pembangunan di bidang pendidikan di suatu wilayah, dimana rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah menjadi komponen utama perhitungannya. Semakin tinggi capaian indeks pendidikan dari tahun ke tahun menandakan semakin membaiknya penyelenggaraan pendidikan di wilayah tersebut. Indeks Pendidikan diukur dengan menghitung rata-rata capaian indeks Harapan Lama Sekolah dan indeks Rata-rata Lama Sekolah suatu wilayah di tahun tertentu. Semakin baik capaian indeks pendidikan di suatu wilayah menunjukkan semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani warganya dan semakin tinggi pula kualitas dalam pola pikir maupun pola tindakannya.

Realisasi indeks pendidikan **tahun 2024** sebesar **0,725**, lebih besar bila dibandingkan dengan target RPD Tahun 2026. Begitu juga dengan realisasi indeks pendidikan **tahun 2025** yaitu sebesar **0,738**. Untuk diketahui, target indeks pendidikan tahun 2026 berdasarkan RPD hanya sebesar **0,714**. Melesatnya capaian indeks pendidikan pada 2 (dua) tahun tersebut dibandingkan dengan target yang ditentukan RPD di tahun 2026 menandakan semakin membaiknya capaian rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah di Kota Pangkal Pinang.

Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/ Kota Lainnya (Jika Ada)

Realisasi Indeks Pendidikan Kota Pangkal Pinang bila dibandingkan dengan realisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan salah satu Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan melalui tabel berikut:

Tabel II.25
Perbandingan Realisasi Indeks Pendidikan di Kota Pangkal Pinang dengan
Provinsi dan Kabupaten/Kota Lainnya

Provinsi/Kabupaten/Kota	Tahun 2024	Tahun 2025
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	0,580	0,60
Kabupaten Belitung	0,590	0,63
Kota Pangkal Pinang	0,725	0,738

Sumber : BPS Kota Pangkal Pinang, diolah

Berdasarkan tabel di atas, diketahui realisasi Indeks Pendidikan Kota Pangkal Pinang lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Belitung. Indeks Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 dan 2025 berturut - turut sebesar 0,580 dan 0,60. Sementara Kabupaten Belitung tercatat sebesar 0,590 dan 0,63 di tahun 2024 dan 2025. Bila dilihat dari perbandingan salah satu komponen perhitungannya, realisasi angka **Rata-rata Lama Sekolah** di Kota Pangkal Pinang di tahun 2025 sebesar 10,90 tahun, sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Belitung masing-masing sebesar 9,09 tahun dan 9,37 tahun. Begitu juga dengan indikator **Harapan Lama Sekolah** Tahun 2025, Kota Pangkal Pinang unggul di angka 13,50 tahun, sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Belitung masing-masing sebesar 12,5 tahun dan 13,13 tahun. Dari capaian kedua indikator pembentuk Indeks Pendidikan tersebut terlihat kondisi pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meliputi Kabupaten Bangka dan Kota Pangkal Pinang semakin meningkat tiap tahunnya, namun peningkatan untuk Kota Pangkal Pinang jauh lebih baik dan signifikan.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berikut dijabarkan faktor-faktor penghambat dari keberhasilan capaian indikator Indeks Pendidikan:

1. Menurunnya capaian Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS merupakan salah satu komponen dasar yang digunakan untuk menghitung Indeks Pendidikan. HLS adalah indikator yang menunjukkan berapa tahun masa sekolah yang diharapkan dapat dialami oleh anak-anak yang saat ini berusia 7 tahun ke atas. Jika HLS di suatu wilayah adalah 12 tahun, artinya secara rata-rata anak-anak yang berusia 7 tahun di wilayah tersebut diharapkan dapat menamatkan pendidikan mereka hingga setara dengan lulusan SMA

atau Diploma I. Dengan demikian semakin meningkat capaian HLS maka semakin baik pula kondisi pendidikan di wilayah tersebut. Sebaliknya, semakin menurun capaian HLS maka semakin buruk pula kondisi pendidikan di wilayah tersebut dikarenakan penduduk di masa datang diperkirakan tidak dapat menuntaskan pendidikan mereka di jenjang yang lebih tinggi;

2. Menurunnya capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Serupa dengan HLS, RLS juga merupakan salah satu komponen dasar yang digunakan untuk menghitung Indeks Pendidikan. RLS adalah angka yang menggambarkan lamanya masa sekolah yang telah dialami oleh penduduk usia 25 tahun ke atas. Semakin tinggi RLS menunjukkan semakin baiknya pendidikan di wilayah tersebut. Sebaliknya, semakin rendah RLS menunjukkan semakin buruknya pendidikan di daerah tersebut dikarenakan rata-rata lamanya waktu pendidikan yang ditempuh penduduk relatif sedikit;
3. Penerapan kurikulum pembelajaran yang berubah-ubah. Kurikulum yang relevan dan efektif akan membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan, yang juga berdampak pada hasil belajar dan indeks pendidikan. Namun jika penerapan kurikulum berubah-ubah, butuh waktu bagi satuan pendidikan untuk melakukan penyesuaian pembelajaran kepada peserta didik;
4. Masih ditemukannya Anak Tidak Sekolah di Kota Pangkal Pinang dengan berbagai latar belakang yang mempengaruhi.

Berikut upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan kinerja capaian Indeks Pendidikan di Kota Pangkal Pinang Tahun 2025:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang melakukan Inventarisasi Anak Tidak Sekolah (ATS) dan memasukkannya kedalam Program Kesetaraan, Program Keaksaraan atau Program Kursus dan Keterampilan serta “gerakan kembali ke sekolah”;
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang secara kontinyu melakukan penguatan kelembagaan pendidikan nonformal;
3. BAPPERIDA Kota Pangkal Pinang mempertimbangkan hasil Inventarisasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana per sekolah, terkait kebutuhan Ruang Kelas Baru, utilitas sekolah, rehabilitasi, dan lain-lain di dalam menentukan prioritas penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. menjamin kepastian daya tampung sekolah menengah pertama dengan menambah ruang kelas baru dan memperhatikan basis zonasi kewilayahan; dan

- menjadikan sub kegiatan pemberian beasiswa bagi siswa tidak mampu sebagai prioritas yang diutamakan setiap tahun.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 dapat dilihat melalui penjabaran tabel efisiensi anggaran berikut.

Tabel II.26
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Meningkatnya APS Pendidikan Dasar	APS SD	99,9	101,12	101,2	240.267.087.104,78	227.215.755.729,64	94,57	13.051.331.375,14
		APS SMP	90,20	92,04	102				
2	Meningkatnya Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda	Persentase Cagar budaya yang terregistrasi secara nasional	80	78,26	97,82	259.999.938	255.559.863	98	4.440.075
		Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang dilestarikan	80	90	112,5	713.223.796	701.272.823	98	11.950.973
Total Belanja					103,38	241.240.310.839	228.172.588.416		13.067.722.423

Sisa anggaran yang tidak digunakan pada tahun 2025 sebesar Rp13.067.722.423 dari total anggaran Rp241.240.310.839, dengan capaian kinerja rata-rata 103,38%. Sisa anggaran tersebut lebih kecil bila dibandingkan dengan sisa anggaran tahun 2024 yaitu sebesar Rp17.658.723.506 atau sebesar 7,05% dari total anggaran. Dengan demikian tercapai efisiensi anggaran sebesar 5,4%.

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program penunjang keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang adalah Program Pengelolaan Pendidikan, melalui Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Dasar, PAUD dan Kesetaraan. Dalam program tersebut terdapat beberapa sub kegiatan prioritas sebagai berikut:

- Pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu jenjang Paud, SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan dengan total anggaran sebesar Rp1.177.000.000, dengan realisasi sebesar Rp1.093.150.000. Beasiswa diberikan kepada 978 (sembilan ratus tujuh puluh delapan) siswa kurang mampu yang tersebar pada ke empat jenjang pendidikan dimaksud. Diharapkan dengan pemberian beasiswa ini keberlangsungan pendidikan siswa - siswa

kurang mampu tersebut dapat terus berjalan sehingga capaian partisipasi sekolah dapat meningkat setiap tahunnya;

2. Selain pemberian beasiswa kurang mampu, telah dilaksanakan pula pemberian perlengkapan sekolah bagi siswa kurang mampu dengan anggaran sebesar Rp272.840.000, dengan realisasi sebesar Rp272.726.556. Perlengkapan siswa tersebut diberikan kepada 718 (tujuh ratus delapan belas) siswa kurang mampu yang tersebar di jenjang SD dan SMP;
3. Peningkatan kompetensi guru jenjang Paud, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dengan anggaran Rp1.839.020.000 dan realisasi sebesar Rp1.797.303.826. Perkembangan yang pesat dalam dunia pendidikan serta adanya penyesuaian kurikulum menuntut para guru untuk terus meng-upgrade kemampuan dirinya agar dapat mengawal pelaksanaan proses pembelajaran dengan sebaik mungkin;
4. Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana jenjang Paud, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dengan anggaran Rp11.210.023.434 dan realisasi sebesar Rp11.051.920.332,64. Peningkatan kapasitas tersebut meliputi penambahan sarana prasarannya serta peningkatan kualitasnya. Dengan demikian satuan pendidikan senantiasa siap melaksanakan kegiatan pembelajaran yang efektif, relevan dan tepat guna.

Sasaran 8 : Meningkatnya Keterlibatan dan Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan

Indikator : Indeks Pembangunan Gender

Indeks pembangunan gender adalah ukuran pembangunan manusia berbasis gender yang dilihat dari tiga dimensi capaian dasar manusia yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar layak hidup. Peningkatan indeks pembangunan gender (IPG) dipengaruhi oleh peningkatan pengeluaran perkapita perempuan, peningkatan angka harapan lama sekolah perempuan, peningkatan angka rata-rata lama sekolah perempuan dan peningkatan angka harapan hidup perempuan.

Indikator pencapaian IPG menggambarkan persamaan kesempatan dalam memperoleh akses terutama dalam memperoleh pendidikan, kesehatan dan kesempatan untuk bekerja. Keterlibatan baik perempuan dan laki-laki yang setara menjadi syarat mutlak dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan merata.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. IPG merupakan ukuran pembangunan manusia yang merupakan komposit dari empat indikator, yang lebih menekankan status perempuan khususnya dalam mengukur kemampuan dasar.

Sasaran Daerah yang kedelapan yaitu Meningkatnya Keterlibatan dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan dengan Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Gender. Adapun indikator Kinerja Indeks Pembangunan Gender di koordinir oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang.

Tabel II.27
Capaian Kinerja Sasaran ke 8
Meningkatnya Keterlibatan dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPD Tahun 2026	Capaian Sampai dengan 2024 terhadap 2026 (%)	Capaian Sampai dengan 2025 terhadap 2026 (%)
Indeks Pembangunan Gender	Indeks	2024	93,57	93,82	100,27	93,79	100,03	
		2025	93,69	95,29	101,71	93,79		101,60

Sumber: BPS Prov. Kep. Bangka Belitung, data diolah, 2025

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

a. Faktor Pendukung

- adanya support dari lintas sektor terkait pembangunan gender;
- adanya peningkatan layanan kesehatan terutama untuk harapan hidup Perempuan dan kesehatan reproduksi;
- meningkatnya keterlibatan perempuan di Kota Pangkal Pinang dalam posisi profesional, managerial, dan pengambilan keputusan di dunia kerja; dan
- adanya kebijakan/program-program yang mendukung untuk pengarusutamaan gender.

b. Faktor Penghambat

- terdapat tantangan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya mewujudkan kesetaraan gender secara menyeluruh;
- belum optimalnya penguatan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi perempuan dalam berpartisipasi di sektor pembangunan; dan
- efisien secara finansial menjadi mengakibatkan kualitas atau jangkauan layanan kepada masyarakat menjadi berkurang.

- c. Upaya yang dilakukan ke depan agar capaian kinerja semakin baik antara lain:
- Memberikan Advokasi kepada pengambil pemangku/pengambil kebijakan agar memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan;
 - Memberikan KIE kepada masyarakat terkait pentingnya mewujudkan kesetaraan gender;
 - Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk menyampaikan pentingnya Kesetaraan Gender;
 - Senantiasa berkolaborasi dengan instansi lintas sektor terkait;
 - Komitmen pimpinan dalam mengeluarkan kebijakan yang responsive gender, adanya pemberdayaan ekonomi perempuan; dan
 - Kesetaraan akses antara Perempuan dan Laki-laki dalam mendapatkan akses layanan Pendidikan dan kesehatan.

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja dan Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Tabel II.28
Program/Kegiatan Pendukung Sasaran 8 : Indeks Pembangunan Gender

PROGRAM PENDUKUNG PENCAPAIAN SASARAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	EFISIENSI ANGGARAN
Program Administrasi Pemerintahan Desa	25.000.000	25.000.000	-
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	345.536.784	344.936.771	600.013
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	14.914.000	14.824.000	90.000
Program Perlindungan Perempuan	327.808.000	268.939.597	58.868.403
Program Pemenuhan Hak Anak	29.550.000	29.550.000	-
Program Perlindungan Khusus Anak	215.115.000	159.618.145	55.496.855
Program Pengendalian Penduduk	220.314.000	216.112.910	4.201.090
Program Pembinaan Keluarga Berencana	1.479.541.000	1.380.869.100	98.671.900
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	1.418.830.000	1.418.039.048	790.952
Total	4.076.608.784	3.857.889.571	218.719.213

Berdasarkan tabel diatas, untuk menunjang Sasaran Daerah “Meningkatnya Keterlibatan dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan dengan Indikator Kinerja

Indeks Pembangunan Gender” sudah efisien. Dimana capaian kinerja Indeks Pembangunan Gender diatas 100% dengan didukung oleh 9 (Sembilan) Program. Dengan efisiensi anggaran Rp 218.719.213 (Dua Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Tiga Belas Rupiah) dari 7 (Tujuh) Program yaitu :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
3. Program Perlindungan Perempuan;
4. Program Perlindungan Khusus Anak;
5. Program Pengendalian Penduduk;
6. Program Pembinaan Keluarga Berencana; dan
7. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Adapun Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Sasaran Daerah kedelapan yaitu “Meningkatnya Keterlibatan dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan dengan Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Gender” Tahun 2025 antara lain:

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
2.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
3.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
4.	Program Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
			Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
5.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
6.	Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan Pencegahan KTA
		Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK
7.	Program Pengendalian Penduduk	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
			Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
			Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
8.	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana
			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)
			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
			Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
			Advokasi Program Bangsa Kencana oleh Pokja Advokasi Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
			Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
			Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas
9.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
			Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupten/Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pemantauan Data Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)
			Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)

TUJUAN III :

MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MELALUI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN

Sasaran 9 : Meningkatnya Produktifitas Sektor Perekonomian Unggulan Daerah

Indikator : - LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
- LPE Kategori Industri Pengolahan Kontribusi Subsektor Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB

Sasaran strategis kesembilan yaitu meningkatnya produktifitas sektor perekonomian unggulan daerah diukur melalui tiga indikator kinerja yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Laju

Pertumbuhan Ekonomi Kategori Industri Pengolahan dikoordinir oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM. Sedangkan Kontribusi Subsektor Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata.

Tabel II.29
Capaian Kinerja Sasaran ke 9 : Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPD Tahun 2026	Capaian s.d. 2024 terhadap 2026 (%)	Capaian s.d. 2025 terhadap 2026 (%)
LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran	Persentase	2024	4,83	1,13	23,39	4,95	22,83	55,35
		2025	4,90	2,74	55,91			
LPE Kategori Industri Pengolahan	Persentase	2024	5,5	-30,27	-550,36	6,5	-465,69	155,54
		2025	6	10,11	168,5			
Kontribusi Sub Sektor Ekraf Terhadap PDRB	Persentase	2024	19,27	18,82	97,67	21,77	86,45	98,34
		2025	20,52	21,41	104,33			

Sumber: Dinas PerindagkopUMKM dan Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang, diolah, 2026

LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, LPE Kategori Industri Pengolahan

Sebagai Ibu Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kegiatan ekonomi Kota Pangkal Pinang didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa. Walaupun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikenal sebagai daerah pengasil timah terbesar di Indonesia namun hal tersebut tidak menjadikan Kota Pangkal Pinang sebagai penghasil timah karena aktivitas pertambangan tidak boleh dilaksanakan di wilayah Kota Pangkal Pinang. Namun demikian pusat ekonomi Provinsi kepulauan Bangka Belitung berada di Kota Pangkal Pinang, sebagai pintu masuk dan keluarnya distribusi barang dan jasa. Oleh karena itu menjadi sangat relevan, menjadikan Laju Pertumbuhan Ekonomi sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan di Kota Pangkal Pinang.

Manfaat pengukuran Laju Pertumbuhan Ekonomi antara lain dapat mengetahui perkembangan perekonomian suatu daerah, melalui indikator pertumbuhan ekonomi.

Angka PDRB dihitung berdasarkan dua pendekatan yaitu produksi dan pengeluaran. PDRB pendekatan produksi dihitung dengan menjumlahkan nilai tambah bruto (NTB) yang dihasilkan oleh seluruh pelaku ekonomi dalam suatu wilayah tertentu. PDRB pengeluaran dihitung dengan menjumlahkan semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: konsumsi rumah tangga; konsumsi lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah,

pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Bila dilihat berdasarkan lapangan usaha, maka dapat disimpulkan bahwa perekonomian Kota Pangkal Pinang tahun 2025 ditopang oleh sektor Jasa Pendidikan, Informasi dan komunikasi serta sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Sementara itu pada sektor perdagangan besar dan eceran serta industri pengolahan yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian Kota Pangkal Pinang mengalami perlambatan yang signifikan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.30
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHK Tahun 2025

SEKTOR PDRB	LAJU PERTUMBUHAN PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA ADHK (PERSEN)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.09
Pertambangan dan Penggalian	0
Industri Pengolahan	10.11
Pengadaan Listrik dan Gas	4.01
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.6
Konstruksi	-3.1
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.74
Transportasi dan Pergudangan	8.81
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.67
Informasi dan Komunikasi	9.17
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.13
Real Estate	3.9
Jasa Perusahaan	7
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0.18
Jasa Pendidikan	6.38
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.59
Jasa lainnya	9.18
Produk Domestik Regional Bruto	4.54

Sumber : BPS Kota Pangkal Pinang, 2026

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

a. Faktor Pendukung

- Peningkatan suhu investasi dalam hal penanaman modal usaha di bidang perdagangan dan industri pengolahan; dan
- Peningkatan peran pemerintah dalam pemberian kemudahan mengurus perizinan di bidang perdagangan dan industri pengolahan.

b. Faktor Penghambat

- Kurangnya infrastruktur kepelabuhan yang menjadikan bongkar muat barang perdagangan agak terbatas; dan
- Masih kurangnya sumber daya manusia yang berpengalaman di bidang industri pengolahan.

c. Solusi/upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan kinerja (2024)

- Melakukan koordinasi dan kolaborasi antar instansi dan perangkat daerah terkait dengan para pelaku usaha di bidang perdagangan dan industri pengolahan sehingga bidang perdagangan dan bidang industri pengolahan di Ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tetap mengalami dinamika perkembangan ke arah tren positif,
- Memberikan pendidikan dan pelatihan serta workshop kepada para pelaku usaha industri mikro dan kecil sebagai pendukung pengembangan perdagangan dan industri pengolahan dalam rangka peningkatan SDM dan daya saing.
- Membangun Sentra Rumah Produksi Bersama yang dijadikan pusat industri pengolahan hasil laut sebagai dukungan pembuatan dan pengembangan produk lokal dari Kota Pangkal Pinang yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat.
- Menerapkan digitaliasi dengan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang merupakan program pemerintah pusat dalam rangka memberikan kemudahan bagi para calon investor di daerah khususnya di bidang industri untuk menanamkan modal usahanya di Kota Pangkal Pinang.

d. Upaya kedepan untuk peningkatan indikator kinerja tahun berikutnya

- Meneruskan koordinasi dan kolaborasi antar instansi dan perangkat daerah terkait dengan para pelaku usaha di bidang perdagangan dan industri pengolahan agar tetap berkomitmen untuk melakukan perdagangan dan industri pengolahan sebagai

salah satu upaya pencapaian sasaran peningkatan pembangunan Kota Pangkal Pinang.

- Melanjutkan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta workshop kepada para pelaku usaha pendukung pengembangan perdagangan dan industri pengolahan secara masif dan berkelanjutan agar tidak ada keraguan lagi dari para penanam modal ketika akan melakukan usaha perdagangan dan industri pengolahan di Kota Pangkal Pinang

Kontribusi Sub Sektor Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB

Dalam ekonomi kreatif, ide kreatif dan inovatif akan selalu diperlukan untuk melakukan pengembangan. Oleh karena itu, penciptaan produk baru akan selalu berdasar pada ide baru. Dalam menjalankan industri kreatif, diperlukan kerja sama yang baik di antara berbagai pihak yang bersangkutan dengan suatu ekonomi kreatif tertentu. Salah satunya, diperlukan kerja sama antara pengusaha dan pemerintah untuk mengatur kebijakan. Dari ke-17 sub sektor Ekonomi Kreatif yang telah berkembang di Kota Pangkal Pinang, ada 3 sub sektor yang mendominasi yaitu : Kuliner, Kriya dan Fashion.

Tabel II.31
Capaian Kinerja Sasaran ke-9 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPD Tahun 2026	Capaian s.d. 2024 terhadap 2026 (%)	Capaian s.d. 2025 terhadap 2026 (%)
Kontribusi sub sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB	Persentase (%)	2024	19,27	18,821	97,67	21,77	86,45	98,35
		2025	20,52	21,41	104,33			

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang, 2026

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- SDM (Sumber Daya Manusia)
Pegawai yang memiliki kompeten, motivasi tinggi, pelatihan yang baik
- Strategi yang efektif
Perencanaan dan pelaksanaan strategi yang tepat sasaran
- Inovasi dan teknologi
Melaksanakan inovasi dengan menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas/ inovasi pendataan secara digitalisasi

- Manajemen yang kuat
Kepemimpinan yang kuat, komunikasi yang jelas dan pengambilan keputusan yang cepat
- Kualitas produk/jasa
Produk /jasa yang memiliki kreativitas tinggi guna memenuhi kebutuhan pasar sehingga memiliki nilai tambah

Solusi Penguatan :

- Pengembangan SDM dan pelaku / komunitas ekonomi kreatif melalui pendidikan dan pelatihan serta workshop;
- Inovasi produk/ jasa berkelanjutan;
- Investasi pada teknologi baru

Alternatif solusi yang telah dilakukan :

- penguatan kelembagaan dalam mengembangkan ekonomi kreatif, penguatan alternatif eksternal dan internal OPD terkait, pemangku kepentingan dan kelembagaan;
- penguatan koordinasi komite ekonomi kreatif untuk mempermudah di dalam pengembangan program dan kegiatan ekonomi kreatif;
- melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran sertifikat HKI untuk meningkatkan daya saing produk serta memberikan perlindungan terhadap inovasi pelaku ekonomi kreatif;
- melaksanakan promosi/pemasaran terhadap semua produk pelaku/ Komunitas Ekonomi Kreatif;
- melaksanakan kerjasama/ kolaborasi dengan berbagai pihak; dan
- melaksanakan pendidikan, pelatihan dan workshop kepada para pelaku /komunitas ekonomi kreatif.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel II.32
Program dan Kegiatan Sasaran
(Kontribusi Subsektor Ekonomi Kreatif terhadap PDRB)

PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN (%)	EFISIENSI (%)
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	41.836.000	41.186.200	98,45	1,55
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	24.700.000	24.620.000	99,68	0,32
Total	66.536.000	65.806.000	98,90	1,1

Sumber data : Dinas Pariwisata, 2026

Sasaran 10 : Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah

Indikator : Realisasi Investasi

Nilai investasi Kota Pangkal Pinang bersumber dari data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Bidang Penanaman Modal Tahun 2021. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 15 ditetapkan bahwa setiap perusahaan penanaman modal berkewajiban untuk membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Investor domestik maupun asing diwajibkan untuk menyampaikan LKPM kepada BKPM untuk memotret investasi yang ada di Indonesia. Dengan adanya LKPM tersebut, para pihak bisa mengetahui sektor usaha yang sedang berkembang, hambatan yang tengah terjadi, serta kebijakan yang harus diterapkan agar kegiatan usaha tersebut berjalan lancar. Setiap perusahaan penanaman modal wajib menyampaikan LKPM secara online dengan menggunakan hak akses yang telah diberikan BKPM melalui <http://lkpmonline.bkpm.go.id>. Untuk perusahaan yang kegiatan penanaman modalnya masih dalam tahap pembangunan wajib menyampaikan LKPM setiap triwulan, dan untuk perusahaan yang kegiatan penanaman modalnya telah memiliki Izin Usaha, wajib menyampaikan LKPM setiap semester.

Berdasarkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal I dan Tenaga Kerja Kota Pangkal Pinang melakukan pemantauan perusahaan yang berada di wilayah Kota Pangkal Pinang. Pemantuan perusahaan dilakukan dalam rangka mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi investasi. Untuk itu Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkal Pinang fokus pada pemantauan dan pembinaan adalah agar pelaku usaha tertib dalam menyampaikan LKPM. Selain melakukan pemantuan juga dilakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) kepada perusahaan yang belum mendaftarkan kegiatan usaha melalui OSS atau yang sudah tetapi mengalami kendala sehingga belum mendapatkan Nomor Induk Berusaha atau Izin Usaha dan Izin Komersial/Operasional.

Perhitungan persentase capaian kinerja diperoleh dengan membandingkan angka realisasi dengan target dikali 100 persen, dalam pengertian semakin tinggi angka realisasi dibandingkan angka target maka semakin baik nilai kinerjanya.

Tabel II.33
Capaian Kinerja Sasaran ke 10 : Penilaian kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB)

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target Akhir RPD Tahun 2026	Capaian s.d 2024 terhadap 2026 (%)	Capaian s.d 2025 terhadap 2026 (%)
Nilai hasil evaluasi kinerja	Nilai	2024	75	81,598	108,797	79	103,289	106,71
		2025	77	-	-			

Sumber data : Sumber: DPMPSTSP Kota Pangkal Pinang, data diolah, 2026

Nilai hasil evaluasi kinerja adalah penilaian kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Pemerintah Daerah berdasarkan Penilaian Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang tidak masuk locus dalam penilaian kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Investasi yang ada di Kota Pangkal Pinang merupakan salah satu variabel yang penting dalam memicu pertumbuhan ekonomi daerah. Ada beberapa hal yang mempengaruhi investasi, yaitu suku bunga, PDRB, utilitas, birokrasi, kualitas SDM, regulasi, stabilitas politik dan keamanan serta faktor sosial budaya. Hal ini menimbulkan implikasi kebijakan, yaitu penurunan suku bunga, kebijakan fiskal, perbaikan sarana dan prasarana, perbaikan birokrasi pemerintahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelonggaran regulasi, kebijakan untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan, penguatan budaya lokal. Berikut ada beberapa faktor yang mempengaruhi investasi di Pangkal Pinang dapat tumbuh dan berkembang :

- a. Suku bunga merupakan faktor yang sangat penting dalam menarik investasi karena sebagian besar investasi biasanya dibiayai dari pinjaman bank. Jika suku bunga pinjaman turun maka akan mendorong investor untuk meminjam modal dan dengan pinjaman modal tersebut maka ia akan melakukan investasi.
- b. Pendapatan per kapita dan PDRB per kapita merupakan cermin dari daya beli masyarakat atau pasar. Makin tinggi daya beli masyarakat suatu negara atau daerah (yang dicerminkan oleh pendapatan nasional per kapita atau PDRB per kapita) maka akan makin menarik untuk berinvestasi.
- c. Prasarana dan sarana pendukung tersebut meliputi sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, utilitas, pembuangan limbah dan lain-lain. Sarana dan prasarana transportasi contohnya antara lain jalan, terminal, pelabuhan, bandar udara dan lain-lain. Sarana dan prasarana telekomunikasi seperti : jaringan telepon kabel maupun nirkabel,

jaringan internet, prasarana dan sarana pos. Sedangkan contoh dari utilitas adalah tersedianya air bersih, listrik dan lain-lain.

- d. Birokrasi perijinan merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi investasi karena birokrasi yang panjang memperbesar biaya bagi investor. Birokrasi yang panjang akan memperbesar biaya bagi pengusaha karena akan memperpanjang waktu berurusan dengan aparat. Padahal bagi pengusaha, waktu adalah uang. Kemungkinan yang lain, birokrasi yang panjang membuka peluang oknum aparat pemerintah untuk menarik suap dari para pengusaha dalam rangka memperpendek birokrasi tersebut.
- e. Kualitas sumber daya manusia juga merupakan daya tarik investasi yang cukup penting, karena teknologi yang dipakai oleh para pengusaha makin lama makin modern. Teknologi modern tersebut menuntut ketrampilan lebih dari tenaga kerja.
- f. Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang mendukung antara lain menyangkut peraturan tentang pemutusan hubungan kerja (PHK), Upah Minimum, kontrak kerja dan lain-lain.
- g. Stabilitas politik dan keamanan juga penting bagi investor karena akan menjamin kelangsungan investasinya untuk jangka panjang.

Realisasi dari kinerja yang ditetapkan telah melampaui dari target yang ditetapkan. Adapun penetapan target kinerja realisasi investasi ditetapkan secara kolektif oleh Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kota Pangkal Pinang yang terus menciptakan iklim investasi yang kondusif. Adapun upaya dan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pangkal Pinang diantaranya :

- 1. adanya call center/WA/Website dinas yang dapat dihubungi terkait konsultasi/pengaduan pelayanan perizinan/penanaman modal;
- 2. adanya pendampingan pengisian LKPM, baik di kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu maupun di perusahaan;
- 3. adanya Bimbingan Teknis/Sosialisasi implementasi pengawasan Perizinan Berusaha berbasis Risiko bagi para pelaku usaha/perusahaan;
- 4. adanya pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

Berikut ini faktor-faktor yang dapat menghambat peningkatan nilai realisasi investasi PMDN di tahun 2024 :

- a. Adanya penyesuaian item belanja pada DPA dengan Juknis BKPM;

- b. Rendahnya kesadaran perusahaan dalam melaporkan LKPM;
- c. Keterbatasan petugas dalam menggunakan sistem pengawasan berbasis OSS RBA.

Solusi yang telah dilakukan terkait faktor penghambat diatas :

- a. melakukan pergeseran/perubahan item belanja sesuai dengan juknis bkpm.
- b. telah dilaksanakan bimbingan terhadap perusahaan mengenai penginputan lkpm.
- c. telah dilaksanakan pengawasan ke perusahaan;
- d. mengajukan usulan pelatihan bagi petugas.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel II.34
Pengukuran Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA (%)	EFISIENSI ANGGARAN (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.995.582.786,00	4.088.513.535,00	81,84	-18,16
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.257.305.482,00	3.562.842.180,00	83,69	-16,31
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.000.000,00	0,00	0,00	-100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	142.663.300,00	128.236.733,00	89,89	-10,11
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	398.210.612,00	273.709.611,00	68,73	-31,27
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162.403.392,00	123.725.011,00	76,18	-23,82
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	210.678.480,00	171.728.487,00	81,51	-18,49
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	210.678.480,00	171.728.487,00	81,51	-18,49
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	128.915.088,00	123.513.732,00	95,81	-4,19
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	128.915.088,00	123.513.732,00	95,81	-4,19
TOTAL	5.335.176.354,00	4.383.755.75,00	82,17	-17,83

Sumber: DPMPSTSP Kota Pangkal Pinang, data diolah, 2026

Sasaran strategis meningkatnya hasil evaluasi kinerja layanan penanaman modal dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.335.176.354,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp.4.383.755.75,00 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 82,17%. Untuk menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian sasaran meningkatnya hasil

evaluasi kinerja layanan penanaman modal didukung oleh program dan kegiatan yang ada di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang yaitu :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- b. Program Pelayanan Penanaman Modal, kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota;
- c. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal, kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Sumber pembiayaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD tahun anggaran 2025.

Sasaran 11 : Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar
Indikator : Indeks Infrastruktur
Akses Rumah Layak Huni

Sasaran strategis kesebelas yaitu meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar diukur melalui indikator kinerja yaitu Indeks Infrastruktur. Adapun indikator kinerja Indeks Infrastruktur dikoordinir oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Daerah.

Tabel II.35
Capaian Kinerja Sasaran ke 11: Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPD Tahun 2026	Capaian s.d. 2024 terhadap 2026 (%)	Capaian s.d. 2025 terhadap 2026 (%)
Indeks Infrastruktur	Indeks (%)	2025	91,31	95,11	104%	92,56	101%	102%

Sumber: Dinas PUPR dan Disperkim Kota Pangkal Pinang, data diolah, 2026

INDEKS INFRASTRUKTUR

Nilai Indeks Infrastruktur merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur nilai pencapaian ketersediaan infrastruktur dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pangkal Pinang berdasarkan perhitungan dari beberapa komponen penghitungan yaitu :

- a. Jalan dalam kondisi baik
- b. Keluarga dengan akses terhadap air minum layak
- c. Keluarga dengan akses sanitasi layak
- d. Keluarga pengguna Listrik PLN dan Non PLN
- e. Keluarga dengan akses sinyal telepon dan internet

Melalui perhitungan beberapa komponen tersebut, nilai capaian dari masing-masing komponen dihitung dengan proporsi yang sudah ditetapkan dan dijumlahkan berdasarkan nilai indeks dari perhitungan berdasarkan proporsi masing-masing komponen. Maka, capaian yang didapat pada tahun 2025 adalah 95,11 persen dari target RPD Kota Pangkal Pinang yaitu 91,31.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Faktor Penghambat dalam pencapaian Indeks Infrastruktur di Kota Pangkal Pinang antara lain:

1. Kenaikan harga upah bahan material pada tahun 2025;
2. Adanya *tagging* dan *refocussing* anggaran karena keterbatasan kapasitas fiskal daerah menyebabkan belum semua program pembangunan infrastruktur dapat dilaksanakan secara optimal. Kebutuhan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur seperti jalan, drainase, air minum dan sanitasi masih cukup besar, sementara alokasi anggaran yang tersedia harus dibagi dengan prioritas pembangunan sektor lainnya;
3. Kondisi Infrastruktur Eksisting yang Membutuhkan Penanganan Besar karena sebagian infrastruktur dasar di Kota Pangkal Pinang telah mengalami penurunan kondisi fungsi dan kualitas akibat usia teknis dan intensitas pemanfaatan. Hal ini mengakibatkan kebutuhan rehabilitasi dan peningkatan infrastruktur cukup tinggi sehingga memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih besar untuk meningkatkan nilai indeks infrastruktur secara signifikan;
4. Adanya perubahan koefisien pengali analisa yang menyebabkan perubahan harga analisa upah bahan sehingga mempengaruhi volume dari capaian target;

5. Sumber air baku tidak mencukupi untuk menyambung saluran rumah tangga di seluruh Kota Pangkal Pinang;
6. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat).

Berikut upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pangkal Pinang dalam mendorong pencapaian target Indeks Infrastruktur Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 antara lain :

- a. Fokus penggunaan anggaran untuk pencapaian target infrastruktur dasar dan SPM (Standar Pelayanan Minimum)
- b. Sistem penganggaran diprioritaskan pada usulan prioritas dari Musrenbang dan Pokok Pikiran DPRD
- c. Melakukan penyusunan Rencana Induk Pembangunan
- d. Percepatan proses pembebasan lahan Embung Eka Guna untuk sumber air baku Kota Pangkal Pinang

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel II.36
Program dan Kegiatan Sasaran (Indeks Infrastruktur)

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.643.830.704	1.187.584.464	72,24%	27,76%
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.643.830.704	1.187.584.464	72,24%	27,76%
Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	1.532.156.704	1.186.810.464	77,46%	22,54%
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	111.674.000	774.000	0,69%	99,31%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	11.197.534.950	11.089.605.450	99,04%	0,96%
PENGLOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.197.534.950	11.089.605.450	99,04%	0,96%
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	11.197.534.950	11.089.605.450	99,04%	0,96%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	342.330.982,00	319.337.097	93,28%	6,72%
PENGLOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	342.330.982,00	319.337.097	93,28%	6,72%
Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	254.880.982	238.540.310	93,59%	6,41%
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	87.450.000	80.796.787	92,39%	7,61%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	6.077.319.704	5.841.056.692	96,11%	3,89%
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.077.319.704	5.841.056.692	96,11%	3,89%

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	2.110.319.704	1.885.065.692	89,33%	10,67%
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	3.967.000.000	3.955.991.000	99,72%	0,28%
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	8.389.237.762	8.224.559.636	98,04%	1,96%
PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA	8.389.237.762	8.224.559.636	98,04%	1,96%
Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	100.450.000	99.800.000	99,35%	0,65%
Pembangunan Jalan	789.192.000	784.566.000	99,41%	0,59%
Rekonstruksi Jalan	4.847.310.450	4.785.926.000	98,73%	1,27%
Pemeliharaan Berkala Jalan	825.538.000	819.142.000	99,23%	0,77%
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	70.400.000,00	39.750.000	56,46%	43,54%
Pemeliharaan Rutin Jalan	1.756.347.312	1.695.375.636	96,53%	3,47%
TOTAL	27.650.254.102	26.662.143.339	96,43%	3,57%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, diolah, 2026

AKSES RUMAH LAYAK HUNI

Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya. Indikator Rasio Rumah Layak Huni diketahui dengan menghitung jumlah rumah tinggal layak huni terhadap seluruh rumah yang ada di Kabupaten Belitung timur. Dalam perhitungannya, semakin besar persentase rasio akan semakin baik.

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi kriteria kehandalan bangunan, menjamin kesehatan serta kecukupan luas minimum di suatu wilayah kerja, pada waktu tertentu. Kriteria kehandalan bangunan meliputi 1) handal pada struktur bawah/pondasi, 2) handal pada struktur tengah/kolom dan balak(beam) dan 3) handal pada struktur atas. Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi. Kecukupan luas minimum adalah luas minimal rumah layak huni antara 7,2 m2/orang sampai dengan 12 m2/orang dengan fungsi utama sebagai hunian yang terdiri dari ruang serbaguna/ruang tidur dan dilengkapi dengan kamar mandi. Kriteria rumah layak huni tidak menghilangkan penggunaan teknologi dan bahan bangunan daerah setempat sesuai kearifan lokal daerah untuk menggunakan teknologi dan bahan bangunan dalam membangun rumah layak huni.

Tabel II.37
Capaian Kinerja Sasaran ke 11: Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir RPD Tahun 2026	Capaian s.d. 2024 Terhadap 2026 (%)	Capaian s.d. 2025 Terhadap 2026 (%)
Akses Rumah Layak Huni	%	2024	97,20	97,43	100,20	98,80	101,40	104,29
		2025	98,00	94,73	96,66	98,80		

Faktor Penghambat dalam implementasi capaian akses RLH di Kota Pangkal Pinang antara lain:

1. Rumah Layak Huni yang dimaksud adalah rumah yang cukup secara luas 7,2 perkapita, kondisi dinding terluas dalam kondisi baik, jenis lantai terluas bukan tanah dan kondisi atap terluas tidak bocor
2. Keterbatasan anggaran pemerintah kota Pangkal Pinang dalam mengakomodasi semua jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang ada di Kota Pangkal Pinang
3. Tingkat pertumbuhan penduduk yang cepat, tanpa diimbangi dengan peningkatan jumlah dan kualitas rumah yang dibangun, menyebabkan banyak orang masih tinggal di rumah yang tidak memenuhi standar layak huni
4. Keterbatasan finansial/ tidak tercukupinya pendapatan masyarakat dalam mengakses rumah layak huni juga menjadi salah satu faktor belum mampu memiliki rumah layak huni

Berikut upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pangkal Pinang dalam mendorong peningkatan Akses Ketercapaian Rumah Layak Huni Kota Pangkal Pinang antara lain :

1. Berkolaborasi dan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, pusat dan CSR (BUMN, Swasta dan lainnya) dalam menyelesaikan permasalahan Rumah Tidak Layak Huni, pembagian peran untuk saling mendukung dalam penyelesaian masalah RTLH
2. Pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di Kota Pangkal Pinang sebagai wadah penyelenggaraan penanganan masalah permukiman melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar di tingkat kota maupun masyarakat.
3. Penyusunan kebijakan atau regulasi yang memastikan bahwa kawasan perumahan baru di lengkapi dengan infrastruktur Prasarana Sarana dan Utilitas yang memadai sehingga menjamin kualitas hunian yang layak.

Sasaran 12 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah pada waktu tertentu. IKLH merupakan gabungan dari

beberapa parameter lingkungan hidup, seperti kualitas air, udara, dan lahan. IKLH digunakan untuk :

- memberikan gambaran kondisi lingkungan hidup
- mendukung pengambilan keputusan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- menunjukkan pertanggungjawaban kepada publik terkait pencapaian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- sebagai instrumen keberhasilan pemerintah dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup

Perhitungan IKLH mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021. Kategori IKLH:

Sangat Baik: $90 \leq x \leq 100$,

Baik: $70 \leq x < 90$,

Sedang: $50 \leq x < 70$,

Kurang: $25 \leq x < 50$,

Sangat Kurang: $0 \leq x < 25$.

Parameter yang digunakan untuk menghitung IKLH: Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL).

Tabel II.38

Capaian Kinerja Sasaran ke 10 : Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPD Tahun 2026	Capaian s.d. 2024 terhadap 2026 (%)	Capaian s.d. 2025 terhadap 2026 (%)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	nilai	2024	60,98	65,26	107,02	69,63	93,72	101,63
		2025	69,33	70,77	102,08			

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkal Pinang, data diolah, 2026

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Indikator	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Alternatif Solusi
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	- Perubahan penggunaan lahan yang tidak terencana - Keterbatasan pengawasan dan penegakan hukum - Kurangnya kebijakan	- Restorasi dan rehabilitasi lahan - Kesadaran dan pendidikan lingkungan - Inisiatif corporate social responsibility (csr)	- Menambah RTH yang sudah di SK kan oleh Pemerintah Kota Pangkal Pinang. - Pemantauan dan Pemetaan Tutupan Lahan.

Indikator	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Alternatif Solusi
	pengelolaan lahan yang berkelanjutan - Perubahan iklim - Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi - Kurangnya kesadaran dan edukasi masyarakat - Keterbatasan data dan teknologi.	- Teknologi untuk monitoring dan pengelolaan lahan - Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lahan - Program konservasi berbasis komunitas.	- Diversifikasi Penggunaan Lahan, berupa peningkatan keanekaragaman Tanaman di kebun raya.
Indeks Kualitas Air	- Pencemaran dari limbah industri - Pencemaran dari limbah domestik - Perubahan iklim - Keterbatasan infrastruktur pengolahan air - Tingkat kesadaran yang rendah - Kebijakan pengelolaan sumber daya air yang lemah - Pertumbuhan penduduk yang pesat - Sampah plastik dan polusi mikroplastik - Faktor geologi dan alam.	- Kebijakan pemerintah yang mendukung pengelolaan air berkelanjutan - Edukasi dan kesadaran lingkungan masyarakat - Teknologi untuk pemantauan dan pengelolaan kualitas air - Restorasi dan rehabilitasi ekosistem perairan - Pemantauan dan penegakan hukum yang ketat - Pengurangan sampah plastik dan polusi mikroplastik.	- Pengurangan Pencemaran Limbah dan Kontaminasi, berupa pengawasan ketat terhadap Limbah B3. - Pengelolaan sampah dan limbah plastik. - Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum, berupa penegakan hukum terhadap pencemaran air dan pengawasan terhadap aktivitas penambangan dan industri.
Indeks Kualitas Udara	- Emisi kendaraan bermotor - Polusi dari industri - Penggunaan bahan bakar fosil - Keterbatasan teknologi pengendalian polusi - Kepadatan penduduk dan urbanisasi - Perubahan iklim.	- Penggunaan energi terbarukan - Penanaman pohon dan vegetasi - Kebijakan pemerintah - Pengurangan aktivitas pembakaran terbuka - Pengawasan dan pemantauan kualitas udara.	- Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan, berupa implementasi sistem pemantauan kualitas udara berbasis sensor yang dapat mengidentifikasi polutan secara real-time dan memberikan data yang akurat. - Penanaman Pohon dan Penghijauan, meningkatkan penghijauan dengan menanam pohon di kawasan perkotaan dan area terbuka untuk menyerap polutan udara, seperti CO_2, serta meningkatkan kualitas udara secara umum, seperti acara Semarak Babel.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan tugas pembantuan adalah urusan konkuren. Dengan demikian maka tugas pembantuan didefinisikan sebagai penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Penugasan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah berdasarkan asas tugas pembantuan ditetapkan dengan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, sedangkan penugasan oleh pemerintah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan gubernur. Tugas pembantuan ini menggunakan anggaran yang disediakan oleh yang menugasi dimana dokumen anggaran tugas pembantuan diserahkan oleh kepala daerah kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian rancangan APBD dalam dokumen yang terpisah agar dapat dilakukan pengawasan dalam pelaksanaannya.

Pertanggungjawaban dalam tugas pembantuan ini pada dasarnya adalah penerima tugas pembantuan harus bertanggung jawab pada pemberi penugasan. Akan tetapi bagi daerah kabupaten/kota yang menerima penugasan dari Pemerintah Pusat, selain bertanggung jawab pada pemerintah Pusat, maka bupati/wali kota juga harus melaporkan kepada Gubernur selaku wakil dari pemerintah Pusat di daerah.

Terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah juncto Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa Daerah harus melaporkan capaian kinerja tugas pembantuan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan bahwa pada tahun 2025 Pemerintah Kota Pangkalpinang tidak menerima penugasan baik dari pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka pada bab ini tidak terdapat kegiatan yang dilaporkan seperti halnya laporan pada tahun sebelumnya.

3.1. Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan oleh Kota Daerah Kab/Kota

3.1.1.Target Kinerja

-

3.1.2.Realisasi

-

3.2. Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan oleh Kab/Kota

3.2.1.Target Kinerja

-

3.2.2.Realisasi

-

3.3. Permasalahan dan Kendala

-

3.4. Saran dan Tindak Lanjut

-

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, trantibumlinmas serta sosial. Untuk pemerintah kabupaten/kota terdapat 29 (dua puluh sembilan) jenis layanan yang harus dilaksanakan guna memenuhi pelayanan minimal pada masyarakat.

Dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal, terdapat empat tahapan yang harus dipenuhi oleh setiap pemerintah daerah, yang meliputi tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Sedangkan untuk menghitung pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan Indeks Pencapaian SPM (IPSPM), yang meliputi dua aspek yaitu :

- pencapaian Mutu Layanan Dasar (barang, jasa dan sumber daya manusia); dan
- pencapaian Penerima Layanan Dasar.

Kategori nilai indeks pencapaian SPM (IPSPM) terhadap capaian mutu minimal dan penerima layanan dasar digolongkan sebagaimana berikut.

Tabel IV.1
Kategori Nilai Indeks Pencapaian SPM (IP_{SPM})

No	Nilai	Kategori
1	100	Tuntas Paripurna
2	90 – 99	Tuntas Utama
3	80 – 89	Tuntas Madya
4	70 – 79	Tuntas Pratama
5	60 – 69	Tuntas Muda
6	< 60	Belum Tuntas

Sumber : Permendagri 59 Tahun 2021

Untuk tahun 2025, nilai IP SPM Kota Pangkal Pinang adalah 94,74 dengan kategori Tuntas Utama. Terdapat dua bidang urusan yang capaiannya 100 persen, yaitu SPM bidang urusan Pekerjaan Umum dan SPM bidang perumahan rakyat. Dalam tabel berikut disajikan capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 untuk seluruh jenis layanan

Tabel IV.2
Capaian Standar Pelayanan Minimal Kota Pangkal Pinang Tahun 2025

No	Urusan / Sub bidang Urusan/ Jenis Layanan	Capaian (%)	OPD Pengampu
1	PENDIDIKAN	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.1. Pendidikan Anak Usia Dini	100	
	1.2. Pendidikan Dasar	100	
	1.3. Pendidikan Kesetaraan	100	
2	KESEHATAN	99,19	Dinas Kesehatan
	2.1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	98,63	
	2.2. Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan	99,76	
	2.3. Pelayanan Kesehatan bayi Baru lahir	99,33	
	2.4. Pelayanan Kesehatan Balita	99,36	
	2.5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	99,65	
	2.6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	97,89	
	2.7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	99,91	
	2.8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100	
	2.9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100	
	2.10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	97,78	
	2.11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100	
	2.12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	98	
3	PEKERJAAN UMUM	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	3.1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	100	
	3.2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100	
4	PERUMAHAN RAKYAT	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	4.1. Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	100	
	4.2. Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	
5	TRANTIBUMLINMAS	99,10	

No	Urusan / Sub bidang Urusan/ Jenis Layanan	Capaian (%)	OPD Pengampu
	5.1. Trantibum	100	Satpol PP
	5.1.1. Pelayanan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	100	
	5.2. Kebencanaan	98,33	BPBD
	5.2.1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana	98,00	
	5.2.2. Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	97,00	
	5.2.3. Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	100	
	5.3. Pemadam Kebakaran	98,97	Satpol PP
	5.3.1. Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	98,97	
6	SOSIAL	100	Dinas Sosial
	6.1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti	98,64	
	6.2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti	93,33	
	6.3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti	96,92	
	6.4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti	95	
	6.5. Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	100	

Sumber data : spm.bangda.kemendagri.go.id

4.1. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM Pendidikan) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal. Pelayanan dasar dalam hal ini adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar peserta didik, yang dibagi ke dalam beberapa jenis pelayanan dasar. Pelayanan dasar dimaksud harus diberikan sesuai dengan mutu yang telah ditentukan, dimana mutu tersebut terkait ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar Pendidikan sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.

4.1.1. Jenis Layanan Dasar

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis layanan dasar bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pangkal Pinang adalah sebagai berikut :

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar; dan
- c. pendidikan kesetaraan

Sedangkan ketentuan mengenai penerima layanan dan standar mutu layanan dasar bidang urusan pendidikan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Cakupan mutu pelayanan dasar SPM Pendidikan mencakup standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dan tata cara pemenuhan standar. Berikut uraian dari masing-masing cakupan tersebut.

a. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Standar jumlah dan kualitas barang yang harus dipenuhi dalam penerapan SPM Pendidikan adalah :

a.1. Standar Satuan Pendidikan

Standar yang harus dipenuhi yang terdiri atas : standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

a.2. Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik

Kualitas dan Pemerataan Hasil Peserta Didik berlaku bagi jenis layanan SPM Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan yang terdiri atas :

- kompetensi literasi; dan
- kompetensi numerasi.

Tata cara pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Hasil Peserta Didik dilaksanakan dengan kegiatan :

- pembentukan komunitas belajar dan memastikan kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah/penilik, dan guru/pamong belajar/tutor terlibat aktif; dan
- penguatan kompetensi kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah/penilik, dan guru/pamong belajar/tutor melalui pelatihan, seminar dan/atau *workshop*.

a.3. Partisipasi dan Pemerataan Peserta Didik

Pendidikan Anak Usia Dini

Partisipasi dan Pemerataan Peserta Didik pada Layanan Pendidikan Anak Usia Dini terdiri atas :

- Angka Partisipasi Murni,

- Angka Partisipasi Sekolah dan
- perbandingan angka partisipasi sekolah kuintil terendah dengan kuintil tertinggi.

Sedangkan tata cara pemenuhan Partisipasi dan Pemerataan Peserta Didik pada jenis layanan Pendidikan Anak Usia Dini dilaksanakan melalui :

- pendataan warga masyarakat yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang tidak bersekolah;
- sosialisasi mengenai pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
- pemberian bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu;
- peningkatan jumlah desa yang memiliki layanan Pendidikan Anak Usia Dini paling sedikit 1 (satu) satuan Pendidikan Anak Usia Dini di setiap kelurahan;
- penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung; dan/atau
- penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar dan tertinggal.

Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Kesetaraan

Partisipasi dan Pemerataan Peserta Didik pada Layanan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan terdiri atas :

- Angka Partisipasi Kasar; dan
- Angka Partisipasi Sekolah.

Sedangkan tata cara pemenuhan Partisipasi dan Pemerataan Peserta Didik pada layanan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan dilaksanakan melalui :

- pendataan warga masyarakat yang berusia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang tidak bersekolah;
- pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus;
- penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung; dan/atau
- penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.

a.4. Kualitas dan Pemerataan Layanan

Pendidikan Anak Usia Dini

Kualitas dan pemerataan layanan Pendidikan Anak Usia Dini menggunakan indikator proporsi jumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang mendapatkan akreditasi B.

Sedangkan untuk memenuhi standar tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini, yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pelajaran;
- fasilitasi pertemuan guru dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
- pemberian layanan pendampingan bagi satuan Pendidikan Anak Usia Dini untuk peningkatan kualitas layanan;
- pemeriksaan kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan/atau
- pemeliharaan dan/atau perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak.

Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan

Kualitas dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan mencakup :

- Iklim keamanan
- Iklim kebhinekaan dan inklusivitas

Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan guna pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan Pendidikan adalah sebagai berikut :

- sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pelajaran;
- fasilitasi pertemuan guru dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;

- pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
- pemeriksaan kondisi bangunan satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan/atau
- pemeliharaan dan/atau perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat.

b. Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

b.1. Pendidikan Anak Usia Dini

Standar jumlah dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini meliputi jenis pendidik dan tenaga kependidikan, kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta jumlahnya.

1) Pendidik

Pendidik pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini adalah Guru Pendidikan Anak Usia Dini, dengan kualifikasi sebagai berikut :

- memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Bimbingan konseling atau Psikologi
- memiliki sertifikat pendidik untuk Pendidikan Anak Usia Dini.

Jumlah pendidik diukur dengan kecukupan jumlah guru ASN terhadap jumlah rombongan belajar pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

2) Tenaga kependidikan

Tenaga kependidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini terdiri atas:

- **Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini**, dengan kualifikasi antara lain berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak.
- **Pengawas Sekolah**, dengan ketentuan adalah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi, berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah atau sertifikat guru penggerak.

- **Penilik**, dengan ketentuan kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1).
- 3) Jumlah pengawas sekolah atau penilik diukur dengan rasio pengawas sekolah dan penilik terhadap jumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

b.2. Pendidikan Sekolah Dasar

Standar jumlah dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada jenjang Pendidikan Sekolah Dasar meliputi jenis pendidik dan tenaga kependidikan, kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta jumlahnya.

1) Pendidik

Jenis pendidik pada jenjang Sekolah Dasar terdiri atas Guru kelas, Guru Mata Pelajaran dan Guru Pembimbing Khusus bagi satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas.

Kualitas pendidik pada jenjang Sekolah Dasar adalah :

- memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan
- memiliki sertifikat pendidik

Jumlah pendidik diukur dengan :

- kecukupan formasi guru ASN untuk sekolah dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- Indeks Distribusi Guru

2) Tenaga Kependidikan

Jenis tenaga kependidikan pada jenjang Sekolah Dasar terdiri atas :

- **Kepala sekolah**, dengan ketentuan yaitu : memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak.
- **Pengawas sekolah**, dengan ketentuan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi, berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah atau sertifikat guru penggerak.

Jumlah pengawas sekolah diukur dengan rasio pengawas sekolah terhadap jumlah sekolah dasar

- **Tenaga penunjang lain** dengan ketentuan memiliki kualifikasi akademik paling rendah sekolah menengah atas/ sederajat.

b.3. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Standar jumlah dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama meliputi jenis pendidik dan tenaga kependidikan, kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta jumlahnya.

1) Pendidik

Jenis pendidik pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama terdiri atas :

- Guru mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan kurikulum,
- Guru bimbingan dan konseling
- Guru pembimbing khusus bagi satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas

Kualitas pendidik jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama meliputi :

- kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan
- memiliki sertifikat pendidik

Sedangkan untuk jumlah pendidik diukur dengan :

- kecukupan formasi guru ASN untuk sekolah menengah pertama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- Indeks Distribusi Guru

2) Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama terdiri atas :

- **Kepala Sekolah**, dengan ketentuan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak.
- **Pengawas Sekolah**, dengan ketentuan memiliki kualifikasi akademik paling rendah magister (S2) kependidikan dengan berbasis sarjana (S1) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi, berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik dan memiliki surat tanda tamat

pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah atau sertifikat guru penggerak.

Jumlah pengawas sekolah diukur dengan rasio pengawas sekolah terhadap jumlah sekolah menengah pertama.

- **Tenaga Penunjang Lainnya** dengan syarat memiliki kualifikasi akademik paling rendah sekolah menengah atas/ sederajat.

b.4. Pendidikan Kesetaraan

Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Kesetaraan terdiri atas jenis pendidik dan tenaga kependidikan, kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta jumlahnya pendidik dan tenaga kependidikan.

1) Pendidik

Jenis pendidik pada Pendidikan Kesetaraan merupakan pamong belajar dan/atau tutor Pendidikan Kesetaraan.

Ketentuan bagi pendidik pada Pendidikan Kesetaraan adalah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu.

Jumlah pendidik diukur dengan kecukupan formasi pamong belajar ASN untuk satuan Pendidikan Kesetaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Indeks Distribusi Guru.

2) Tenaga Kependidikan

Jenis tenaga kependidikan pada pendidikan kesetaraan terdiri atas :

- **Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan**, dengan ketentuan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)
- **Penilik**, dengan ketentuan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1).

Jumlah Penilik diukur dengan rasio penilik terhadap jumlah satuan Pendidikan Kesetaraan.

- **Tenaga Penunjang Lainnya**, dengan ketentuan memiliki kualifikasi akademik paling rendah sekolah menengah atas/ sederajat

Secara singkat, jenis dan mutu layanan dasar pada SPM Pendidikan Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel IV.3
Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan

Jenis Layanan	Penerima Layanan	Mutu Layanan
1. Pendidikan Anak Usia Dini	Peserta Didik yang berusia 5 - 6 tahun	1. Angka Partisipasi Sekolah 2. Angka Partisipasi Murni 3. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B 4. Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV 5. Rasio pengawas sekolah untuk PAUD 6. Kecukupan formasi guru ASN 7. Indeks distribusi guru 8. Proporsi PTK bersertifikat 9. Proporsi PTK penggerak*
2. Pendidikan Dasar (SD dan SMP)	Peserta Didik yang berusia 7 -15 tahun	1. Angka partisipasi kasar 2. Angka partisipasi sekolah 3. Kemampuan literasi 4. Kemampuan numerasi 5. Perbedaan Skor Literasi 6. Perbedaan Skor numerasi 7. Indeks iklim keamanan 8. Indeks iklim kebinekaan 9. Indeks iklim inklusivitas 10. Kecukupan formasi guru ASN 11. Indeks distribusi guru 12. Proporsi PTK bersertifikat 13. Proporsi PTK penggerak*
3. Pendidikan Kesetaraan	Peserta Didik yang berusia 7-18 tahun	1. Angka partisipasi kasar 2. Angka partisipasi sekolah 3. Kemampuan literasi 4. Kemampuan numerasi 5. Perbedaan Skor Literasi 6. Perbedaan Skor numerasi 7. Indeks iklim keamanan 8. Indeks iklim kebinekaan 9. Indeks iklim inklusivitas 10. Kecukupan formasi guru ASN 11. Indeks distribusi guru 12. Proporsi PTK bersertifikat 13. Proporsi PTK penggerak*

Sumber data :

- 1) Permendagri Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
- 2) Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan

4.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal setiap jenis layanan di bidang urusan pendidikan adalah seratus persen. Hal ini dimaksudkan agar setiap warga negara yang berhak menerima layanan dapat terpenuhi kebutuhannya sesuai dengan ketentuan

yang telah ditetapkan. Dalam tabel berikut disajikan target pencapaian SPM Pendidikan Kota Pangkal Pinang Tahun 2025, baik dari sisi penerima layanan maupun mutu layanannya.

Tabel IV.4
Target Pencapaian SPM Pendidikan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian
1	PENDIDIKAN USIA DINI		
			Target 100 % (SPM)
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (5-6 TAHUN) (Tidak Masuk ke Dalam Perhitungan)	%	100
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	6.430
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)		
	B. Jumlah mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/Dipenuhi
	1. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	67
	2. Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	63,4
2	PENDIDIKAN DASAR		Target 100 % (SPM)
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (7-12 tahun) SD (tidak masuk ke dalam perhitungan)	%	100
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (13-15 tahun) SMP (tidak masuk ke dalam perhitungan)	%	100
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	36.321
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)		
	B. Jumlah mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/Dipenuhi
	SD (2025)		
	1. Kemampuan literasi	Nilai	84.09
	2. Kemampuan numerasi	Nilai	75.79
	3. Indeks iklim keamanan	Nilai	74.98
	4. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	73.9
	5. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	58.53
	SMP (2025)		
	1. Kemampuan literasi	Nilai	91.26
	2. Kemampuan numerasi	Nilai	86.81
	3. Indeks iklim keamanan	Nilai	71.1

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian
	4. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	70.73
	5. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	59.85
3	PENDIDIKAN KESETARAAN		
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (7-18 tahun) KESETARAAN (Tidak Masuk Kedalam Perhitungan)	%	100
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	1.231
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)		
	Jumlah mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/Dipenuhi
	1. Angka Partisipasi Sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	%	100

Sumber : spm.bangda.kemendagri.go.id

4.1.3. Realisasi

Tabel IV.5
Realisasi Capaian SPM Pendidikan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian /output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100%
1	PENDIDIKAN USIA DINI		Target 100% (SPM)	APS Tahun N-1	Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N	100 %
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (5-6 tahun) (Tidak Masuk Kedalam Perhitungan)	%	100	100	0	100%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)				80%	80%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	6.430	6.430	0	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				20%	20%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	
	B. Jumlah mutu Barang/Jasa/SDM yang harus dilayani/dipenuhi					100%
	1. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	67	67	0	100%
	2. Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	63.4	63.4	0	100%
2	PENDIDIKAN DASAR		Target 100% (SPM)	APS Tahun N-1	Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N	100%
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (7-12 tahun) SD (tidak masuk ke dalam perhitungan)	%	100	100	0	100%

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian /output			Total Pencapaian
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (13-15 tahun) SMP (tidak masuk ke dalam perhitungan)	%	100	100	0	100%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)				80%	80%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	36.321	36.321	0	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				20%	20%
	B. Jumlah mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	
	SD (2025)					
	1. Kemampuan literasi	Nilai	84.09	84.09	0	100%
	2. Kemampuan numerasi	Nilai	75.79	75.79	0	100%
	3. Indeks iklim keamanan	Nilai	74.98	74.98	0	100%
	4. Indeks iklim kebhinnekaan	Nilai	73.9	73.9	0	100%
	5. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	58.53	58.53	0	100%
	SMP (2025)					
	1. Kemampuan literasi	Nilai	91.26	91.26	0	100%
	2. Kemampuan numerasi	Nilai	86.81	86.81	0	100%
	3. Indeks iklim keamanan	Nilai	71.1	71.1	0	100%
	4. Indeks iklim kebhinnekaan	Nilai	70.73	70.73	0	100%
	5. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	59.85	59.85	0	100%
3	PENDIDIKAN KESETARAAN					100%
			Target 100% (SPM)	APS Tahun N-1	Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N	
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (7-18 tahun) KESETARAAN Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	%	100	100	0	100%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)				80%	80%

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian /output			Total Pencapaian
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	1.231	1.231	0	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				20%	20%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	
	B. Jumlah mutu (Barang/Jasa/SDM) yang harus dipenuhi					100%
	1. Angka Partisipasi Sekolah (7-18 Tahun) Kesetaraan	%	100	100	0	100%

Sumber : spm.bangda.kemendagri.go.id

4.1.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran pendukung pemenuhan SPM Pendidikan Tahun 2025 sebesar Rp. 20,727.747.948,- yang dianggarkan melalui Program Pengelolaan Pendidikan dan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

4.1.5. Dukungan Personil

Upaya pemenuhan SPM Pendidikan diantaranya melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang. Dengan demikian, perlu adanya kolaborasi dan kerjasama yang solid antar bidang dan bagian terkait pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang guna melaksanakan program dan kegiatan pendukung SPM Pendidikan dimaksud. Berikut uraian personil pendukung pelaksanaan pelayanan SPM Pendidikan Kota Pangkal Pinang tahun 2024.

Tabel IV.6
SDM Pendukung Penerapan SPM Pendidikan Tahun 2025

No	Unit Kerja / Jabatan	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kota Pangkal Pinang	
	- Kepala Dinas	1
	- Sekretaris Dinas	1
	- Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	1
	- Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	1
	- Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan	1
	- Perencana Ahli Muda	1
	- Analis Keuangan Pusat dan Daerah	1
	- Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1
	- Pengembang Kurikulum Ahli Muda	1
	- Kepala Seksi Pendidikan Non Formal	1
	- Kepala Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal	1
	- Pengembang Kurikulum PAUD	1
	- Sub Koordinator Peserta Didik dan Pendidikan Karakter	1
	- Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar	1
	- Kepala Seksi Data Teknologi Informasi dan Komunikasi	1
	- Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Non Formal dan Tenaga Kebudayaan	1
	- Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar	1
	- Staf	68
2.	Satuan Pendidikan	
	SKB	
	- PNS	9

No	Unit Kerja / Jabatan	Jumlah
	- NON PNS	10
	TK Negeri	
	- PNS	37
	- NON PNS	298
	SD Negeri	
	- PNS	727
	- NON PNS	524
	SMP Negeri	
	- PNS	349
	- NON PNS	195
	Total	2.248

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan tahun 2024, terdapat beberapa masalah yang dihadapi. Permasalahan tersebut antara lain :

- data sebagian besar masih bersumber pada Rapor Pendidikan, sementara di Rapor Pendidikan masih banyak data yang belum tersedia
- sulit untuk melakukan perhitungan kebutuhan riil karena ada beberapa indikator kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi melalui APBD seperti halnya kecukupan guru ASN
- format perencanaan mencantumkan pula sub kegiatan yang hanya dibiayai oleh sumber dana APBD seperti misalnya penyediaan ASN sehingga jumlah total anggaran yang dibutuhkan tidak mencerminkan penganggaran daerah sesungguhnya

4.2. BIDANG URUSAN KESEHATAN

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia untuk dapat menjalankan kehidupannya secara layak. Sehingga pada dasarnya, pemenuhan kebutuhan kesehatan adalah tanggung jawab setiap warga negara. Akan tetapi mengingat karakteristik barang/jasa kesehatan tidak dapat diusahakan/diproduksi sendiri secara langsung oleh masing-masing warga negara, melainkan harus ada pihak lain yang secara khusus memproduksi dan menyediakan, maka penyediaan barang/jasa bidang kesehatan mutlak memerlukan keterlibatan pemerintah untuk menjamin ketersediaannya. Oleh karena itu, urusan kesehatan menjadi salah satu bagian dari urusan wajib yang berkaitan dengan

layanan dasar yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan ketentuan Standar Pelayanan Minimal.

Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan atau SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar minimal bidang kesehatan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara. Selanjutnya secara lebih rinci, penerapan SPM Kesehatan di Kota Pangkal Pinang dapat dilihat dalam uraian berikut.

4.2.1. Jenis Layanan Dasar

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, jenis dan mutu layanan dasar bidang kesehatan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel IV.7
Jenis dan Mutu Layanan Dasar Pada Bidang Kesehatan

Jenis Layanan	Mutu Layanan
1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1. Vaksin Tetanus Difteri (Td) 2. Tablet tambah darah 3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan 4. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB 5. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah 6. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin 7. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV 8. Kartu ibu/rekam medis ibu 9. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 10. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) 11. Gel USG, untuk Puskesmas yang memiliki alat USG 12. Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Obgyn 13. Tenaga kesehatan : Bidan 14. Tenaga kesehatan : Perawat 15. Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian 16. Tenaga kesehatan : Tenaga gizi 17. Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6)
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1. Formulir Partograf 2. Kartu ibu (rekam medis) 3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 4. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) 5. Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan 6. Tenaga kesehatan : Bidan 7. Tenaga kesehatan : Perawat 8. Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian 9. Tenaga kesehatan : Tenaga gizi

Jenis Layanan	Mutu Layanan
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1. Vaksin Hepatitis B dosis tunggal 2. Vitamin K1 injeksi 3. Salep/tetes mata antibiotik 4. Formulir bayi baru lahir 5. Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) 6. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 7. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) 8. Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak 9. Tenaga kesehatan : Bidan 10. Tenaga kesehatan : Perawat 11. Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian 12. Tenaga kesehatan : Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku 13. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi 14. Kader Kesehatan
4. Pelayanan Kesehatan Balita	1. Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku 2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK) 3. Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA) 4. Vitamin A Biru 5. Vitamin A Merah 6. Vaksin imunisasi dasar: BCG 7. Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes 8. Vaksin imunisasi dasar: IPV 9. Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib 10. Vaksin imunisasi dasar: Campak Rubella 11. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib 12. Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella 13. Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella 14. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP) 15. Peralatan Anafilaktik 16. Formula Terapi Gizi Buruk 17. Tenaga kesehatan : Dokter 18. Tenaga kesehatan : Bidan 19. Tenaga kesehatan : Perawat 20. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi 21. Guru PAUD 22. Kader kesehatan
5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	1. Buku raport kesehatanku 2. Buku pemantauan kesehatan 3. Kuesioner skrining kesehatan 4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah 5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah 6. Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah 7. Alat Pemeriksaan Hb 8. Strip Hb sasaran remaja Putri kelas 7 9. Media Promosi kesehatan 10. Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) 11. Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi 12. Tenaga kesehatan : Bidan 13. Tenaga kesehatan : Perawat 14. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi 15. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian 16. Tenaga Kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat 17. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru 18. Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor

Jenis Layanan	Mutu Layanan
6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	1. Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) 2. Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA) 3. Alat : Tensimeter 4. Alat : Glukometer 5. Alat : Pemeriksa Hb 6. Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol 7. Alat : KIT IVA Tes 8. Strip dan Reagen pemeriksaan Hb 9. Kit Ophthalmologi komunitas 10. Kuesioner PUMA 11. Alat Pelayanan KB a. Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) b. Set pemasangan dan pencabutan Implan c. Vasektomi set 12. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) 13. Vaksin Tetanus Difteri (Td) 14. Tenaga kesehatan : Dokter 15. Tenaga kesehatan : Bidan 16. Tenaga kesehatan : Perawat 17. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi 18. Tenaga Kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat 19. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu
7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	1. Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter 2. Glukometer/alat pemeriksaan gula darah 3. Alat pemeriksaan kolesterol 4. Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol 5. Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel) 6. Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya 7. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) 8. Tenaga kesehatan : Dokter 9. Tenaga kesehatan : Bidan 10. Tenaga kesehatan : Perawat 11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi 12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat 13. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1. Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) 2. Obat Hipertensi 3. Tensimeter 4. Formulir pencatatan dan pelaporan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku) 5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) 6. Tenaga medis : Dokter 7. Tenaga kesehatan : Bidan 8. Tenaga kesehatan : Perawat 9. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi 10. Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku 11. Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian

Jenis Layanan	Mutu Layanan
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	12. Tenaga kesehatan :Tenaga Kesehatan Masyarakat 1. Obat Diabetes Melitus 2. Fotometer atau Glukometer 3. BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet 4. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas) 5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) 6. Tenaga medis : Dokter 7. Tenaga kesehatan : Bidan 8. Tenaga kesehatan : Perawat 9. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian 10. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat 11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi 12. Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)
10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	1. Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia) 2. Penyediaan Psikofarmaka 3. Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi 4. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan 5. Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) 6. Tenaga medis : Dokter 7. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa 8. Tenaga profesional lainnya 9. Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa
11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) 2. Reagen Zn TB 3. Masker bedah dan Masker N95 4. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering 5. Catridge tes cepat molekuler 6. Formulir pencatatan dan pelaporan 7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP) 8. Tuberkulin 9. Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru 10. Tenaga kesehatan : Perawat 11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian 12. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat 13. Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM) 14. Tenaga kesehatan : Radiografer 15. Kader Kesehatan
12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	1. Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner) 2. Tes cepat HIV (RDT) pertama 3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai 4. Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK

Jenis Layanan	Mutu Layanan
	5. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin 6. Tenaga kesehatan : Bidan 7. Tenaga kesehatan : Perawat 8. Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM) 9. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat 10. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan

4.2.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Penerapan SPM Kesehatan sebagaimana diuraikan di atas bertujuan agar seluruh penduduk Kota Pangkal Pinang dapat mendapatkan layanan kesehatan secara minimal. Secara rinci, target pencapaian SPM Kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan diuraikan sebagai berikut.

Tabel IV.8
Target Pencapaian SPM Kesehatan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian	Target Capaian kinerja (%)
1.	PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL			100
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	3.305	
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)			
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	
	1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	ampul	2.644	
	2. Tablet tambah darah	tablet	594.900	
	3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	paket	3.305	
	4. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	paket	3.305	
	5. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	paket	3.305	
	6. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari ibu hamil)	paket	495	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian	Target Capaian kinerja (%)		
	7. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	paket	3.305			
	8. Kartu ibu/rekam medis ibu	paket	3.305			
	9. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	buku	3.305			
	10. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	paket	9			
	11. Gel USG	botol	220			
	12. Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis ObGyn	orang	59			
	13. Tenaga kesehatan : Bidan	orang	106			
	14. Tenaga kesehatan : Perawat	orang	147			
	15. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	orang	9			
	16. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	orang	25			
	17. Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6)	orang	3.305			
	2.	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN				100
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani			
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	3.305			
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi			
	1. Formulir Partograf	formulir	3.305			
2. Kartu ibu (rekam medis)	paket	3.305				
3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	buku	3.305				
4. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	paket	9				
5. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	orang	59				
6. Tenaga kesehatan : Bidan	orang	106				
7. Tenaga kesehatan : Perawat	orang	147				
8. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	orang	9				
9. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	orang	25				
3.	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR			100		
Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani				
A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	3.191				
Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)						
B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi				
1. Vaksin Hepatitis B dosis tunggal (prefilled single)	vaksin	3.191				
2. Vitamin K1 injeksi	ampul	3.191				

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian	Target Capaian kinerja (%)		
	3. Salep/tetes mata antibiotik	orang	3.191			
	4. Formulir bayi baru lahir	formulir	3.191			
	5. Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	orang	9.537			
	6. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	buku	3.305			
	7. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	paket	9			
	8. Tenaga medis Dokter/dokter spesialis Anak	orang	52			
	9. Tenaga kesehatan : Bidan	orang	106			
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	orang	147			
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	orang	9			
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	orang	19			
	13. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	orang	45			
	14. Kader Kesehatan	orang	830			
	4.	PELAYANAN KESEHATAN BALITA				100
		Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	
A. Jumlah yang Harus Dilayani		Orang	13.124			
Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)						
B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi			
1. Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku		dokumen	13.124			
2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)		formulir	13.124			
3. Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)		buku	4.645			
4. Vitamin A Biru		kapsul	1.616			
5. Vitamin A Merah		kapsul	13.124			
6. Vaksin imunisasi dasar: BCG		vaksin	3.364			
7. Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes		vaksin	3.364			
8. Vaksin imunisasi dasar: IPV		orang	3.364			
9. Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib		Vaksin	3.364			
10. Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella		vaksin	3.364			
11. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib		vaksin	3.866			
12. Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella		vaksin	3.866			
13. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)		vaksin	7.230			
14. Peralatan Anafilaktik		vaksin	9			
15. Formula Terapi Gizi Buruk		vaksin	1.500			
16. Tenaga medis : Dokter		unit	47			
17. Tenaga kesehatan : Bidan		paket	106			
18. Tenaga kesehatan : Perawat		paket	147			
19. Tenaga kesehatan : Tenaga gizi		orang	25			
20. GURU PAUD		orang	42			

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian	Target Capaian kinerja (%)
	21. Kader Kesehatan	orang	42	
5.	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR			100
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	39.823	
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)			
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	
	1. Buku raport kesehatanku	buku	39.823	
	2. Buku pemantauan kesehatan	buku	254	
	3. Kuesioner skrining kesehatan	dokumen	39.823	
	4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	dokumen	158	
	5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	formulir	254	
	6. Tenaga kesehatan : Dokter/ Dokter gigi	orang	649.844	
	7. Alat Pemeriksaan Hb	alat	9	
	8. Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	strip	2.090	
	9. Media promosi kesehatan	paket	9	
	10. Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	vaksin	13.475	
	11. Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	orang	65	
	12. Tenaga kesehatan : Bidan	orang	106	
	13. Tenaga kesehatan : Perawat	orang	147	
	14. Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	orang	25	
	15. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	orang	9	
	16. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	orang	9	
	17. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	orang	9	
	18. Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	orang	9	
6.	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF			100
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	orang	154.836	
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)			
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dinenuhi	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian	Target Capaian kinerja (%)	
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	paket	9		
	2. Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	unit	9		
	3. Alat : Tensimeter	unit	9		
	4. Alat : Glukometer	unit	18		
	5. Alat : Alat Pemeriksa Hb	unit	99		
	6. Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas Alkohol	unit	154.836		
	7. Alat : KIT IVA Tes	unit	9		
	8. Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	unit	0		
	9. Kit Ophthalmologi Komunitas	unit	9		
	10. Kuesioner PUMA	dokumen	9		
	11. Alat Pelayanan KB	unit	0		
	12. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	dokumen	9		
	13. Vaksin Tetanus Difteri (td)	ampul	9		
	14. Tenaga medis : Dokter	orang	18		
	15. Tenaga kesehatan : Bidan	orang	18		
	16. Tenaga kesehatan : Perawat	orang	18		
	17. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	orang	9		
	18. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	orang	9	100	
	19. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	orang	18		
7.	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT				
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani		
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	orang	24.723		
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi		
	1. Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	paket	118		
	2. Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	paket	118		
	3. Alat pemeriksaan kolesterol	paket	118		
	4. Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	paket	24.723		
	5. Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS)/ Activity Daily Living (ADL Barthel)	paket	24.723		
	6. Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	buku	24.723		

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian	Target Capaian kinerja (%)
	7. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	paket	9	
	8. Tenaga medis : Dokter	orang	47	
	9. Tenaga kesehatan : Bidan	orang	106	
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	orang	147	
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	orang	25	
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	orang	9	
	13. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	orang	9	
8.	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI			100
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	orang	19.003	
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)			
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	
	1. Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	paket	18	
	2. Obat Hipertensi	paket	19.003	
	3. Tensimeter	unit	9	
	4. Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	aplikasi	9	
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	paket	9	
	6. Tenaga medis : Dokter	orang	18	
	7. Tenaga kesehatan : Bidan	orang	18	
	8. Tenaga kesehatan : Perawat	orang	18	
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	orang	9	
	10. Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	orang	9	
	11. Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	orang	9	
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	orang	9	
9.	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS			100
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	orang	5.063	
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)			
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian	Target Capaian kinerja (%)
	1. Obat Diabetes Melitus	paket	5.063	
	2. Fotometer atau Glukometer	unit	18	
	3. BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	unit	5.063	
	4. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	formulir	9	
	5. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	paket	9	
	6. Tenaga medis : Dokter	orang	18	
	7. Tenaga kesehatan : Bidan	orang	18	
	8. Tenaga kesehatan : Perawat	orang	18	
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	orang	9	
	10. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	orang	9	
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	orang	9	
	12. Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	orang	18	
10.	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT			100
Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	
A. Jumlah yang Harus Dilayani	orang	448		
Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				
B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi		
1. Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia)	buku	9		
2. Penyediaan Psikofarmaka	jenis	9		
3. Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi	formulir	9		
4. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	formulir	9		
5. Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	media	10		
6. Tenaga kesehatan : Dokter	orang	9		
7. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	orang	12		
8. Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	orang	0		
9. Tenaga profesional lainnya		9		

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian	Target Capaian kinerja (%)
11.	PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS			100
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	orang	4.399	
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)			
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	paket	13	
	2. Reagen Zn TB	kit	205	
	3. Masker bedah dan Masker N95	paket	10.315	
	4. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	paket	11.153	
	5. Catridge tes cepat molekuler	tes	4.399	
	6. Formulir pencatatan dan pelaporan	dokumen	2.162	
	7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	dokumen	12	
	8. Tuberkulin	vial	455	
	9. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	orang	45	
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	orang	34	
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	orang	20	
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	orang	20	
	13. Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	orang	20	
	14. Tenaga kesehatan : Radiografer	orang	15	
15. Kader Kesehatan	orang	19		
12.	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RESIKO TERINFEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH MANUSIA (HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS)			100
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	orang	6.050	
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM			
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	paket	14	
	2. Tes cepat HIV (RDT) pertama	test	6.050	
3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab. Plester. Lancet/Jarum Steril.	paket	6.050		

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian	Target Capaian kinerja (%)
	Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai			
4.	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	paket	6.050	
5.	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	orang	14	
6.	Tenaga kesehatan : Bidan	orang	6	
7.	Tenaga kesehatan : Perawat	orang	8	
8.	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	orang	14	
9.	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan Masyarakat	orang	0	
10.	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	orang	4	

Sumber data : Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang

4.2.3. Realisasi

Tabel IV.9
Realisasi Capaian SPM Kesehatan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian /output			Total Pencapaian (%)
	Kategori Indeks Pencapaian SPM		TUNTAS UTAMA			99,19
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					98,63
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)			Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	79,78
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	3.305	3.296	9	99,73
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					18.84
	B. Jumlah mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	94,22
	1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	ampul	2.644	3.296	+652	100
	2. Tablet tambah darah	tablet	549.900	593.280	1.620	99,73
	3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	paket	3.305	3.296	9	99,73
	4. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	paket	3.305	3.296	9	99,73
	5. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	paket	3.305	3.296	9	99,73
	6. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	paket	495	494	1	99,80
	7. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	paket	3.305	3.296	9	99,73
	8. Kartu ibu/rekam medis ibu	paket	3.305	3.296	9	99,73
	9. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	buku	3.305	3.296	9	99,73
	10. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	paket	9	9	0	100
	11. Gel USG	botol	220	9	211	4,09

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian /output			Total Pencapaian (%)
	12. Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan	orang	59	59	0	100
	13. Tenaga kesehatan : Perawat	orang	106	106	0	100
	14. Tenaga kesehatan : Bidan	orang	147	147	0	100
	15. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	orang	9	9	0	100
	16. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	orang	25	25	0	100
	17. Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6)	orang	3.305	3.296	9	99,73
2	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN					99,76
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	79,78
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	3.305	3.296	9	99,73
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					19,98
	B. Jumlah mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	99,91
	1. Formulir Partograf	formulir	3.305	3.296	9	99,73
	2. Kartu ibu (rekam medis)	paket	3.305	3.296	9	99,73
	3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	buku	3.305	3.296	9	99,73
	4. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	paket	9	9	0	100
	5. Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	orang	59	59	0	100
	6. Tenaga kesehatan : Bidan	orang	106	106	0	100
	7. Tenaga kesehatan : Perawat	orang	147	147	0	100
	8. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	orang	9	9	0	100
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	orang	25	25	0	100
3	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR					99,33

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian /output			Total Pencapaian (%)
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	79,42
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	3.191	3.168	23	99,28
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					
	B. Jumlah mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	
	1. Vaksin Hepatitis B dosis tunggal (<i>prefilled single</i>)	vaksin	3.191	3.266	+75	100
	2. Vitamin K1 injeksi	ampul	3.191	3.266	+75	100
	3. Salep/tetes mata antibiotik	orang	3.191	3.168	23	99,28
	4. Formulir bayi baru lahir	formulir	3.191	3.168	23	99,28
	5. Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	orang	9.573	9.504	69	99,28
	6. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	buku	3.305	3.168	137	95,85
	7. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	paket	9	9	0	100
	8. Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak	orang	52	52	0	100
	9. Tenaga kesehatan : Bidan	orang	106	106	0	100
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	orang	147	147	0	100
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian		9	9	0	100
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	orang	9	9	0	100
	13. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	orang	25	25	0	100
	14. Kader Kesehatan	orang	42	42	0	100
4	PELAYANAN KESEHATAN BALITA					99,36
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	79,93
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	13.124	13.112	12	99,91

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian /output			Total Pencapaian (%)
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					19,43
B.	Jumlah mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	97,15
1.	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	dokumen	13.124	13.112	12	99,91
2.	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	formulir	13.124	13.112	12	99,91
3.	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	orang	4.645	4.645	0	100
4.	Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	kapsul	1.616	1.360	256	84,16
5.	Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	kapsul	13.124	13.659	+535	100
6.	Vaksin imunisasi dasar: BCG	vaksin	3.364	3.233	131	96,11
7.	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	vaksin	3.364	3.255	109	96,76
8.	Vaksin imunisasi dasar: IPV	vaksin	3.364	3.213	151	95,51
9.	Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	vaksin	3.364	3.232	132	96,08
10.	Vaksin imunisasi dasar: Campak Rubella	vaksin	3.364	3.234	130	96,14
11.	Vaksin imunisasi lanjutan: DPT -HB -Hib	vaksin	3.866	3.505	361	90,66
12.	Vaksin imunisasi lanjutan: Campak Rubella	vaksin	3.866	3.550	316	91,83
13.	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	vaksin	7.230	6.738	492	93,20
14.	Peralatan Anafilaktik	vaksin	9	9	0	100
15.	Formula Terapi Gizi Buruk	paket	1.500	1.500	0	100
16.	Tenaga medis : Dokter	orang	47	47	0	100
17.	Tenaga kesehatan : Bidan	orang	106	106	0	100
18.	Tenaga kesehatan : Perawat	orang	147	147	0	100
19.	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	orang	25	25	0	100
20.	Guru PAUD	orang	42	42	0	100
21.	Kader Kesehatan	orang	42	42	0	100

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian /output			Total Pencapaian (%)
5	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR					99,65
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	80
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang				100
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					19,65
	B. Jumlah mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	98,26
	1. Buku raport kesehatanku	buku	39.823	39.823	0	100
	2. Buku pemantauan kesehatan	buku	254	409	+155	100
	3. Kuesioner skrining kesehatan	dokumen	39.823	39.823	0	100
	4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	dokumen	158	158	0	100
	5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	formulir	254	254	0	100
	6. Tenaga kesehatan : Dokter/ Dokter gigi	orang	649.844	622.856	26.988	95,85
	7. Alat Pemeriksaan Hb	alat	9	9	0	100
	8. Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	strip	2.090	2.090	0	100
	9. Media promosi kesehatan	paket	9	9	0	100
	10. Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	vaksin	13.475	9.810	3.665	72,80
	11. Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	orang	65	65	0	100
	12. Tenaga kesehatan : Bidan	orang	106	106	0	100
	13. Tenaga kesehatan : Perawat	orang	147	147	0	100
	14. Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	orang	25	25	0	100
	15. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	orang	9	9	0	100
	16. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	orang	9	9	0	100
	17. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	orang	9	9	0	100

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian /output			Total Pencapaian (%)
	18. Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer counselor		9	9	0	100
6	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF					97,89
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	80
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang				100
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					17,89
	B. Jumlah mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	89,47
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	paket	9	9	0	100
	2. Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	unit	9	9	0	100
	3. Alat : Tensimeter	unit	9	9	0	100
	4. Alat : Glukometer	unit	9	9	0	100
	5. Alat : Alat Pemeriksa Hb	unit	9	9	0	100
	6. Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas Alkohol	unit	154.836	154.836	0	100
	7. Alat : KIT IVA Tes	unit	9	9	0	100
	8. Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	unit	0	0	0	0
	9. Kit Opthalmologi Komunitas	unit	9	9	0	100
	10. Kuesioner PUMA	dokumen	9	9	0	100
	11. Alat Pelayanan KB	unit	0	0	0	0
	a. Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	unit	0	0	0	0
	b. Set pemasangan dan pencabutan Implan	unit	0	0	0	0
	c. Vasektomi set	unit	0	0	0	0
	12. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	dokumen	9	9	0	100

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian /output			Total Pencapaian (%)
	13. Vaksin Tetanus Difteri (td)	ampul	9	9	0	100
	14. Tenaga medis : Dokter	orang	18	18	0	100
	15. Tenaga kesehatan : Bidan	orang	18	18	0	100
	16. Tenaga kesehatan : Perawat	orang	18	18	0	100
	17. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	orang	9	9	0	100
	18. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	orang	9	9	0	100
	19. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	orang	18	18	0	100
7	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT					99,91
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	79,92
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	24.723	24.697	26	99,89
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					20
	B. Jumlah mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	99,98
	1. Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	paket	118	118	0	100
	2. Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	paket	118	118	0	100
	3. Alat pemeriksaan kolesterol	paket	118	118	0	100
	4. Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	paket	24.723	24.697	26	99,89
	5. Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS)/ Activity Daily Living (ADL Barthel)	paket	24.723	24.697	26	99,89
	6. Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	buku	24.723	24.697	26	99,89
	7. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	paket	9	9	0	100
	8. Tenaga medis : Dokter	orang	47	47	0	100

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian /output			Total Pencapaian (%)
	9. Tenaga kesehatan : Bidan	orang	106	106	0	100
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	orang	147	147	0	100
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	orang	25	25	0	100
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	orang	9	9	0	100
	13. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	orang	9	9	0	100
8	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI					100
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	80
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	19.003	19.003	0	100
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					20
	B. Jumlah mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	100
	1. Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	paket	18	18	0	100
	2. Obat Hipertensi	paket	19.003	19.003	0	100
	3. Tensimeter	unit	9	9	0	100
	4. Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	aplikasi	9	9	0	100
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	paket	9	9	0	100
	6. Tenaga medis : Dokter	orang	18	18	0	100
	7. Tenaga kesehatan : Bidan	orang	18	18	0	100
	8. Tenaga kesehatan : Perawat	orang	18	18	0	100
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	orang	9	9	0	100
	10. Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	orang	9	9	0	100
	11. Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	orang	9	9	0	100

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian /output			Total Pencapaian (%)
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	orang	9	9	0	100
9	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS					100
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	80
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	5.063	5.063	0	100
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					20
	B. Jumlah mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	100
	1. Obat Diabetes Melitus	paket	5.063	5.063	0	100
	2. Fotometer atau Glukometer	unit	18	18	0	100
	3. BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	unit	5.063	5.063	0	100
	4. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	formulir	9	9	0	100
	5. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	paket	9	9	0	100
	6. Tenaga medis : Dokter	orang	18	18	0	100
	7. Tenaga kesehatan : Bidan	orang	18	18	0	100
	8. Tenaga kesehatan : Perawat	orang	18	18	0	100
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	orang	9	9	0	100
	10. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	orang	9	9	0	100
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	orang	9	9	0	100
	12. Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	orang	18	18	0	100

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian /output			Total Pencapaian (%)
10	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT					97,78
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	80
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	448	448	0	100
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					20
	B. Jumlah mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	100
	1. Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) (bentuk fisik atau elektronik)	buku	9	9	0	100
	2. Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	jenis	9	9	0	100
	3. Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	formulir	9	9	0	100
	4. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	formulir	9	9	0	100
	5. Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	media	10	10	0	100
	6. Tenaga kesehatan : Dokter	orang	9	9	0	100
	7. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	orang	9	9	0	100
	8. Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	orang	0	0	0	100
	9. Tenaga profesional lainnya	orang	9	9	0	100
11	PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS					100

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian /output			Total Pencapaian (%)
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	80
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	4.399	4.399	0	100
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					20
	B. Jumlah mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	100
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	paket	13	13	0	100
	2. Reagen Zn TB	kit	205	205	0	100
	3. Masker bedah dan Masker N95	paket	10.315	10.315	0	100
	4. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	paket	11.153	11.153	0	100
	5. Catridge tes cepat molekuler	tes	4.399	4.399	0	100
	6. Formulir pencatatan dan pelaporan	dokumen	2.162	2.162	0	100
	7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	dokumen	12	12	0	100
	8. Tuberkulin	vial	455	455	0	100
	9. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	orang	45	45	0	100
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	orang	34	34	0	100
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	orang	20	20	0	100
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	orang	20	20	0	100
	13. Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	orang	20	20	0	100
	14. Tenaga kesehatan : Radiografer	orang	15	15	0	100
	15. Kader Kesehatan	orang	19	19	0	100
12	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN					98

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian /output			Total Pencapaian (%)
	TUBUH MANUSIA (HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS)					
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	80
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	6.050	6.050	0	100
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					18
	B. Jumlah mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	90
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	paket	14	14	0	100
	2. Tes cepat HIV (RDT) pertama	test	6.050	6.050	0	100
	3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	paket	6.050	6.050	0	100
	4. Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	paket	6.050	6.050	0	100
	5. Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	orang	14	14	0	100
	6. Tenaga kesehatan : Bidan	orang	6	6	0	100
	7. Tenaga kesehatan : Perawat	orang	8	8	0	100
	8. Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	orang	14	14	0	100
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan Masyarakat	orang	0	0	0	0
	10. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	orang	4	4	0	100

4.2.4. Alokasi Anggaran

SPM Bidang Urusan kesehatan Tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan puskesmas yang ada di bawah koordinasinya dengan jumlah total anggaran Rp. 2.200.931.500,- dan teresalisasi Rp. 2.149.115.908,- atau terserap sebesar 97,65% yang dianggarkan melalui Program Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

4.2.5. Dukungan Personil

Pada tahun 2025, SDM pendukung penerapan SPM bidang Kesehatan dapat dilihat dalam uraian dalam tabel berikut.

Tabel IV.10
SDM Pendukung Penerapan SPM Kesehatan Kota Pangkal Pinang Tahun 2025

No	Jenis Layanan	Tenaga Kesehatan		
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	a. Dokter	: 59	orang
		b. Bidan	: 106	orang
		c. Perawat	: 147	orang
		d. Farmasi	: 9	orang
		e. Gizi	: 25	Orang
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	a. Dokter	: 59	orang
		b. Bidan	: 106	orang
		c. Perawat	: 147	orang
		d. Farmasi	: 9	orang
		e. Gizi	: 25	Orang
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	a. Dokter	: 52	orang
		b. Bidan	: 106	orang
		c. Perawat	: 147	orang
		d. Farmasi	: 9	orang
		e. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku	: 9	Orang
		f. Gizi	: 25	Orang
		g. Kader Kesehatan	: 42	Orang
4.	Pelayanan Kesehatan anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	a. Dokter	: 47	orang
		b. Bidan	: 106	orang
		c. Perawat	: 792	orang
		d. Ahli Gizi	: 25	orang
		e. Guru Paud	: 42	Orang
		f. Kader Keseehatan	: 42	Orang
5.	Pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	a. Dokter	: 65	orang
		b. Bidan	: 106	orang
		c. Perawat	: 147	orang
		d. Ahli Gizi	: 25	orang
		e. Farmasi	: 9	orang
		f. Tenaga Kesehatan Masyarakat	: 9	orang
		g. Tenaga Kesehatan Terlatih	: 9	Orang
6.	Pelayanan kesehatan warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	a. Dokter	: 18	Orang
		b. Bidan	: 18	orang
		c. Perawat	: 18	orang
		d. Ahli Gizi	: 9	orang
		e. Tenaga Kesehatan Masyarakat	: 9	orang

No	Jenis Layanan	Tenaga Kesehatan		
7.	Pelayanan skrining kesehatan pada masyarakat usia lanjut sesuai standar	a. Dokter	:	47 Orang
		b. Bidan	:	106 orang
		c. Perawat	:	147 orang
		d. Ahli Gizi	:	25 orang
		e. Tenaga Kesehatan Masyarakat	:	9 orang
		f. Kader Kesehatan Terlatih	:	9 Orang
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	a. Dokter	:	18 Orang
		b. Bidan	:	18 orang
		c. Perawat	:	18 orang
		d. Ahli Gizi	:	9 orang
		e. Tenaga Promosi Kesehatan	:	9 orang
		f. Tenaga Kesehatan Farmasi	:	9 orang
		g. Tenaga Kesehatan Masyarakat	:	9 orang
9.	Pelayanan kesehatan penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	a. Dokter	:	18 orang
		b. Bidan	:	18 orang
		c. Perawat	:	18 orang
		d. Farmasi	:	9 orang
		e. Ahli Gizi	:	9 orang
		f. Tenaga Kesehatan Masyarakat	:	9 orang
		g. Tenaga Kesehatan Teknis Medis Ahli Teknologi (ATLM)	:	18 orang
10.	Pelayanan kesehatan ODGJ berat sesuai standar	a. Tenaga Terlatih (terlatih jiwa)	:	9 orang
		b. Tenaga Profesional lain nya	:	0 orang
		c. Perawat terlatih jiwa	:	0 orang
11.	Pelayanan kesehatan terduga TB sesuai standar	a. Dokter	:	45 orang
		b. Perawat	:	34 orang
		c. Farmasi	:	20 orang
		d. Tenaga Kesehatan Masyarakat	:	20 orang
		e. Analis Teknik Laboratorium Medik	:	20 orang
		f. Penata Rontgen	:	15 orang
		g. Kader Kesehatan	:	19 orang
12.	Pelayanan kesehatan orang berisiko terinfeksi HIV sesuai standar	a. Dokter	:	14 orang
		b. Perawat	:	8 orang
		c. Bidan	:	6 orang
		d. Tenaga Non Kesehatan terlatih	:	4 orang
		e. Tenaga Kesehatan Masyarakat	:	0 orang
		f. ATLM	:	14 orang

Sumber data : Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang, 2025

4.2.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dalam penerapan SPM Kesehatan Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pada layanan Hipertensi, event yang dilaksanakan bertepatan dengan kegiatan lain sehingga hasil tidak maksimal
2. Dalam penentuan target penerima SPM masih terdapat kendala dalam masalah data
3. Belum optimalnya anggaran dalam penerapan SPM

4.3. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

Pada tahun 2025, SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum di Kota Pangkal Pinang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkal Pinang. Dalam uraian berikut, dijelaskan mengenai penerapan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum di Kota Pangkal Pinang tahun 2025.

4.3.1. Jenis Layanan Dasar

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis layanan dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

Sedangkan secara teknis, ketentuan mengenai penerapan SPM bidang urusan Pekerjaan Umum diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan materi muatan SPM Bidang Pekerjaan Umum yang terdiri atas jenis, mutu dan penerima pelayanan dasar. Berikut uraian singkat mengenai jenis mutu dan penerima layanan dasar SPM Pekerjaan Umum di Kota Pangkal Pinang.

Tabel IV.11
Jenis, Mutu dan Penerima Pelayanan Dasar SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Layanan	Mutu Layanan	Penerima Layanan
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	a. Ukuran kuantitas Air Minum sehari-hari dengan parameter sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari melalui SPAM b. Ukuran kualitas Air Minum dengan parameter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan	Warga Negara, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui SPAM
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	a. Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik dengan parameter yaitu setiap rumah	Setiap Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, terutama

No	Jenis Layanan	Mutu Layanan	Penerima Layanan
		memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik b. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik dengan parameter : 1) Pelayanan akses aman, merupakan fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi dengan : - tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; atau - sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T 2) Pelayanan akses layak, merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septik sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu yang berdomisili pada area berisiko pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air

Sumber : Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2023

4.3.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Target kinerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang urusan Pekerjaan Umum sama hal nya dengan target kinerja pencapaian urusan lainnya, yaitu 100 persen. Target capaian ini terbagi menjadi dua komponen yaitu penerima layanan dan mutu barang/jasa maupun SDM nya. Berikut adalah target pencapaian Standar Pelayanan

Minimal bidang urusan Pekerjaan Umum Kota Pangkal Pinang yang ditetapkan untuk tahun 2025.

Tabel IV.12
Target Pencapaian SPM Pekerjaan Umum Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TARGET PENCAPAIAN/TARGET INDIKATOR
1	PENYEDIAAN KEBUTUHAN POKOK AIR MINUM SEHARI-HARI	%	100
			Rekap Target (Harus Dilayani)
	JUMLAH PENERIMA LAYANAN DASAR S.D. KONDISI SAAT INI (REKAPITULASI) tidak masuk dalam hitungan	Orang	2000
	Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar (80%)		
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	2000
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)		
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/Dipenuhi
	JARINGAN PERPIPAAN		
	Kuantitas SPAM		
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon	Rumah Tangga	500
	Kualitas SPAM		
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	Rumah Tangga	500
2	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN		
	Kuantitas SPAM		
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	0
	Kualitas SPAM		
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.	Rumah Tangga	0
	PENYEDIAAN PELAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK	%	100

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TARGET PENCAPAIAN/TARGET INDIKATOR
			Rekap Target (Harus Dilayani)
	JUMLAH PENERIMA LAYANAN DASAR S.D. KONDISI SAAT INI (REKAPITULASI) tidak masuk dalam hitungan		200
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	200
	Persentase Pencapaian Layanan Dasar (20%)		
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/Dipenuhi
	Kuantitas SPALD		
	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	50
	Kualitas SPALD		
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)		
	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Mutu Tidak Boleh Ditutup Semua		
	1. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	50
	2. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	0

Sumber : spm.bangda.kemendagri.go.id

4.3.3. Realisasi

Tabel IV.13
Realisasi Capaian SPM Pekerjaan Umum Tahun 2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian /output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100%
1	PENYEDIAAN KEBUTUHAN POKOK AIR MINUM SEHARI-HARI					100%
			Rekap Target (Harus Dilayani)	Rekap Capaian (Terlayani)	Selisih	
	JUMLAH PENERIMA LAYANAN DASAR S.D. KONDISI SAAT INI (REKAPITULASI) tidak masuk dalam hitungan	orang	2.000	2.000	0	
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)				80%	80%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	2.000	2.000	0	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				20%	20%
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	100%
	JARINGAN PERPIPAAN					
	Kuantitas SPAM					
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan	Rumah Tangga	500	500	0	100%

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian /output		Total Pencapaian	
	perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)					
	Kualitas SPAM					
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	Rumah Tangga	500	500	0	100%
	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN	(tutup mutu)				
	Kuantitas SPAM					
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	-	-	-	-
	Kualitas SPAM					
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.	Rumah Tangga	-	-	-	-
2	PENYEDIAAN PELAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK					100%
			Rekap Target (Harus Dilayani)	Rekap Capaian (Terlayani)	Selisih	
	JUMLAH PENERIMA LAYANAN DASAR S.D. KONDISI SAAT INI (REKAPITULASI) *tidak masuk dalam hitungan	Orang	200	200	0	
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)					
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	200	200	0	100%

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian /output		Total Pencapaian	
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				20%	20%
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	
	KUANTITAS SPALD					
	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	50	50	0	100%
	KUALITAS SPALD					
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)					
	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota)	Rumah Tangga	50	50	0	100%
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)					
	*Mutu Tidak Boleh Ditutup Semua					
	1. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	50	50	0	100%
	2. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah	Rumah Tangga	- (tutup mutu)	- (tutup mutu)	- (tutup mutu)	- (tutup mutu)

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian /output			Total Pencapaian
	perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar					

Sumber : spm.bangda.kemendagri.go.id

4.3.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang tersedia bagi layanan Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum di Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 adalah Rp. 11.543.915.932,- dan terealisasi Rp.11.189.107.432 atau sebesar 96,93%.

4.3.5. Dukungan Personil

SPM Pekerjaan Umum di Kota Pangkal Pinang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Pangkal Pinang, khususnya di Bidang Cipta Karya, Tim Pengelola Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Perumda Tirta Pinang. secara lebih rinci mengenai sumber daya pelaksana SPM Pekerjaan Umum Kota Pangkal Pinang adalah sebagai berikut.

- a. Dinas Pekerjaan Umum sebanyak 8 orang
- b. Tim Pengelola Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja sebanyak 7 orang
- c. Perumda Tirta Pinang sebanyak 8 orang

4.3.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan SPM Pekerjaan Umum Tahun 2025 di Kota Pangkal Pinang adalah ketersediaan anggaran penerapan SPM masih belum maksimal, sehingga belum seluruh kegiatan pendukung SPM bidang urusan pekerjaan umum dapat terakomodir dengan maksimal. Solusi untuk masalah ini adalah memaksimalkan perencanaan dan penganggaran dalam APBD Tahun 2026.

4.4. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Pada tahun 2025, SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat di Kota Pangkal Pinang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkal Pinang. Dalam uraian berikut, dijelaskan mengenai penerapan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat di Kota Pangkal Pinang tahun 2025.

4.4.1. Jenis Layanan Dasar

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis layanan dasar SPM Perumahan Rakyat terdiri atas 2 (dua) layanan, yaitu :

- penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan

- fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota

Sedangkan teknis pemenuhan SPM Perumahan diatur dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang materinya terdiri atas jenis, mutu dan penerima pelayanan dasar SPM Perumahan Rakyat.

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota

Jenis layanan ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut :

- rehabilitasi rumah;
- pembangunan kembali rumah;
- pemukiman kembali; dan
- bantuan akses rumah sewa layak huni.

Standar mutu dari pelaksanaan jenis layanan ini, yaitu :

- **Standar mutu barang**, yang dihitung terhadap jenis kegiatan rehabilitasi rumah, pembangunan kembali rumah dan pemukiman kembali;
- **Standar mutu jasa**, yang dihitung terhadap jenis kegiatan bantuan akses rumah sewa layak huni.

b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota

Jenis layanan ini dilaksanakan melalui kegiatan :

- penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan; atau
- bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni.

Standar mutu dari pelaksanaan jenis layanan ini, yaitu :

- **Standar mutu barang**, yang dihitung terhadap jenis layanan penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk pembangunan kembali dengan kriteria pemenuhan meliputi indikator Rumah Layak Huni;
- **Standar mutu jasa**, dihitung terhadap jenis layanan penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk penggantian uang dengan kriteria pemenuhan meliputi nilai besaran penggantian aset tanah dan/atau bangunan, bantuan akses sewa Rumah Layak Huni untuk subsidi uang sewa meliputi besaran dan jangka waktu pemberian subsidi uang sewa serta bantuan akses sewa Rumah

Layak Huni untuk akses tinggal Rumah Layak Huni milik Pemerintah Daerah jangka waktu pemberian akses tinggal.

4.4.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka target pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang urusan Perumahan Rakyat Kota Pangkal Pinang tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel IV.14
Target Penerapan SPM Perumahan Rakyat Tahun 2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian / Target Indikator
1	PENYEDIAAN & REHABITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA Bencana meliputi : a). Letusan gunung berapi; b). Gempa bumi; c). Tanah longsor; d). Gelombang pasang; e). Banjir bandang; dan/atau f). Bencana lainnya	%	100
	- Terjadi Bencana (Lampirkan SK Penetapan Bencana dari KDH)		
	- Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form Tahapan Penerapan (form 4A1, 4B6, 4B7, 4C3) dan dokumen teknis perencanaan bidang perumahan dan kawasan permukiman)		
	Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar (80%)		
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	0
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)		
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/Dipenuhi
	TERJADI BENCANA		
	1. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	rumah	0
	2. Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	rumah	0
	3. Pemukiman kembali bagi korban bencana	rumah	0
	4. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	rumah	0
	TIDAK TERJADI BENCANA Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	Jumlah kab/kota	1
2	FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG	%	100

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian / Target Indikator
	TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	- Ada Relokasi - Tidak Ada Relokasi (Lampirkan Form Tahapan Penerapan)		
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani		0
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)		
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/Dipenuhi
	1. Fasilitas penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	rumah	0
	a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal)	rumah	0
	b. Proses sosialisasi kepada masyarakat	rumah	0
	c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	rumah	0
	2. Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	rumah	0

Sumber data : spm.bangda.kemendagri.go.id

4.4.3. Realisasi

Untuk tahun 2025, capaian penerapan SPM Perumahan Kota Pangkal Pinang adalah 100 persen dengan rincian sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel IV. 15

Realisasi Capaian SPM Perumahan Rakyat Tahun 2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian /output			Total Pencapaian (%)
	Kategori Indeks Pencapaian SPM		TUNTAS PARIPURNA			100
1	PENYEDIAAN & REHABIITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	%				100
	Bencana meliputi : a) Letusan gunung berapi; b) Gempa bumi; c) Tanah longsor; d) Gelombang pasang; e) Banjir bandang; dan/atau f) Bencana lainnya					
	TIDAK TERJADI BENCANA (melampirkan form 4A1, 4B6, 4B7, 4C3)					
	Tidak Terjadi (Dokumen Teknis Perencanaan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman) di Verifikasi oleh Sekber Pusat (contoh : dokumen RP3KP, dsb.) Tidak Masuk Ke dalam Perhitungan					
	Persentase Capaian Layanan Dasar (100%)			100%		100
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	100
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					100
	1. Format Tahapan		Nilai Maksimum Pada TW 4 (100%)			100
	1. PENDATAAN					100
	FORM 4.A.4 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA					100
	FORM 4.A.5 IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI RELOKASI PERUMAHAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA					100
	FORM 4.A.6 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA					100

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian /output		Total Pencapaian (%)
	FORM 4.A.10 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI YANG MENIMBULKAN BAHAYA PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH				100
	FORM 4.A.11 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI ATAS LAHAN BUKAN FUNGSI PERMUKIMAN DI KABUPATEN/KOTA				100
	FORM 4.A.12 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH KABUPATEN/KOTA (<10 HA)				100
	FORM 4.A.13 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA				100
	2. PERHITUNGAN				100
	FORM 4.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA				100
	FORM 4.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA				100
	ORM 4.B.7 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				100
	FORM 4.B.8 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA				100
	3. PERENCANAAN				100
	FORM 4.C.2 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA				100
	FORM 4.C.4 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA				100
2	FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				100
	Relokasi Program Pemerintah meliputi : a) Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha; b) Penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; c) Pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi permukiman;				

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian /output		Total Pencapaian (%)
	d) Pengurangan perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya; dan/atau e) Pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana.				
	TIDAK ADA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH				
	Tidak Terjadi (Dokumen Teknis Perencanaan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman) di Verifikasi oleh Sekber Pusat (contoh : dokumen RP3KP, dsb.) Tidak Masuk Kedalam Perhitungan				
	Persentase Pencapaian Layanan Dasar (100%)			100%	100
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	100
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi				100
	1. FORMAT TAHAPAN		Nilai Maksimum Pada TW 4 (100%)		100
	1. PENDATAAN				100
	FORM 4.A.4 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA				100
	FORM 4.A.5 IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI RELOKASI PERUMAHAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA				100
	FORM 4.A.6 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA				100
	FORM 4.A.10 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI YANG MENIMBULKAN BAHAYA PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH				100
	FORM 4.A.11 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI ATAS LAHAN BUKAN FUNGSI PERMUKIMAN DI KABUPATEN/KOTA				100
	FORM 4.A.12 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH KABUPATEN/KOTA (<10 HA)				100
	FORM 4.A.13 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA				100
	2. PERHITUNGAN				100
	FORM 4.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA				100
	FORM 4.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA				100

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian /output		Total Pencapaian (%)
	FORM 4.B.7 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				100
	FORM 4.B.8 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA				100
	3. PERENCANAAN				100
	FORM 4.C.2 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA				100
	FORM 4.C.4 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA				100

Sumber : spm.bangda.kemendagri.go.id

4.4.3. Alokasi Anggaran

Pada tahun 2025, total anggaran penerapan SPM bidang urusan perumahan di Kota Pangkal Pinang adalah Rp. 270.312.480,- dan terealisasi RP. 249.698.070,- atau sebesar 92,37 persen. Alokasi anggaran tersebut dilaksanakan melalui Program Pengembangan Perumahan dengan dua kegiatan yaitu Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota. Secara rinci, berikut program dan kegiatan pendukung pemenuhan SPM bidang urusan perumahan Kota Pangkal Pinang Tahun 2025.

Tabel IV.16
Program dan Kegiatan Pendukung Pemenuhan SPM Perumahan Rakyat Tahun 2025

Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Satuan	Anggaran	Realisasi	(%)
1.04.02 Program Pengembangan Perumahan		270.312.480	249.698.070	92,37
1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	dok	258.294.480	244.189.070	94,54
1.04.02.2.01.0002 Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	dok	4.659.000	1.100.000	23,61
1.04.02.2.01.0006 Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	dok	56.602.392	56.602.392	100
1.04.02.2.01.0007 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	dok	46.230.696	41.702.696	90,21
1.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	dok	150.802.392	144.783.982	96,01
1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		12.018.000	5.509.000	45,84
1.04.02.2.02.0001 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana	orang	5.509.000	5.509.000	100
1.04.02.2.02.0004 Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	orang	6.509.000	0	0

Sumber : spm.bangda.kemendagri.go.id

4.4.4. Dukungan Personil

Selama tahun 2025, penerapan SPM bidang urusan perumahan rakyat Kota Pangkal Pinang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkal Pinang dengan dukungan SDM sebanyak 9 orang dengan rincian sebagai berikut:

- Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman : 1 orang
- Kepala Bidang Perumahan : 1 orang

- JFT Pengawas Teknik Tata Bangunan dan Perumahan : 2 orang
- Staf non ASN pada Bidang Perumahan : 5 orang

4.4.5. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat di Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 yaitu :

- bencana yang terjadi di Kota Pangkal Pinang pada tahun 2025 tidak termasuk dalam kategori bencana yang berdampak luas dan memerlukan penetapan Kepala Daerah dalam penanganannya, sehingga terkait pemenuhan jenis layanan Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota tidak terlaksana. Yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman selaku pengampu SPM ini adalah tahapan pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan pemenuhan kebutuhan apabila terjadi bencana.
- Selama tahun 2025, tidak terdapat program pemerintah yang menyebabkan relokasi bagi warga masyarakat, sehingga terkait pemenuhan jenis layanan Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota maka yang telah dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkal Pinang adalah melakukan tahapan pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan pemenuhan kebutuhan apabila terjadi relokasi akibat program pemerintah di Kota Pangkal Pinang.

4.5. BIDANG URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Trantibumlinmas (SPM Trantibumlinmas) secara umum diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal. SPM Trantibumlinmas ini terdiri atas 3 (tiga) sub bidang urusan, yaitu :

- a. Sub urusan Trantibum, yang secara teknis penerapannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;

- b. Sub urusan Kebencanaan, yang secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota; dan
- c. Sub urusan Kebakaran yang secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2025, SPM Trantibumlinmas Kota Pangkal Pinang dilaksanakan oleh 2 (dua) perangkat daerah, yaitu Satpol PP Kota Pangkal Pinang yang menangani SPM Sub Bidang Urusan Trantibum dan Sub Bidang Urusan Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkal Pinang yang menangani SPM Sub Bidang Urusan Kebencanaan. Berikut uraian penerapan Penerapan SPM Trantibumlinmas Tahun 2024 Kota Pangkal Pinang.

4.5.1. Jenis Layanan Dasar

Ketentuan teknis penerapan SPM Trantibumlinmas mengatur tentang jenis, mutu, kriteria penerima layanan dan tata cara pemenuhan standar, yang secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel IV. 17
Jenis, Mutu dan Kriteria Penerima Layanan Dasar SPM Trantibumlinmas

No	Sub Urusan	Jenis Layanan	Mutu Layanan	Kriteria Penerima
1	Trantibum	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP b. Standar sarana prasarana satpol PP c. standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat d. standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	Warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda provinsi dan kabupaten/kota serta Perkada, dengan kriteria : - mengalami kerugian materil dan/atau cedera fisik akibat penegakan Perda dan Perkada; dan/atau - berada pada jarak antara 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh) meter dari lokasi penegakan Perda dan Perkada
2	Kebencanaan	Pelayanan informasi rawan bencana	a. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam	setiap Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana Daerah kabupaten/kota

No	Sub Urusan	Jenis Layanan	Mutu Layanan	Kriteria Penerima
			bentuk dokumen yang sah/legal) b. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana c. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia) a. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	
		Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	a. Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll) d. Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	setiap Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana Daerah kabupaten/kota
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	a. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana) b. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana c. Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana) d. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	setiap Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana Daerah kabupaten/kota
3	Kebakaran	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi	a. tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap	Setiap Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk jenis pelayanan

No	Sub Urusan	Jenis Layanan	Mutu Layanan	Kriteria Penerima
		korban kebakaran	memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi; b. prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi c. sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi d. kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/sumber daya manusia e. pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran f. pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah kabupaten/kota

4.5.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Tabel IV.18
Target Pencapaian SPM Trantibumlinmas Kota Pangkal Pinang Tahun 2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Indikator /Output	Target Capaian (%)
SUB URUSAN TRANTIBUM				100
1.	PELAYANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KABUPATEN/KOTA			100
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)			
			Jumlah total yang harus dilayani	
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	50	100
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)			
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	
	1. Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)	unit	115	100
	2. Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam	dokumen	13	100

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Indikator /Output	Target Capaian (%)
	rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 (SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)			
	3. Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	orang	5	100
	4. Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material	dokumen	1	100
	5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	0	100
	6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	orang	0	100
SUB URUSAN KEBENCANAAN				100
1.	PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA			100
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar			
			Jumlah total yang harus dilayani	
	A. Jumlah Total Yang harus Dilayani	orang	3.849	100
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar			
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	
	1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana			100
	a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalakan minimal perkada	dokumen	1	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Indikator /Output	Target Capaian (%)
	dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta			
	b. Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkada dalam bentuk kajian dan album peta	dok	1	
2.	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana			100
	2) Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana			100
	a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	eks	50	
	b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	desa	1	
	c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	orang	10	
	d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	10	
	3) Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia			100
	a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	media	3	
	b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	buah	5	
	c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	
	d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	3	
	e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	
	4) Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik			100
	a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	buah	15	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Indikator /Output	Target Capaian (%)
	b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	buah	0	
	c. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	orang	5	
	d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	orang	5	
	e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			100
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)			
			Jumlah total yang harus dilayani	
	A. Jumlah Total Yang harus Dilayani	orang	500	100
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)			
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	
	1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana			100
	Ada/Belum Ada			
	a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkara	dok	1	
	b. Tersedianya Dokumen RPB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkara	dok	1	
	2. Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)			100
	Ada/Belum Ada			
	a. Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (sesuai dengan kebutuhan)	dok	1	
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	dok	1	
	c. Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)	orang	4	
	d. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang	40	
	3. Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi			100
	1) Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur			

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Indikator /Output	Target Capaian (%)
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	30	
	d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	
	e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	3	
	f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	3	
	2) Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara			
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	0	
	d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	5	
	e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	
	4. Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana			
	1) Simulasi Dalam Ruangan (Table-Top Exercise)			
	a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	dok	0	
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	
	c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table	orang	0	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Indikator /Output	Target Capaian (%)
	top exercise (sesuai dengan kebutuhan)			
	2) Gladi Lapang			
	a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	dok	0	
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	
	c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	
	5. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana			
	1) Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			
	a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	hari	365	
	b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	pertemuan	0	
	c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	orang	0	
	d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	
	e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	
	2) Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana			
	a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	100
	b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	unit	4	100
	c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	unit	30	100
	d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga	unit	20	100

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Indikator /Output	Target Capaian (%)
	Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)			
	3) Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara <i>Broadcast</i>			
	a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	100
	b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	100
	4) Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat			
	a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	100
	b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	100
	6. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			
	a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	100
	b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	100
	c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	100
	d. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	unit	111	100
3.	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA			100
	TERJADI BENCANA (Lampirkan SK Bencana)			
	TIDAK TERJADI BENCANA (Lampirkan dokumen tahapan SPM)			
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)			
			Jumlah total yang harus dilayani	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Indikator /Output	Target Capaian (%)
	A. Jumlah Total Yang harus Dilayani	orang	650	100
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)			
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	
	1. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	posko	0	100
	2. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	orang	650	100
	3. Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	dokumen	0	100
	4. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	layanan	0	100
	5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	layanan	0	100
KATEGORI SPM KEBAKARAN				100
1.	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN			100
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)			
			Jumlah total yang harus dilayani	
	A. Jumlah Total Yang harus Dilayani	orang	120	100
	Persentase Pencapaian Layanan (20%)			
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	
	1. Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	layanan	25	100
	2. Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	dokumen	8	100
	3. Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran	unit	81	100
	4. Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	orang	1	100

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Indikator /Output	Target Capaian (%)
	5. Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	orang	2	100
	6. Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	orang	125	100

Sumber data : spm.bangda.kemendagri.go.id

4.5.3. Realisasi

Tabel IV.19
Realisasi Pencapaian SPM Trantibumlinmas Kota Pangkal Pinang Tahun 2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian /output			Total Pencapaian (%)
	Kategori Indeks Pencapaian SPM TRANTIBUMLINMAS		TUNTAS UTAMA			99,10
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM sub bidang TRANTIBUM		TUNTAS PARIPURNA			100
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota	%				100
					80%	80
			Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	50	50	0	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				20%	20
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100
	1. Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)	unit	115	115	0	100
	2. Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023	dokumen	13	13	0	100

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian /output			Total Pencapaian (%)
	(SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)					
3.	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	orang	5	5	0	100
4.	Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	dokumen	1	1	0	100
5.	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	0	0	0	100
6.	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	orang	0	0	0	100
KATEGORI PENCAPAIAN SPM sub bidang KEBENCANAAN			TUNTAS UTAMA			98,33
1.	PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA					98
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80%	80
			Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		3.849	3.849	0	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				20%	18
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					
	1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana					

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian /output			Total Pencapaian (%)
	Ada : Sudah lama dibuat (Masih berlaku s.d saat ini)					
	a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkara dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen	1	1	0	100
	b. Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkara dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen	1	1	0	100
	2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana					
	1) Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					
	a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	eksemplar	50	50	0	100
	b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	desa	1	1	0	100
	c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	orang	10	10	0	100
	d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	10	10	0	100
	2) Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					
	a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	media	3	3	0	100
	b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	buah	5	5	0	100
	c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1	0	100
	d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	3	3	0	100
	e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	0	100

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian /output			Total Pencapaian (%)
	3) Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					
	a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	buah	15	15	0	100
	b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	buah	0	0	0	0
	c. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	orang	5	5	0	100
	d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	orang	5	5	0	100
	e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	0	0
2.	PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA					97
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80%	80
			Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)	orang	500	500	0	100
					20%	17
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					85
	1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana					
	a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkada	dokumen	1	1	0	100
	b. Tersedianya Dokumen RPB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkad	dokumen	1	1	0	100
	2. Pembuatan Rencana Kontinjensi (RENKON)					
	a. Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	0	100

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian /output			Total Pencapaian (%)
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	dokumen	1	1	0	100
	c. Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)	orang	4	4	0	100
	d. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang	40	26	14	65
	3. Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi					55
	1) Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					50
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100
	b. Tersedianya Materi pelatihan	paket	1	1	0	100
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	30	0	30	0
	d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	0	0
	e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	3	3	0	100
	f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	3	0	3	0
	2) Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					60
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	0	0	0	0
	d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	5	5	0	100
	e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	0	0

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian /output			Total Pencapaian (%)
	4. Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana					100
	1) Simulasi Dalam Ruangan (Table-Top Exercise) *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100
	a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	0	0	0	100
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	0	100
	c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	0	100
	2) Gladi Lapang *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100
	a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	0	0	0	100
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	0	100
	c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	0	100
	5. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana					80
	1) Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					20
	a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	hari	365	365	0	100
	b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	pertemuan	0	0	0	0
	c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	orang	0	0	0	0
	d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	0	0
	e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	0	0

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian /output			Total Pencapaian (%)
	2) Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100
	a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1	0	100
	b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	unit	4	4	0	100
	c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	unit	30	30	0	100
	d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit	20	20	0	100
	3) Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					
	a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	0	100
	b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	0	100
	4) Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100
	a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	0	100
	b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	0	100
	6. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana					75
	a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100
	b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	0	0

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian /output			Total Pencapaian (%)
	c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100
	d. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	unit	111	111	0	100
3.	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA					100
	TIDAK TERJADI BENCANA (Penilaian 100% sesuai kelengkapan Lampiran dokumen tahapan SPM)					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80
			Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	100
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)	orang	600	0	600	100
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100
	1. FORMAT TAHAPAN					100
	1. PENDATAAN					100
	FORM 5.A.1 DAFTAR WARGA NEGARA YANG BERADA DI KAWASAN RAWAN BENCANA					
	FORM 5.A.2 DAFTAR KERAWANAN TEMPAT TINGGAL INDIVIDU WARGA NEGARA					
	FORM 5.A.3 REKAPITULASI KELOMPOK WARGA NEGARA BERDASARKAN KELOMPOK KERAWANAN DESA					
	FORM 5.A.4 REKAPITULASI APARAT DAN WARGA NEGARA DI KAWASAN RAWAN BENCANA					
	FORM 5.A.5 DAFTAR PETUGAS OPERASI PENANGANAN DARURAT BENCANA BERDASARKAN LOKASI PENUGASAN					
	FORM 5.A.6 REKAPITULASI WARGA NEGARA WAJIB LATIH					

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian /output				Total Pencapaian (%)
	FORM 5.A.7 DAFTAR KETERSEDIAAN PERALATAN PENDUKUNG OPERASI TANGGAP DARURAT BENCANA						
	FORM 5.A.8 DAFTAR KETERSEDIAAN STOK LOGISTIK PENGUNGSIAN						
	FORM 5.A.9 DAFTAR WARGA NEGARA YANG MENJADI KORBAN BENCANA (Diisi dan Diperbarui Setiap Kejadian Bencana)						
	FORM 5.A.10 DAFTAR STATUS KORBAN BENCANA (Diisi dan Diperbarui Setiap Kejadian Bencana)						
	FORM 5.A.11 DAFTAR PETUGAS AKTIF PADA OPERASI TANGGAP DARURAT BENCANA (Diisi dan Diperbarui Setiap Kejadian Bencana)						
	FORM 5.A.12 DAFTAR KEJADIAN BENCANA (Diisi dan Diperbarui Setiap Kejadian Bencana)						
	2. PERHITUNGAN						100
	FORM 5.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA DAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA						
	FORM 5.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA (Diisi dan Diperbarui untuk Setiap Bencana yang Ditetapkan Status Keadaan Darurat)						
	3. PERENCANAAN						100
	FORM 5.C.1 RENCANA PEMENUHAN DAN KERANGKA PENDANAAN UNTUK PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA DAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA						
	FORM 5.C.2 RENCANA PROYEKSI KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA						
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR		TUNTAS UTAMA				98,97

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian /output			Total Pencapaian (%)
1	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN (DAMKAR)					98,97
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80	80
			Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	orang	125	170	+45	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					94, 86
	1. Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	layanan	25	34	+9	100
	2. Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	dokumen	8	8	0	100
	3. Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran	unit	81	56	25	69,14
	4. Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	orang	1	1	0	100
	5. Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	orang	2	0	2	100
	6. Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	orang	125	170	_45	100

4.5.4. Alokasi Anggaran

Pada tahun 2025, alokasi anggaran penerapan SPM Kebencanaan pada BPBD Kota Pangkal Pinang adalah Rp. 3.417.011.832,- dan terealisasi Rp. 3.173.489.347,- atau terserap 93,87%. Alokasi anggaran SPM Trantibum Rp. 8.268.041.248,- terealisasi Rp. 8.104.332.396 atau sebesar 98,03%. Dan alokasi anggaran untuk SPM Pemadam Kebakaran Rp. 4.998.337.128,00 terealisasi Rp. 4.779.852.856,00 atau sebesar 95,63%

4.5.5. Dukungan Personil

Pada tahun 2025, penerapan SPM Trantibumlinmas Kota Pangkal Pinang dilaksanakan oleh dua perangkat daerah, yaitu Satpol PP dan BPBD Kota Pangkal Pinang. Jumlah aparatur Satpol PP pendukung penerapan SPM trantibum adalah sebanyak 158 orang ASN yang terdiri dari 44 orang PNS dan 181 orang PPPK Paruh Waktu serta 33 orang PJLP. Aparatur pendukung pelaksana penerapan SPM Pemadam Kebakaran sebanyak 11 PNS dan 121 PPPK Paruh waktu. Sedangkan jumlah aparatur BPBD pendukung penerapan SPM kebencanaan sebanyak 25 orang ASN (23 orang PNS dan 2 orang PPPK) serta 113 orang pegawai non ASN.

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan SPM Trantibumlinmas Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 antara lain :

- masih banyak aparatur pelaksana SPM yang masih belum memenuhi kriteria seperti yang telah ditentukan oleh peraturan teknis yang mengatur mengenai aparatur pelaksana SPM, baik itu Satpol PP maupun Pemadam Kebakaran karena minimnya anggaran guna mengikuti kegiatan pelatihan maupun sertifikasi yang diperlukan. Solusi untuk masalah ini adalah menganggarkan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur di tahun ke depan;
- sulitnya perolehan data masyarakat yang terdampak penegakan perda maupun yang terdampak bencana kebakaran. Sebagian masyarakat baru mau memberikan datanya bila akan menerima bantuan;
- pada sebagian kejadian kebakaran, petugas mengalami kesulitan untuk mencapai lokasi kejadian yang berada pada wilayah permukiman padat penduduk;
- kualitas, dan kuantitas (secara struktural dan fungsional) SDM yang membidangi belum terpenuhi di dalam menjalankan sub urusan kebencanaan;

- belum maksimalnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan evakuasi korban; dan
- belum maksimalnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan sub urusan kebencanaan.

4.6. BIDANG URUSAN SOSIAL

Pada tahun 2025, SPM Bidang Urusan Sosial di Kota Pangkal Pinang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pangkal Pinang. Dalam uraian berikut, dijelaskan mengenai penerapan SPM Bidang Urusan Sosial di Kota Pangkal Pinang tahun 2025.

4.6.1. Jenis Layanan Dasar

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jenis layanan dasar yang ditetapkan untuk SPM Bidang Sosial Kabupaten/Kota meliputi :

- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- b. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
- e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Sedangkan mutu layanan pemenuhan SPM Sosial terdiri atas :

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa

Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh penerima Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial berupa pelayanan data dan pengaduan, kedaruratan dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Sedangkan standar jumlah dan kualitas barang/jasa yang harus diterima oleh korban bencana daerah kabupaten/kota terbagi menjadi dua, yaitu pada saat tanggap darurat bencana berupa permakanan, sandang, tempat penampungan pengungsi, penanganan khusus bagi kelompok rentan dan dukungan psikososial dan setelah tanggap darurat bencana berupa penanganan khusus bagi kelompok rentan dan pelayanan dukungan psikososial.

b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial

Sumber daya manusia kesejahteraan sosial terdiri atas Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Profesional, Penyuluh Sosial dan Relawan Sosial. Standar dan kualifikasi sumber daya manusia kesejahteraan sosial diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setiap Pusat Kesejahteraan Sosial memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Relawan Sosial yang terdiri atas pekerja sosial masyarakat, karang taruna, tenaga pelopor perdamaian, taruna siaga bencana, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, wanita pemimpin kesejahteraan sosial, kader rehabilitasi berbasis masyarakat kader rehabilitasi berbasis keluarga; dan/atau penyuluh sosial masyarakat.

c. standar minimum sarana dan prasarana

Standar minimum sarana dan prasarana pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar di Pusat Kesejahteraan Sosial, meliputi tempat yang dijadikan pusat kegiatan bersama dan tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga pengelola dan pelaksana serta peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran dan peralatan penunjang pelayanan teknis

4.6.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Tabel IV.20
Target Pencapaian SPM Sosial Kota Pangkal Pinang Tahun 2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Indikator / Output	Target Capaian (%)
1.	REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DI LUAR PANTI			100
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			80
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	2	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)			20
	B. Jumlah mutu Barang/Jasa/SDM			100
	1. Layanan Data dan Pengaduan	orang		100
	2. Penyediaan Permakanan	orang		100
	3. Penyediaan Layanan Kedaruratan/ Layanan Reaksi Cepat	orang		100
	4. Penyediaan Sandang	orang		100
	5. Penyediaan Alat Bantu	orang		100
	6. Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang		100
	7. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	orang		100

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Indikator / Output	Target Capaian (%)
	8. Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	orang		100
	9. Fasilitasi Pembuatan No Induk Kependudukan/Bukti Kepemilikan NIK	orang		100
	10. Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	orang		100
	11. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga/Bukti Keberadaan Keluarga	orang		100
	12. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang		100
	13. Layanan Rujukan	orang		100
2.	REHABILITASI SOSIAL DASAR ANAK TERLANTAR DI LUAR PANTI			100
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	80		80
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	orang		100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)			20
	B. Jumlah mutu Barang/Jasa/SDM			100
	1. Layanan Data dan Pengaduan	orang		100
	2. Penyediaan Layanan Kedaruratan/ Layanan Reaksi Cepat	orang		100
	3. Penyediaan Permakanan	orang		100
	4. Penyediaan Sandang	orang		100
	5. Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang		100
	6. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	orang		100
	7. Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Anak Terlantar	orang		100
	8. Fasilitasi Pembuatan No Induk Kependudukan/Bukti Kepemilikan NIK	orang		100
	9. Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	orang		100
	10. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga/Bukti Keberadaan Keluarga	orang		100
	11. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang		100
	12. Pemberian Layanan Rujukan	orang		100
3.	REHABILITASI SOSIAL DASAR LANJUT USIA TERLANTAR DI LUAR PANTI			100
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			80
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	orang		100

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Indikator / Output	Target Capaian (%)
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)			20
	B. Jumlah mutu Barang/Jasa/SDM			100
	1. Layanan Data dan Pengaduan	orang		100
	2. Penyediaan Permakanan	orang		100
	3. Penyediaan Layanan Kedaruratan/ Layanan Reaksi Cepat	orang		100
	4. Penyediaan Sandang	orang		100
	5. Penyediaan Alat Bantu	orang		100
	6. Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang		100
	7. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	orang		100
	8. Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	orang		100
	9. Fasilitasi Pembuatan No Induk Kependudukan/Bukti Kepemilikan NIK	orang		100
	10. Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	orang		100
	11. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga/Bukti Keberadaan Keluarga	orang		100
	12. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang		100
	13. Layanan Rujukan	orang		100
4.	REHABILITASI SOSIAL DASAR TUNA SOSIAL KHUSUSNYA GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI LUAR PANTI			100
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			80
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	orang		100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)			20
	B. Jumlah mutu Barang/Jasa/SDM			100
	1. Layanan Data dan Pengaduan	orang		100
	2. Penyediaan Layanan Kedaruratan/ Layanan Reaksi Cepat	orang		100
	3. Penyediaan Permakanan	orang		100
	4. Penyediaan Sandang	orang		100
	5. Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang		100
	6. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	orang		100
	7. Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Anak Terlantar	orang		100
	8. Fasilitasi Pembuatan No Induk Kependudukan/Bukti Kepemilikan NIK	orang		100
	9. Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	orang		100

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Indikator / Output	Target Capaian (%)
	10. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga/Bukti Keberadaan Keluarga	orang		100
	11. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang		100
	12. Pemberian Layanan Rujukan	orang		100
5.	PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PADA SAAT TANGGAP DARURAT DAN PASKA BENCANA BAGI KORBAN BENCANA KAB/KOTA			100
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			80
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani			100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)			20
	B. Jumlah mutu Barang/Jasa/SDM			100
	1. Penyediaan makanan	orang		100
	2. Penyediaan Sandang	orang		100
	3. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	unit		100
	4. Pengangan Khusus Bagi Kelompok Rentan	orang		100
	5. Pelayanan Dukungan Psikososial	orang		100

4.6.3. Realisasi

Tabel IV.21
Realisasi Capaian SPM Sosial Kota Pangkal Pinang Tahun 2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian /output			Total Pencapaian (%)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			96,74
1.	REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DI LUAR PANTI					98,46
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80%	80
			Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	40	40	0	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20%	92,31
			Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/Terpenuhi	Mutu yang Belum Terpenuhi	
	B. Jumlah mutu Barang/Jasa/SDM					
	1. Layanan Data dan Pengaduan	orang	20	20	0	100
	2. Penyediaan Layanan Kedaruratan/ Layanan Reaksi Cepat	orang	0	0	0	100
	3. Penyediaan Permakanan	orang	40	40	0	100
	4. Penyediaan Sandang	orang	20	20	0	100
	5. Penyediaan Alat Bantu	orang	10	10	0	100
	6. Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang	2	2	0	100
	7. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	orang	8	8	0	100

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian /output			Total Pencapaian (%)
	8. Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	orang	15	15	0	100
	9. Fasilitasi Pembuatan No Induk Kependudukan/Bukti Kepemilikan NIK	orang	15	15	0	100
	10. Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	orang	30	30	0	100
	11. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga/Bukti Keberadaan Keluarga	orang	5	5	0	100
	12. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang	2	2	0	100
	13. Layanan Rujukan	orang	25	25	0	100
2.	REHABILITASI SOSIAL DASAR ANAK TERLANTAR DI LUAR PANTI					93,33
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80
			Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	5	5	0	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					66,67
			Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/Terpenuhi	Mutu yang Belum Terpenuhi	
	B. Jumlah mutu Barang/Jasa/SDM					
	1. Layanan Data dan Pengaduan	orang	5	5	0	100
	2. Penyediaan Layanan Kedaruratan/ Layanan Reaksi Cepat	orang	10	10	0	100
	3. Penyediaan Permakanan	orang	5	5	0	100
	4. Penyediaan Sandang	orang	5	5	0	100
	5. Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang	2	2	0	100

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian /output			Total Pencapaian (%)
	6. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	orang	0	0	0	0
	7. Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Anak Terlantar	orang	0	0	0	0
	8. Fasilitasi Pembuatan No Induk Kependudukan/Bukti Kepemilikan NIK	orang	2	2	0	100
	9. Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	orang	0	0	0	0
	10. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga/Bukti Keberadaan Keluarga	orang	0	0	0	0
	11. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang	0	0	0	100
	12. Pemberian Layanan Rujukan	orang	25	25	0	100
3.	REHABILITASI SOSIAL DASAR LANJUT USIA TERLANTAR DI LUAR PANTI					96,92
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80
			Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	50	50	0	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20%	16.92
			Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/Terpenuhi	Mutu yang Belum Terpenuhi	84,62
	B. Jumlah mutu Barang/Jasa/SDM					
	1. Layanan Data dan Pengaduan	orang	5	5	0	100
	2. Penyediaan Permakanan	orang	0	0	0	0
	3. Penyediaan Layanan Kedaruratan/ Layanan Reaksi Cepat	orang	50	50	0	100

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian /output			Total Pencapaian (%)
	4. Penyediaan Sandang	orang	20	20	0	100
	5. Penyediaan Alat Bantu	orang	27	27	0	100
	6. Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang	2	2	0	100
	7. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	orang	7	7	0	100
	8. Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	orang	0	0	0	0
	9. Fasilitas Pembuatan No Induk Kependudukan/Bukti Kepemilikan NIK	orang	0	0	0	0
	10. Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	orang	20	20	0	100
	11. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga/Bukti Keberadaan Keluarga	orang	5	5	0	100
	12. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang	2	2	0	100
	13. Layanan Rujukan	orang	0	0	0	0
4.	REHABILITASI SOSIAL DASAR TUNA SOSIAL KHUSUSNYA GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI LUAR PANTI					95
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80%	80
			Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	orang			0	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20%	15

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian /output			Total Pencapaian (%)
			Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/Terpenuhi	Mutu yang Belum Terpenuhi	
	B. Jumlah mutu Barang/Jasa/SDM					75
	1. Layanan Data dan Pengaduan	orang	20	20	0	100
	2. Penyediaan Layanan Kedaruratan/ Layanan Reaksi Cepat	orang	30	30	0	100
	3. Penyediaan Permakanan	orang	5	5	0	100
	4. Penyediaan Sandang	orang	5	5	0	100
	5. Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang	20	20	0	100
	6. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	orang	0	0	0	0
	7. Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Anak Terlantar	orang	0	0	0	0
	8. Fasilitasi Pembuatan No Induk Kependudukan/Bukti Kepemilikan NIK	orang	8	8	0	100
	9. Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	orang	0	0	0	0
	10. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga/Bukti Keberadaan Keluarga	orang	10	10	0	100
	11. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang	6	6	0	100
	12. Pemberian Layanan Rujukan	orang	0	0	0	100
5	PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PADA SAAT TANGGAP DARURAT DAN PASKA BENCANA BAGI KORBAN BENCANA KAB/KOTA					100
YA, TERJADI BENCANA						

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian /output			Total Pencapaian (%)
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80
			Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	185	185	0	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20%	20
			Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/Terpenuhi	Mutu yang Belum Terpenuhi	
	B. Jumlah mutu Barang/Jasa/SDM					
	1. Penyediaan makanan	orang	50	50	0	100
	2. Penyediaan Sandang	orang	50	50	0	100
	3. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	unit	25	25	0	100
	4. Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	orang	135	135	0	100
	5. Pelayanan Dukungan Psikososial	orang	135	135	0	100

4.6.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang tersedia untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang urusan Sosial di Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 adalah Rp. 248.875.000,- dan terealisasi Rp. 227.933.475,- atau sebesar 91,59 persen.

4.6.5. Dukungan Personil

Jumlah aparatur pendukung pelaksanaan SPM Sosial Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 adalah sebanyak 149 orang, dengan rincian sebagai berikut :

- a. ASN, yang terdiri atas : 6 orang pegawai di Bidang Rehabilitasi Sosial dan 5 orang pegawai di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- b. Non ASN, yang terdiri atas :
 - Satuan Bhakti Pekerja Sosial (Shakti Peksos) sebanyak 16 orang
 - URC Tagana sebanyak 18 orang
 - Petugas Posko sebanyak 3 orang
 - Logistik sebanyak 2 orang
 - Admin sebanyak 1 orang
- c. Relawan Sosial, yang terdiri atas :
 - Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebanyak 42 orang
 - Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebanyak 7 orang
 - Taruna Siaga Bencana (TAGANA) sebanyak 49 orang

4.6.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan SPM bidang urusan sosial Tahun 2025 di Kota Pangkal Pinang adalah sebagai berikut :

- a. Permasalahan mendasar yang harus menjadi perhatian serius setiap tahun dalam penerapan pelaksanaan SPM ini adalah dinamisnya data 5 kategori target SPM yakni penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar dan tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis serta korban bencana sosial/alam yang sifatnya akan selalu berubah. Solusinya adalah updating data berkala setiap tahun dan melaksanakan pendataan target SPM secara komprehensif serta membuka layanan informasi dan pengaduan seluas-luasnya dengan memanfaatkan jejaring SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu) di masing-masing kelurahan. Solusi lain dari dinamisnya data target capaian SPM Bidang Sosial ini adalah menambah slot anggaran cadangan pada anggaran SPM yang telah ditetapkan setiap tahun,

sehingga sewaktu-waktu ada kondisi target SPM yang harus diselesaikan dapat dicover pemenuhan kebutuhan dasarnya.

- b. Permasalahan berikutnya adalah terbatasnya sumber pendanaan APBD Kota Pangkal Pinang, solusinya harus dapat memaksimalkan potensi sumber pendanaan lainnya seperti APBN, APBD Provinsi Bangka Belitung, Baznas maupun swadaya masyarakat. Sampai dengan pelaksanaan tahun 2025 berbagai potensi sumber pendanaan ini terbukti meningkatkan efisensi dan efektifitas penerapan pemenuhan layanan dasar bidang sosial di Kota Pangkal Pinang.
- c. Permasalahan lainnya yang tak kalah penting adalah sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan penerapan SPM Bidang Sosial maupun bidang limjamsos di Kota Pangkal Pinang. Solusinya adalah menguatkan dan mengembangkan jejaring PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) di Kota Pangkal Pinang, termasuk sinergitas dengan mitra kerja terkait untuk mendukung pelaksanaan penerapan SPM Bidang Sosial di Kota Pangkal Pinang.

BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 merupakan pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang ke Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berisi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama tahun 2024.

Dalam laporan ini disampaikan seluruh capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan se-transparan mungkin, baik dari sisi capaian, kendala/permasalahan beserta upaya penyelesaian dari masalah yang timbul selama pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2024 sebagai wujud penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kota Pangkal Pinang.

Keberhasilan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan Kota Pangkal Pinang tidak lepas dari dukungan, koordinasi dan kolaborasi dari seluruh komponen yang ada, baik itu masyarakat, swasta, legislatif, Pemerintah Kota Pangkal Pinang maupun pihak Pemerintah selaku pembina pemerintah daerah. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Pangkal Pinang.

Akhirnya, semoga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 dapat memenuhi harapan semua pihak dan dapat menjadi bahan evaluasi serta motivasi dalam bagi penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Kami menyadari bahwa masih banyak hal-hal yang kurang sempurna dalam penyusunan laporan ini, namun kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pemerintah Kota Pangkal Pinang dalam meningkatkan kinerja ke depan guna menciptakan masyarakat Pangkal Pinang yang lebih sejahtera.